



BAB II

KONSEP NIKAH DAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah sebagai *sunnatullah* yang ditentukan oleh Allah swt. bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dapat dilihat pengertiannya dari sisi *lughawi* (etimologis) dan *ishthilâhi* (Termonilogis).¹ Dalam *al-Qurân* dan Hadis, perkawinan disebut dengan *al-nikâh* (النكاح) dan *az-ziwâj/ az-zawâj* atau *az-zîjah* (الزواج - الزيجه).²

Secara harfiah, *al-nikâh* berarti *al-wathu* (الوطء) *al-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wathu'* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – watha'an* (وطأ - يطاء - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.³ *Al-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma- yadhummu- dhamman* (ضم - يضم - ضماً), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga

¹ Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri (w. 1360 H/1941 H) ada tiga aspek pengertian (makna) dalam menelusuri pengertian nikah, yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushûli* (*syar'i*) dan makna *fiqhi* (hukum). Abdur-Rahman Al-Jaziri (Selanjutnya disebut Al-Jaziri), *al-fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut- Lubnam : Dar al-Fikr, 1411/1990), jil. 4, hlm. 2.

² Menurut Muhsan Syafaruddin kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya dalam *al-Qurân* ditemukan 23 kali sedangkan kata *tazawwaja* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali. Lihat Muhsan Syafaruddin, 2016, *Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tazawwaja*, Jurnal al-Majaalis, Volume 4, No. 1 November 2016, hlm. 189-190

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-munawwir, 1984), hlm. 1671-1672.

berarti bersikap lunak dan ramah.⁴ Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'* – *yajma'u* – *jam'an* (جمع - يجمع - جمعا), berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.⁵ Bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'*. Persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terhimpun dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

Nikah dilihat dari segi hakikat dan majaznya, ahli hukum mempetakan menjadi tiga macam. *Pertama*, nikah diartikan perjanjian (akad) dalam arti denotatif dan hubungan seksual dalam arti metafora (حقيقة في العقد مجاز في الوطء). *Kedua*, nikah dimaknai dengan hubungan seksual dalam arti denotatif dan perjanjian (akad) dalam arti metafora (حقيقة في الوطء مجاز في العقد). *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (memiliki aneka makna), sehingga nikah berarti perjanjian (akad) dan hubungan seksual (حقيقة فيهما بالاشتراك).⁶ Hanya saja perlu dipertegas bahwa hubungan seks yang diistilahkan dengan nikah adalah hubungan badan yang diawali dengan ikatan perjanjian *syar'i*. Bila ada hubungan seks/badan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian *syar'i* sebelumnya, ia tidak layak

⁴*Ibid.*, hlm. 887.

⁵*Ibid.*, hlm 225.

⁶ Perbedaan pendapat tentang makna lafal nikah, berimplikasi terhadap boleh tidaknya seseorang menikahi wanita yang pernah disetubuhi oleh ayah di luar nikah. Menurut mayoritas fuqaha' dari aliran Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, boleh menikahi wanita tersebut, karena lafal nikah menurut mereka bermakna akad secara denotatif dan hubungan intim secara metafora. Sementara aliran Hanafi mengharamkan untuk menikahi perempuan tersebut, karena lafal nikah berarti hubungan intim secara denotatif dan akad secara metafora. Perdebatan para ulama' seputar makna lafal nikah dan konsekuensi hukumnya ini, disarikan dari keterangan 'Adil AHmad 'Abd al-Mawjud, editor karya monumental Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, Vol. IV (Al-Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), hlm. 58.

disebut nikah tetapi diistilahkan zina (perzinahan).⁷

Sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan) ialah *al-zawâj* /*al-ziwâj* dan *al-zîjah*.⁸ Yang dimaksud dengan *al-zawâj/al-ziwâj* disini ialah *al-tazwîj* yang terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwîjan* (تزوّج - تزويجاً) dalam bentuk timbangan “*fa’ala- yufa’ilu- taf’ilan*” (فَعَّلَ - يَفْعَلُ - تَفْعِيلًا) secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, mempergauli, menyertai, dan memperistri.⁹ Dalam *al-Qurân al-zawâj* atau *al-tazwîj* berarti “pasangan”¹⁰. Itulah sebabnya nikah sering disepadankan dengan kata tersebut karena keduanya memiliki kesamaan makna dan pengertian, yaitu pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan nikah secara istilah dalam konteks *syar’i*

⁷ Ibn Manzhur dalam *Lisân al’Arab* mempertegas bahwa kata nikah di dalam Al-Qur’an tidak memiliki kecuali untuk makna *al-tazwîj*. Sebab ada yang mencoba memahami kalimat *al-Zâniyah lâ yankihûhâ illâ zân aw musyrik* dengan “seorang wanita pezina tidak ada yang menyetubuhinya kecuali laki-laki pezina atau seorang musyrik”, dengan kata lain kata nikah pada kalimat tersebut dipahami dalam arti *al-watha’u* atau persetubuhan semata. Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh al-Qur’an. Lihat Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Mashriy, *Lisân al’Arab*, jil. II (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, t.th.), hlm. 625

⁸ Dalam kamus al-Munawir disebut bahwa Kata *al-zawâj* /*al-ziwâj* dan *al-zîjah* terambil dari akar kata *zâja- yazûju - zaujan* (زَاج - يزوج - زوجاً) secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Lihat Ahmad Warson Al-Munwwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 360.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pada dasarnya kata *zawj* berarti *muqâranah syay’in bi syay’in* (menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain) sehingga dikembangkan untuk makna “pasangan”. Lihat dalam Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, jil. V (Kairo: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 2002), hlm.26

¹¹ M. Quraish Shihab mengakui bahwa secara umum *al-Qurân* hanya menggunakan dua kata ini –*nikâh* dan *zawj*- untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami isteri secara sah. Sekalipun ada juga kata *wahabat* (yang berarti “memberi”) digunakan oleh *al-Qurân* untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw., dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi nabi saw. baca dalam M. Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*(Cet. XIX; Bandung: Mizan, 2007), hlm. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

seperti diformulasikan para ulama fikih,¹² terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab fikih yang berbeda mazhab teologisnya, antara mazhab fikih yang sama aliran teologis dan mazhab tidak jarang ditemui perbedaan. Seperti *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat mazhab (*Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah*), yang lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran mazhab teologisnya dalam lingkungan *Ahl al-sunnah wa al-Jamâ'ah (Asy'ariyah/Maturidiah)*.¹³

Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkâh* atau *tazwîj*; atau turunan

¹² Dalam kamus Fikih, nikah diartikan dengan :

عَقْدٌ يُقْبَدُ جُلٌّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ قَصْدًا

“Suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang (sebagaimana suami isteri) tidak ada yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut secara syariat”. Lihat Sa'dy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 360.

¹³ Al-Jaziri, *al-fiqh 'ala...*, hlm. 2-3.

Karenanya, hampir mustahil untuk bisa mempertemukan berbagai definisi nikah atau perkawinan itu dalam satu rumusan yang benar-benar representif, apalagi lengkap sempurna memuaskan semua pihak. Sulit dan apapun alasannya, definisi nikah atau perkawinan ini tetap sebagai pijakan dalam pembahasan tulisan ini. Lagi pula perbedaan yang ada pada masing-masing definisi perkawinan itu pada umumnya bahkan keseluruhannya tidak dalam bentuk yang konfrontatif (*al-tadhaddah*) melainkan perbedaan dalam hal-hal yang bersifat keberagaman (*al-tanawwu*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”¹⁴

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.¹⁵ Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah *milku al-intifâ*, yaitu hak milik

¹⁴ Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah :

النكاح هو عقد يفيد ملك المتعة - أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي - قصدا

Lihat, Muhammad ibn ‘Ali al-Hanafî al-Hashkafî, *Al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr wa Jâmi’ al-Bihâr* (Bairur: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), hlm. 177.

Dalam redaksi berbeda Wahbah menjelaskan :

عقد يفيد ملك المتعة قصدا أي حل إستمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى بالقصد المباشرة

"Akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita yang tidak ada larangan syari' untuk menikahinya, guna mendapatkan kenikmatan. Baca lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), jilid ke-7, cet. Ke-3, hlm. 29

Sedangkan menurut sebahagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

Oleh mazhab Syafi’i, nikah dirumuskan dengan :

النكاح هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Baca, Ahmad Zainuddin ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn* (Bairut: Dar Ibn Hâzim, 1424 H/ 2004 M), hlm. 444.

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa nikah adalah :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

"Akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; Lihat Abu Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1967), hlm. 18, lihat juga Jalal al-Din al-Mahally, *Qulyûby wa ‘Amirâh*, jilid III (Semarang : Makhtabah Putra, tt), hlm. 207, lihat juga Dimyathy, *I’ânah al-Thâlibîn*, Jilid III, (Bandung : Syakah al-Ma’arif, tt), hlm. 254

¹⁵ Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkâm al-Zawâj wa al-Thalâq fi al-Islâm*, (Kairo: Dar al-Ta’lîf, 2002), hlm. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku al-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.¹⁶

Definisi perkawinan (pernikahan) dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷ Definisi ini bila dirinci akan ditemukan :

- Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal

¹⁶ A. Basit Badar Mutawally, *Muhâdharat fi al-Fiqh al-Muqâran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999.), hlm. 120-137

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas jika dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah: *Pertama*, dalam rumusan undang-undang tercermin keharusan ijab-kabul (*‘aqdun al-nikâh*) pada sebuah perkawinan, seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir- bathin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebut kata-kata “akad yang sangat kuat,” lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mîtsâqan ghalîzhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjuk kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah. *Kedua*, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”. Menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia.²⁰

¹⁸ Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*). Lacak dalam A.P. Gragtu L.L.B., *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.), hlm. 139

¹⁹ Baca KHI, Pasal 2.

²⁰ Seperti yang terjadi di beberapa Negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara di Canada. Di antara negara yang membolehkan perkawinan *gay* dan *lesbian* ialah Belanda dan Belgia. Di Amerika Serikat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan KHI tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini, sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh undang-undang Perkawinan. *Ketiga*, undang-undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal,” sementara pada KHI – yang membuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 - lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam kalimat: “ Untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

Menurut sebagian sarjana hukum, di antaranya Sudarsono, “dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda dalam menarik akar kata saja. ²¹ Dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis

perkawinan antar sejenis kini pernah menjadi perdebatan antara yang melarang dan yang membolehkan, terutama dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Presiden Bush menyatakan bahwa perkawinan antar sejenis kelamin harus dilarang. Orang yang pro Bush mengatakan perkawinan semacam itu tidak wajar dan melanggar ajaran agama. Yang anti Bush menanggapi, melarangnya berarti diskriminatif dan melanggar HAM (Toeti Aditam, ‘*HAM, Kontroversi tak Kunjung Habis*’. Kompas, 28 Februari 2004, hlm. 6.

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1994 (Jakarta-Indonesia: Rineka Cipta), hlm. 36.

Apa yang dikatakan Sudarsono ada benarnya terutama dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan menjadi kurang tepat kata kawin dan kata nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami-istri dibalik hubungan biologis itu. Dengan kata nikah, dapat dimaknai bahwa hubungan suami istri dan bahkan hubungan orang tua dengan anak akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.²² Bahkan dengan nikah akan membentuk hubungan yang lebih luas, hubungan antara besan (keluarga pihak suami dan pihak istri) antara kedua suami dan istri. Melalui pernikahan, hubungan komunitas sosial dapat dihubungkan dalam konteks yang sangat luas.

Berbeda ketika menggunakan kata kawin²³. Dalam kata kawin, yang

waktu yang panjang atau “kekal” menurut istilah Undang-Undang Perkawinan.

Mencermati atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak, dan kata nikah di pihak lain, menurut Muhammad Amin Suma ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Terutama berdasarkan pendekatan dari segi kesan perasaan (*dzaug*) yang tersurat maupun makna filosofis yang tersirat di dalam keduanya.

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya *melulu* hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih suka memilih “kumpul kebo” karena bagi pasangan seperti ini, hakikatnya adalah bersenggama.

Adapun dalam kata nikah, hubungan suami isteri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah. Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48

²² Hubungan suami istri harus berbeda dengan hubungan pada hewan yang hanya memiliki nafsu syahwati (seksual). Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks; sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah swt .

²³ Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), pernikahan digunakan istilah *Kahwin*. Kahwin ialah “perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah.”Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami). Lihat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1998), hlm 558.

Dalam bahasa Indonesia, di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau

berhubungan hanyalah suami istri. Kata-kata *al-dhammu* dan *al-jima'* yang menjadi sebutan lain bagi kata nikah mengisyaratkan hal itu.

Dari beberapa definisi nikah (perkawinan) di atas, secara umum dalam dunia Islam, perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak (*contract*). Dawod El Amani dan Doreen Hinchliffe menyebut, “Perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak perkawinan melalui penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) pihak lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksud dapat dipahami, suatu akad perkawinan adalah jelas (sah)”.²⁴

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan di atas, baik dari kalangan para pakar-pakar hukum-khususnya *fuqaha* –maupun undang-undang, selalu menyebut kata akad (*'aqdun* dalam bahasa Arab atau *Contract* dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna denganya.²⁵ Sungguhpun undang-

berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara pejantan dan betina dewasa secara acak. Perkawinan adalah: (1) pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”. Baca dalam W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 398-39, dan Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres, t.t), hlm. 344.

²⁴“*Marriage in Islamic Law is a contract, and like all other contract it is concluded by the making of an offer*” (*ijab*) *by one party and the giving of an acceptance (qabul) by the other. No particular form of words is required, as long as the intention conclude a marriage contract is clear.*”

Dawod El Amani and Doreen Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: Kluwer Law International, 1995), hlm. 5.

²⁵ Undang-Undang Perkawinan Jordan, misalnya, merumuskan perkawinan (*marriage*) sebagai berikut: “*Marriage is a contract between a man end woman who is lawful to him with the object of the forming of a family and producing children*” .Undang-Undang Yordania, Law No. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang perkawinan Negara-negara Islam yang lain tidak secara eksplisit melibatkan asas keagamaan (keislaman) dalam undang-undang perkawinannya, tidak berarti dunia Islam yang lain mengabaikan peran agama Islam khususnya bidang perkawinan dan kehidupan lainnya. Sebab dalam kenyataannya, hukum perkawinan Islam yang berlaku (yang diberlakukan) di dunia Islam manapun.²⁶

2 Tujuan dan Hukum Nikah

a. Tujuan Nikah

Menurut Rahmat Rosyadi, istilah “tujuan” berpadanan dengan kata *maqâshid* yang menunjukkan kepada jalan lurus.²⁷ Kata ini merupakan kata jadian dari kata *qashada* yang tersebar dalam *al-Qurân* yang memberi arti pokok. Dalam Surat al-Nahl: 9²⁸ ada kata *qashdu al-sabîl* yang ditafsirkan kepada “jalan yang lurus”. Berdasarkan istilah tersebut di atas, tujuan pernikahan (*maqâshid ‘an al-nikâh*)

of 1976: *The Law of Personal Status*, article 2 “pernikahan adalah kontrak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah menurut hukum untuk membentuk suatu keluarga dan menghasilkan anak (keturunan). Baca dalam Undang-Undang Yordania, Law No. 60 of 1976: *The Law of Personal Status*, article 2

Demikian pula dengan Undang-Undang Perkawinan Irak yang merumuskan perkawinan demikian: “*Marriage is a contract between a man and a woman who is lawfully permitted to him, the object of which is to establish a bond a shared life and for procreation*”.

Kedua definisi dalam Undang-Undang Perkawinan Jordan dan Irak di atas, jelas-jelas menyebutkan kata *Contract* (perikatan/perjanjian) atau ‘*aqdun* dalam bahasa Alquran (Arab). Demikian pula dengan Undang-Undang Negara lainnya seperti Undang-Undang Kuwait, Maroko, dan Siria. Undang-Undang dari ketiga Negara ini juga secara eksplisit menyebutkan kata ‘*aqdun* (contract.)

²⁶ Baca dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga* ... hlm. 53

²⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 45

²⁸

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [١٦:٩]

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an Bukhara Tajwid & Terjemah*, (Jakarta : Sy9ma, 2010), hlm. 268

dalam Islam mengacu pada tujuan-tujuan umum yaitu memperoleh kemaslahatan.

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah swt. telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Tujuan Islam mensyariatkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri di antara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami dan istri, sehingga terbina ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat. Selain itu memenuhi kebutuhan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan, karenanya hampir semua pakar mengedepankan seksual ini dalam definisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing.

Al-Qurân menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai yang digariskan oleh Allah swt. dan yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah hidup secara berpasang-pasangan seorang laki-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki dan seorang perempuan, dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.²⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³⁰

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw.:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ³¹

Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, ayah dan ibundanyayang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. "
(H. R.Bukhari).

Dalam perspektif pendidikan Islam, fitrah manusia dimaknai dengan sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup (upaya mempertahankan dan melestarikan

²⁹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 103 a

³⁰ HAS Al-Hamdani, *Risah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 133

³¹ Muhammad ibn Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u Baina al-Shohihain al-Bukhârî wa Muslim*, ditahkik oleh 'Ali Husain al- babaw(Beirut : Dâr al-Nasyr, 1423 H), Juz. 3, hlm. 54. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u Wa al-Marjan*, Juz. 1, hlm. 825

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya), kekuatan rasional (akal), dan kekuatan spiritual (agama).

Ketiga kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Konsep fitrah menurut Islam juga berbeda dengan teori konvergensi³² oleh *william stern* (w.

³² Jamaludin Darwis mendefinisikan teori konvergensi secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Inggris dari kata *verge* yang artinya menyatu, mendapat awalan *con* yang artinya menyertai, dan mendapat akhiran *ance* sebagai pembentuk kata benda. Sedangkan secara istilah konvergensi berarti perpaduan antara entitas luar dan dalam, yaitu antara lingkungan sosial dan hereditas. kamus Inggris *Convergence* yang artinya pertemuan pada satu titik. dalam kamus psikologi yang dimaksud aliran konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku.

Sumadi Surya Brata menegaskan teori konvergensi yaitu bahwa dalam perkembangan individu itu baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting, bakat kemungkinan telah ada pada masing-masing individu; akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang.

Jadi Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku baik tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral (potensi bawaan) maupun faktor eksternal (lingkungan).

Aliran konvergensi lahir dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang dua faktor yang mempengaruhi perkembangan akhlak anak, yaitu faktor hereditas (keturunan) dan Milliu (lingkungan). Para ahli didik, ahli biologi, ahli psikologi dan lain-lainya, memikirkan dan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: perkembangan manusia itu bergantung kepada pembawaan ataukah lingkungan? Atau dengan kata lain dalam perkembangan anak muda hingga menjadi dewasa dibawa dari keturunan (pembawaan) ataukah pengaruh-pengaruh lingkungan? maka dari dua faktor itu timbul tiga aliran, yaitu:

Aliran Nativisme

Teori nativisme berasal dari kata *natis* yang berarti lahir, *natives*; kelahiran, pembaharuan. Teori nativisme menyatakan bahwa perkembangan semata-mata ditentukan oleh pembawaan yaitu pembawaan yang dibawa sejak lahir.

Berdasarkan hal tersebut nativisme tidak dapat diterima secara penuh, artinya teori ini tidak mampu menerangkan kejadian-kejadian didalam masyarakat, atau dengan kata lain teori nativisme berat sebelah.

Aliran Naturalisme

Naturalisme berasal dari bahasa latin dari kata *nature* artinya, alam, tabiat. Dan pembawaan, aliran ini juga dinamakan negativisme ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Menurut Ngalim Purwanto aliran Naturalisme adalah pada hakekatnya semua anak (manusia) sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh pendidikan itu baik, akan menjadi baiklah ia; akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya.

Pelopop aliran Naturalisme adalah J. J Rousseu seorang naturalis filosof bangsa Perancis yang hidup dalam tahun 1712-1778. Dia berpendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik Rousseau mengajukan pendidikan alam artinya, anak hendaklah dibiarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1938 M).³³ Dalam pandangan Islam perkembangan potensi manusia itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan semata dan tidak bisa ditentukan melalui pendekatan kuantitas sejauh mana peranan keduanya (potensi dan

tumbuh berkembang sendiri menurut alamnya; manusia atau masyarakat jangan banyak menyampurinya.

Aliran Empirisme

Teori empirisme berasal dari kata empiris, berarti pengalaman. Jadi teori ini mempunyai maksud bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung kepada faktor lingkungan saja. Aliran empirisme ini mengasumsikan bahwa anak yang baru lahir itu seperti kertas yang masih bersih (tabularasa). Sehingga perkembangan anak itu, baik buruknya ditentukan oleh faktor lingkungan saja, sedangkan faktor bawaan tidak berpengaruh. Jadi lingkungan di mana anak itu hidup adalah faktor terpenting yang membentuk kepribadian anak tersebut.

Aliran empirisme ini ternyata tidak tahan uji, dalam arti aliran ini tidak dapat menjawab masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, hal ini di contohkan dalam kehidupan sehari-hari perlakuan dalam proses pendidikan yang kita ajarkan kepada murid satu kelas, dengan lingkungan yang sama tetapi tingkat pemahaman anak terhadap materi yang kita ajarkan itu berbeda-beda.

Aliran konvergensi adalah aliran yang menggabungkan dua aliran di atas (Nativisme dan Empirisme), Konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku. Menurut aliran ini hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan, sebaliknya rangsangan dari lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku anak yang idial tanpa di pengaruhi oleh faktor hereditas.

Tokoh teori ini adalah William Lois Stern (1938), ada beberapa percobaan untuk memperkuat teori ini yaitu :

Dua anak kembar identik, yang mempunyai bakat yang persis sama, didikan dan dibesarkan dalam keluarga dengan lingkungan yang berbeda, akan mengembangkan sifat-sifat yang juga berbeda.

Seorang dengan taraf kecerdasan yang tergolong terbelakang, diberi didikan yang sistematis untuk menguasai pelajaran-pelajaran sekolah menengah. Sampai akhir percobaan itu, orang tersebut tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Terbukti dari kedua percobaan di atas bahwa lingkungan ada pengaruhnya terhadap perkembangan seseorang, tetapi dalam batas pembawaan yang ada. Pada intinya bahwa lingkungan dan pembawaan sama-sama berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Hal tersebut dibenarkan oleh Abdul Mujib bahwa penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral antara faktor internal (potensi bawaan) maupun faktor eksternal (lingkungan pendidikan).

Baca dalam John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992). J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Penerj, Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). Sumadi Surya Brata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 34 Siti Partini Suardiman, SU. *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: 1990). Hlm. 67

³³ Teori konvergensi ini dipelopori oleh William Lois Stern (1871-1936), Stern adalah salah satu pelopor dari psikologi modern dan perannya terletak dalam kemampuannya untuk menyatukan teori-teori yang saling bertentangan untuk menerangkan tingkah laku, yaitu antara aliran nativisme dan aliran empirisme. Beliau lahir di Jerman di kota Berlin pada tanggal 29 April 1871. tetapi meninggal di Amerika Serikat yaitu di Durham, North California pada tanggal 27 Maret 1938. Dikutip dari www.referensimakalah.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan) dalam membentuk kepribadian manusia.³⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.³⁵ Tidaklah berlebihan kemudian *al-Qurân*³⁶ menyebut pernikahan dengan *mîtsâqan ghalizhan*³⁷, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Itulah sebabnya dalam akad nikah harus ada saksi-minimal dua orang disamping wali nikah. Tentang status hukumnya sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama

³⁴ Lihat Nur Ahid, *Pendidikan Agama dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 55-58

³⁵ Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 124.

Banyak peneliti belakangan yang mencoba merinci lebih lanjut tujuan perkawinan. Khairudin Nasution menyebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain: (1) memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah wa rahmah (ketenangan, cinta, dan kasih sayang); (2) reproduksi (regenerasi); (3) pemenuhan kebutuhan biologis; (4) menjaga kehormatan; dan (5) ibadah.

Selain itu, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika dalam Dadang Muttaqin berpendapat: "Dalam perkawinan ikatan lahir dan batin dimaksud, adalah perkawinan tidak cukup dengan hanya ikatan lahir saja atau dikatakan batin saja. Tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga akan tercipta ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang amat kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal." Rujuk Khoirudin Nasution dalam Nofri Yendara, *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*, (Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.1 2013), hlm. 58; Dadang Mutaqien, *Cakap Hukum Dalam Bidang Hukum dan Perjanjian*, (Yogyakarta : Insania Citra Press, 2006), Cet. I, hlm. 19

³⁶ Baca QS Al- Nisa (4): 21.

³⁷ *Mîtsâqan Ghalizhan* dijelaskan dalam beberapa karya terdahulu, diantaranya: pertama, ia bermakna janji yang dikokohkan dengan sekokoh-kokohnya, lihat. Isma'il Abu al-Fida", *Rûh al-Bayân* (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), juz II, hlm. 316.

Definisi lain, ia adalah sebuah janji kokoh yang menjadi pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling kuat dan paling besar dampak hukumnya, lihat Ahmad bin Musthafa al-Marâghi, *Tafsir al-Marâghi* (Mesir: Musthofa al-Babi, 1946), Juz IV, hlm. 211.

(*fuqaha*).³⁸

Secara sosiologis, perkawinan melahirkan hubungan-hubungan manusia secara kompleks dan luas, yang merupakan materi bagi sebagian pembentuk moral, kewajiban melahirkan keturunan, mencintai, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan memahami merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dalam konteks ini, menurut Isma'il Raji al-Faruqi, pemenuhan terhadap tujuan Tuhan terhadap manusia mensyaratkan bahwa manusia harus menikah di antara sesamanya dan melahirkan keturunan serta hidup bersama. Dengan demikian, perkawinan menyediakan ajang hubungan-hubungan yang di dalamnya terdapat unsur moral dari kehendak *Ilahi* yang dapat dipenuhi oleh keputusan dan tindakan manusia.³⁹

Hubungan inilah yang diingatkan Allah swt. dalam surat al-nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ

³⁸ Imam Malik (w. 179 H) mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: Wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *Sighat* akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: *Sighat* (ijab dan qabul), calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan

Baca lebih lanjut dalam Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahhâb*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), juz 2, hlm. 72-73, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, Juz. 7 (Mesir : Dar al-Fikr, tt), hlm. 36

³⁹ Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, alih bahasa Rahman Astuti, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1995), cet. Ke-2, hlm. 138-139

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [٤:١٩]

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁰

Kata *al-ma`ruf* dalam ayat di atas memiliki makna:

كُلُّ خَصْلَةٍ حَسَنَةٍ تَرْضَاهَا الْعُقُولُ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا النَّفُوسُ⁴¹

“Setiap kebiasaan baik yang dapat diterima oleh akal dan dapat menentramkan jiwa.”

Prinsip *mu`asyarah bi al-ma`ruf* dalam ayat di atas, menurut al-Qurthubi ialah kewajiban seorang suami untuk menggauli isterinya dengan sebaik-baik pergaulan (*bi husni shuhbah al-nisa`*) karena hal itu memunculkan ketenangan jiwa (*ahda` li an-nafs*) dan kebahagiaan hidup (*ahna` li al-`aisy*).⁴² Hal ini merupakan cerminan akhlak yang mulia. Sebab suami dan isteri merupakan cerminan kehidupan dalam masyarakat yang terkecil. Oleh karena itu antara suami dan isteri hendaklah saling menghormati dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada suatu permasalahan yang tidak disenangi di antara keduanya, bersabar dan bermusyawarahlah untuk menyelesaikan

⁴⁰ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an...*, hlm. 159

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi (w. 671 H), *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*, juz ke-9 QS. Al-A`raf (7) ayat 199, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1427 H/2006 M), cet. 1, hlm. 421

⁴² *Ibid*, juz ke-6 QS. Al-Nisa` (4) ayat 19, hlm. 159

permasalahan tersebut.

Sebagai manusia yang beragama seseorang harus mengetahui alasan kenapa ia harus menikah jika telah memenuhi unsur-unsur syar'i. Unsur-unsur tersebut termuat dalam kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa falsafatuhu* antara lain: *Pertama*, kebutuhan spiritual atau ajaran agama (*religi*) Islam.⁴³ Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Mereka yang berkeinginan menikah sementara belum memiliki kemampuan, syariah Islam menganjurkan untuk berpuasa, dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela dan sangat keji yaitu perzinahan.

Pernikahan merupakan ketetapan *ilahi* atas segala mahluk. Pernikahan atau berpasangan merupakan *sunnatullah* akibat adanya daya tarik yang dianugerahkan oleh Allah swt. kepada makhluknya sebagaimana tersebut dalam surah Al Imran (3) 14 yang artinya "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)"

Ayat ini menguraikan bahwa dijadikan indah dan tidak dijelaskan siapa yang menjadikannya menjadi indah, namun yang jelas bahwa yang diperindah adalah kecintaan kepada aneka syahwat. Syahwat adalah kecenderungan hati yang sulit

⁴³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî' wa falsafatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), Juz I, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi dan material. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dijadikan indah adalah kecintaan, bukan hal-hal lain. Boleh jadi ada diantara hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut bukan merupakan dorongan hati yang sulit terbendung untuk memilikinya.⁴⁴ Jika telah dicintai oleh seseorang, keinginan tersebut menjadi sulit terbendung. Begitulah halnya dengan kecintaan manusia kepada seseorang (lawan jenis).

Kedua, kebutuhan material dan fisiologis/biologis yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan penyaluran seksual secara sah untuk mendapatkan keturunan (*nasab*).⁴⁵ *Ketiga*, kebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pegakuan status sosial dari masyarakat untuk menghindarkan fitnah. Menurut al-Jurjawi urusan dalam kehidupan ini tidak akan berjalan baik dan lurus kecuali di bawah bendera agama dan akhlak. Perkara umat ini tidak akan maslahat kecuali dengan pengamalan agama dan komitmen terhadapnya.⁴⁶ Dasar hukum alasan ini (Q.S. 51- adz Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [٥١:٤٩]

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa makhluk itu berpasang-pasangan. Bumi dan

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* Vol .2,cet.I,(Jakarta : Lentera hati, 2000), hlm.24

⁴⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri'* ..., Juz II,hlm. 6

⁴⁶ Baca dalam Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Daar al-Fikr, 2009), juz. I, hlm. 139

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 522



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langit, malam dan siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, mati dan hidup, celaka dan bahagia, serta surga dan neraka, hingga semua makhluk hidup dan tetumbuhan pun demikian. Ini agar diketahui dengan yakin bahwa Allah swt. yang menciptakan semua itu adalah Esa, tiada sekutu bagi-Nya.

Selanjutnya, dalam (Q.S. 24-An Nur : 32),

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah swt. Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁸

Hamka (w. 1401 H/ 1981 M) menyebut bahwa apabila direnungkan ayat ini jelaslah bahwa mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan “rumah tangga” orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan dari jamaah Islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu.

Zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup. Kalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka lebar.⁴⁹ Al-Jurjawi menyebut anjuran

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 354

⁴⁹ Dalam ayat tersebut lanjut Hamka : *wa ankihû*, hendaklah kawinkan hai orang banyak. Terbayanglah di sini bahwa masyarakat Islam mesti ada dan mesti dibentuk. Supaya ada yang bertanggungjawab memikul tugas yang diberikan Tuhan itu. Amat berbahaya membiarkan laki-laki muda tak beristeri, seorang gadis tak bersuami. Penjagaan kampung halaman dengan agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumumkan perkawinan agar terhindar dari perzinaan menjadi bagian dari hikmah nikah. Selain itu yang dicari pada hakikatnya dalam hidup ini keamanan jiwa. Hidup kesepian tidak mendatangkan keamanan jiwa. Rumah tangga tentram adalah inspirasi untuk berusaha dan membuka pintu rezeki.⁵⁰

Demikian juga dalam surat Ar Ruum : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵¹

Surat al-Ruum ayat 21 ini menjelaskan kejadian manusia kemudian tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Manusia tersebar melalui pernikahan.⁵² Dengan menikah ketentraman akan terwujud dan kelangsungan hidup manusia akan terus ada tanpa harus mengalami kekurangan spesies atau kepunahan.

Imam Ibnu Katsir (w. 1372 H) menjelaskan makna kalimat وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ (لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) adalah Allah swt. menciptakan perempuan bagi laki-laki dari jenis

yang kuat dan adat yang kokoh mungkin dapat membendung jangan sampai terjadi pelanggaran susila. Tetapi penyelidikan-penyelidikan Ilmu Jiwa di zaman modern menunjukkan bahwa banyak penyakit jiwa tersebut tidak lepasnya nafsu kelamin. Bertambah modern pergaulan, bertambah banyak hal-hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Bacaan-bacaan cabul, film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini. Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XVII, hlm. 188

⁵⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'* ..., juz. II, hlm. 4-5

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ... , hlm. 406

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 11, Cet., h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama untuk menjadi istri.⁵³ Berdasarkan ayat di atas bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk menumbuhkan rasa *sakinah* (ketentraman lahir dan batin) dan mewujudkan rasa kasih serta sayang dalam suatu keluarga. Oleh karena itu Allah swt. menjadikan isteri sebagai pasangan hidup bagi seorang laki-laki tersebut dari jenisnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan prinsip dalam membangun rumah tangga.

Al-Jurjawi (w. 1380 H/1961 M) berkesimpulan keadaan hidup manusia tidak mungkin berjalan normal kecuali keadaan rumah tangganya baik. Hidupnya tidak nyaman kecuali tempat tinggalnya diatur dengan baik. Pengaturan rumah tangga tidak terwujud tanpa kehadiran wanita yang dianugerahi Allah swt. kemampuan mengatur rumah tangga.⁵⁴

Ada tiga kata kunci disampaikan Allah swt. Qs. Al-Rum ayat 21 tersebut, dikaitkan dengan kehidupan perkawinan atau berumah tangga ideal menurut Islam, yaitu *sakinah (al-sakinah)*, *mawadah (al-mawaddah)*, dan *rahmat (al-rahmah)*. Ulama tafsir menyatakan *al-sakinah* adalah suasana damai melingkupi rumah tangga bersangkutan; masing-masing menjalankan perintah Allah swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Suasana *al-sakinah* akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab semakin tinggi. Mufasir mengatakan *al-sakinah* dan *al-mawadah* muncul *al-rahmah*, yaitu keturunan penuh berkat dari

⁵³ Imaduddin Abi Al Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an al Azhim*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, tt), Jilid I.

⁵⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'...*, juz. II, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt., sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁵⁵ M. Quraish Shihab (lahir. 1944 M) menyebut *sakinah* terambil dari kata *sakana* berarti diam/tenangnya sesuatu. Pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang disembelih tenang, tidak bergerak. *Sakinah*, karena perkawinan, adalah ketenangan dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁵⁶

Abu al-Hasan al-Mawardy (w. 450 H), mengemukakan mengenai makna *mawaddah* yang terkandung dalam QS al-Ruum ayat 21 terdapat empat pendapat:

a) *Mawaddah* (rasa kasih) berarti *al-Mahabbah* (kecintaan) sedangkan *Rahmah* (rasa sayang) adalah *al-Syafaqah* (rasa kasihan). b) *Mawaddah* diartikan *al-Jimâ'* (hubungan badan) dan *Rahmah* adalah *al-Walad* (anak); c) *Mawaddah* diartikan mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Rahmah* adalah welas asih terhadap anak kecil (yang lebih muda). d) *Mawaddah* diartikan dengan keduanya saling berkasih sayang di antara pasangan suami-isteri.⁵⁷

Dan juga dalam surat Asy Syura, 42 : 23,

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
شَكُورٌ [٤٢:٢٣]

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari al-Qurthubi, *al – Jami'u li Ahkam al-Quran*, Juz XIV (Kairo : Dar al Katib al-Arabi, 1967), hlm. 16-17

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta, Mizan; 1996). hlm. 255

⁵⁷ Abu al Hasan al- Mawardy, *al-Nukat Wa al-'Uyûn*, Juz 3, (Beirut: Darl al Kitab Ilmiyah, 2007), hlm. 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah swt. menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.⁵⁸

Karunia dan kebaikan dalam pernikahan berdasarkan ayat ini kata al-Jurjawi sangat banyak. Menjaga diri dan kehormatan, mencegah memandang dengan syahwat, memelihara keturunan dan generasi, serta kebaikan menjadi lebih banyak.⁵⁹

Serta *keempat*, kebutuhan psikologis yaitu untuk mendapatkan ketenangan batin, kekuatan cinta, perasaan kasih sayang, ketentraman, kenyamanan, kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, kebersamaan dan komunikasi baik, saling berbagi dan memahami dalam suka dan duka.⁶⁰ Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita dalam susah dan senang. Pasangan suami-istri yang saling mengasihi tidak hanya merasakan kebersamaan pada saat gembira, tetapi juga ketika berada dalam kesulitan, kesedihan, dan kesakitan. Pasangan yang baik adalah pendamping yang setia, yang bersedia menjadi tempat bersandar ketika duka dan menjadi tempat berteduh ketika hujan dan badai.

Menurut al-Jurjawi perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan pemenuhan kebutuhan afeksional yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sejenisnya. Perkawinan yang dilandasi dengan ikatan fisik tidak

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an...*, hlm. 486

⁵⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 4

⁶⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjamin kebahagiaan.⁶¹

⁶¹ Lihat kembali *ibid*, hlm. 5-6

Dalam tinjauan psikologi, Faradila Paputungan mengklasifikasikan alasan pernikahan menjadi lima jenis motif, yaitu cinta (*love*), kecocokan (*conformity*), legitimasi untuk memenuhi kebutuhan seksual, memperoleh legitimasi status anak, dan merasa siap secara mental untuk menikah. Berikut ini uraian kelima motif sebuah pernikahan menurut Turner dan Helms yang dikutip oleh Faradila Paputungan.

- Motif cinta**
Cinta dan komitmen sering kali dijadikan dasar utama bagi pasangan untuk memasuki jenjang pernikahan. Untuk mempertahankan komitmen, tidak ada cara lain selain menikah. Apalagi bila hubungan asmara tersebut telah terjalin bertahun-tahun sehingga pernikahan merupakan cara terbaik agar hubungan cinta tersebut tidak memudar.
- Motif kecocokan**
Cinta dapat tumbuh karena adanya kecocokan atau kesamaan di antara pasangan. Banyak pasangan yang berani melakukan sebuah pernikahan karena adanya kecocokan minat antara keduanya. Misalnya, memiliki hobi, pekerjaan atau karir, suku atau agama yang sama. Dengan kesamaan tersebut, mereka akan dengan mudah menyesuaikan diri dalam kehidupan berkeluarga.
- Motif untuk memperoleh legitimasi (pengakuan sah secara hukum) terhadap pemenuhan kebutuhan biologis.**
Dengan diraihnya status pernikahan yang sah, baik dari segi agama maupun hukum negara, individu memperoleh pengesahan dalam hubungan seksual dengan pasangan hidupnya. Mereka tidak dianggap melanggar hukum dan norma-norma sosial jika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Justru hukum sosial telah melindungi dari perbuatan asusila. Kebalikannya dengan mereka yang melakukan hubungan seksual tapi belum menikah, perbuatan tersebut dianggap tidak etis dan asusila. Karena perbuatan seksual yang dilakukan pasangan yang belum menikah adalah hal yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan merupakan cara terbaik bagi individu yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual dengan pasangan hidupnya tanpa melanggar norma-norma.
- Untuk memperoleh legitimasi status anak**
Anak-anak yang lahir dari pasangan yang memiliki ikatan resmi sesuai hukum, tentunya akan memperoleh pengakuan yang sah oleh ajaran agama ataupun hukum Negara. Mereka berhak mendapatkan pemeliharaan dan tanggung jawab yang layak dari orang tuanya, sampai mereka dewasa dan mandiri. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang terlahir diluar pernikahan mereka memperoleh penilaian yang negatif oleh masyarakat, misalnya dianggap sebagai anak haram (*illegal children*).
- Merasa siap secara mental**
Kesiapan mental untuk menikah memiliki pengertian sebagai kondisi psikologis dan emosional untuk siap menanggung setiap resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan. Misalnya masalah ekonomi, masalah pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Kesiapan mental seseorang erat kaitannya dengan usia, pendidikan, dan karir. Umumnya mereka yang siap mental untuk menikah, memiliki karakteristik seperti usia 20 tahun keatas untuk wanita dan 25 tahun keatas untuk pria, telah menyelesaikan pendidikan tertentu misalnya SLTA, Akademi atau Universitas, memiliki status pekerjaan yang jelas atau mapan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, memungkinkan seseorang untuk merasa siap menikah. Sebaliknya, tidak terpenuhinya kriteria tersebut maka akan memungkinkan seseorang merasa kurang siap untuk menikah.

Terkait dengan salah satu tujuan perkawinan oleh para Ulama yaitu mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan keharmonisan, Faradilla Paputungan lebih lanjut mengemukakan beberapa faktor terpenting dalam sebuah pernikahan, antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sementara itu Allah swt. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt. telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁶²

Pernikahan juga memiliki tujuan dan hikmah penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting menurut al-Jurjawi

1) Keintiman

Keintiman antara pasangan di dalam pernikahan mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Hal-hal yang terkandung dalam keintiman adalah saling berbagi baik dalam minat, aktivitas, pemikiran, perasaan, nilai serta suka dan duka. Keintiman akan tercipta melalui keterlibatan pasangan satu sama lain baik dalam situasi yang menyenangkan maupun menyedihkan. Selain itu, keintiman dapat ditingkatkan melalui kebersamaan, saling ketergantungan atau interdependensi, dukungan dan perhatian. Meskipun pasangan memiliki keintiman yang sangat tinggi, bukan berarti pasangan selalu melakukan berbagai hal bersama. Suami atau istri juga berhak melakukan aktivitas dan minat yang berbeda dengan pasangannya.

2) Komitmen

Salah satu karakteristik pernikahan yang memuaskan adalah komitmen yang tidak hanya ditujukan terhadap pernikahan sebagai sebuah intuisi, tetapi juga terhadap pasangannya. Beberapa pasangan berkomitmen terhadap perkembangan hubungan pernikahannya, antara lain kematangan hubungan, penyesuaian diri dengan pasangan, perkembangan pasangan, serta terhadap pengalaman dan situasi baru yang dialami pasangan.

3) Komunikasi

Kemampuan berkomunikasi yang baik mencakup berbagi pikiran dan perasaan, mendiskusikan masalah bersama-sama, dan mendengarkan sudut pandang satu sama lain. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara konstruktif, mereka dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik dan dapat menyesuaikan kesulitan yang dialaminya.

4) Kongruensi

Untuk dapat mencapai pernikahan yang memuaskan, pasangan harus memiliki kongruensi atau kesesuaian dalam mempersepsi kekuatan dan kelemahan dari hubungan pernikahannya. Pasangan yang mempersepsikan hubungan pernikahannya kuat, cenderung merasa lebih nyaman dengan pernikahannya.

5) Keyakinan Beragama

Sebagian besar pasangan meyakini bahwa keyakinan beragama merupakan komponen penting dalam pernikahan. Pasangan yang dapat berbagi dalam nilai-nilai agama yang dianutnya dan beribadah secara bersama-sama dapat menciptakan ikatan kuat dan nyaman di antara mereka serta berpengaruh positif bagi kepuasan pernikahan pasangan memperoleh dukungan sosial, emosional, dan spiritual melalui agama yang dianutnya. Faradila Paputungan, 2010, *Kepuasan Pernikahan Suami Yang Memiliki Istri Berkarir*, (Jurnal : Universitas Brawijaya Malang, 2010), hlm. 4-6

⁶² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'* ..., juz. I, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut.

- 1) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah swt. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁶³
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.⁶⁴ Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat

⁶³ Rujuk kembali Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 4. Baca juga dalam Muhammad Anis 'Ubadah, *Nizhâm Al-Usrah fi al-Syariah Al-Islâmiyah*, (Mesir : *Kutub dirâsiyah*, 1984). hlm. 18.

Nabi menganjurkan nikah bagi orang yang mengharap keturunan, seperti periwayatan Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata: "Ya Rasulullah! Aku memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan. Apakah aku nikahi?" Nabi melarangnya. Laki-laki itu datang lagi yang kedua, beliau bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi yang ketiga, beliau bersabda: Kawinilah wanita yang Penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat.

Teks haditsnya berbunyi :

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ »

رواه أبو داود (2050) ، والنسائي (6 / 65 - 66) ، وابن حبان (1229)

⁶⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.⁶⁵

- 3) Nikah sebagai perisai diri manusia.⁶⁶ Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- 4) Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini. Baca Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 40. Lihat juga kembali QS. Ar-Rûm (30): 21

⁶⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'* ..., juz. II, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁶⁷

Tujuan nikah dalam syariat Islam sebagai salah satu indikasi ketinggian

⁶⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 6; Lihat juga Muhammad Ra'fat Utsman, *Al-Huqūq al-Zawjiyah al-Fiqh Al-Islāmi*, hlm. 14, Al-Ghazali, *Ihyā Ulūm al-Dīn*, juz 2, hlm. 37-41.

Sejalan dengan itu Ahmad Sharbasy (w.1980 M) menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan, antara lain; menata pemenuhan kebutuhan seksual, mewujudkan kerjasama, menyempurnakan saling tolong dalam kehidupan, membentuk masyarakat mikro "keluarga", mendatangkan ketenangan dan kenyamanan, serta mendapatkan anak/keturunan.

Lebih Lanjut Menurut Abd. Somad tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Artinya, keluarga yang tenang, di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Baca kembali Ahmad Syarbasy, *Al-Din wa Tanzhim al-Usrah*, (Kairo : al-'alaqat al-'ammah bi al-Syun al-ijtima'iyah, 1966), hlm. 15; Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), him, 276, dan Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiikih Islām*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.

Dari itu semua dapat dipahami bahwa *maqāshid al-zawāj* dalam Islam meliputi beberapa Aspek, antara lain :

- Aspek manusia dan kemanusiaan. Pemikahan merupakan upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi, hidup dengan cara yang manusiawi (humanis).
- Aspek agama/moral. Pernikahan merupakan jalan hidup yang sesuai dengan ajaran Allah swt, perbuatan yang disukai Rasulullah (sunnahnya), serta dapat menghindari perzinahan dan kefasikan.
- Aspek personal (kedirian). Pernikahan dapat juga dijadikan sebagai upaya atau proses pengembangan potensi diri. Dengan menikah, seseorang dapat hidup kebahagiaan, memenuhi kebutuhan seksual, memelihara kehormatan, serta dapat menyalurkan naluri keibuan dan kebapakan.
- Aspek keluarga. Pemikahan dapat menjaga kejelasan dan keberlangsungan keturunan/nasab, menata hidup berkeluarga, menerapkan potensi kepemimpinan, serta memperkokoh ikatan dengan keluarga besar.
- Aspek sosial. Keluarga merupakan subsistem masyarakat. Dengan menikah, dapat menjaga keteraturan sistem sosial (masyarakat, suku dan bangsa).
- Aspek ekonomi. Pernikahan dapat memotivasi seseorang mencari rizki yang halal, dan menata dan kerjasama dalam ekonomi keluarga.
- Aspek pendidikan. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Dengan menikah, seseorang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengayomi serta membimbing isteri dan anak-anaknya. Pernikaha juga dapat menjaga keberlangsungan pendidikan anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derajat manusia yang sesuai dengan karakter manusia dan sejalan dengan kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah Allah swt. yang seharusnya disambung, serta perusakan bumi yang sejalan dengan insting kebinatangan.⁶⁸

b. Hukum nikah

Abd al-Rahman al-Ahdal (lahir 1377 H) menjelaskan bahwa hukum asal menikah adalah sunat, kecuali dikhawatirkan dirinya jatuh ke lembah kemaksiatan, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa hukumnya menjadi wajib, berdosa meninggalkan kewajiban nikah bagi orang yang sanggup untuk menikah.⁶⁹ Husain Muhammad al-Mahalli (w. 1170 H) menjelaskan, para ulama menyatakan bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah, khawatir akan melakukan zina, sementara ia mampu menunaikan haknya, menikah dalam

⁶⁸ M. Musthafa Syahhatah, *Al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Madinah : Dar al-Ta'lif, 1396 H), hlm. 19 M. Muhyi Ad-Din Abd Al-Hamid, *Al-Ahwâl Asy-Syakhshiyah*, hlm. 7.

⁶⁹ Abd al-Rahman Ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *al-Inkihat al-Fasidah : Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah*, (Riyadh : Maktabah Dauliyah, 1983) hlm. 39. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, (Riyadh: Dar Aam al-Kutub, 1997), hlm. 341.

Amir Syarifuddin menjelaskan, "dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Alah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.

Amir Syarifuddin juga menerangkan, perkawinan disuruh Allah dan Rasul-Nya dalam banyak nash. Dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Rasul. Namun ia tidak menunjukkan wajib, sebab perintah untuk kawin disertai dengan persyaratan, seperti mampu memberi nafkah lahir batin.

Perintah Allah dan Rasul tersebut tidak dapat dikatakan *qath'i*, sebab tidak secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Sementara pernyataan Rasul bahwa pemikahan adalah sunnahku dan orang yang membenci sunnahku tidaklah termasuk ummatku, tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar.....* hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan seperti itu lebih utama dari haji, jihad, shalat dan puasa.⁷⁰

Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan bahwa hukum asal menikah adalah mustahab mutlak, dan menikah lebih utama dari menyibukkan diri dengan ibadah.⁷¹ Adapun menurut Imam Malik (w. 179 H) Imam Syafi'i (w. 204 H) hukum asal menikah adalah *mustahab* (sunat)⁷² bagi orang yang

⁷⁰Husain Muhammad al-Mahalli, *Al-lfshah 'an 'Aqd al-Nikah 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Syuiah: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995), hlm. 24-26.

Al-Kasani menuturkan, tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa menikah itu hukumnya wajib pada waktu emergency. Siapa saja yang tidak dapat menahan nafsu seksnya, padahal ia mampu secara finansial (maskawin dan nafkah), ia berdosa jika tidak menikah.
لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى إن من تآقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم.

Baca Perhatikan Abū Bakr ibn Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badā'i'u al-Shanā'i'i fī Tartīb al-Syarā'i'i*, Vol. II (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), hlm. 228.

⁷¹ Lihat kembali catatan kaki 58, juga Husain Muhammad al-Mahalli, *Al-lfshah*....hlm.24-26

Pendukung aliran ini mengajukan alasan-alasan untuk memperkuat pemikiran mereka, yaitu:

1. Pernikahan merupakan perintah dan anjuran Allah swt. kepada hamba-Nya, di mana dalam pernikahan tersebut terkandung pelbagai manfaat dan hikmah.

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ... (الأعراف: ١٨٩)

... dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya.

2. Adanya perintah Rasulullah saw. kepada para sahabat agar segera menikah dan larangan membujang sebab ingin konsisten beribadah.

أما والله أنا أحشاكم لله و أتقاكم له، لكنني أصوم و أفطر، و أصلي و أرقد، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
(رواه البخاري)

Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berberbuka, aku melakukan shalat dan tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa tidak suka mengikuti sunnahku, berarti ia bukan dari golonganku. (H. R. al-Bukhārī)

3. Menikah sebagai wujud aktualisasi ketaqwaan sebagaimana Nabi saw. dan sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Andaikata menyibukkan diri dengan ibadah sunnah lebih utama, niscaya Rasulullah saw dan para sahabat akan melakukannya. Sebagai publik figur, tentunya Rasul saw mengedepankan amalan yang lebih berkualitas.
4. Dalam pernikahan tersimpul faidah yang amat besar, seperti memelihara agama, melanjutkan keturunan, menjaga keberadaan ras manusia, memperbanyak generasi umat, menumbuhkan tanggungjawab, mewujudkan kebanggaan Nabi saw. dan lainnya.

Baca 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Vol. IX (Al-Riyādī: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), hlm. 342-343.

⁷² Muḥammad Amin ibn 'Umar (Ibn 'Abidin), *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkannya dan memiliki keinginan untuk itu. Imam Ahmad (w. 241 H) mewajibkan menikah⁷³ bagi orang yang punya keinginan dan takut berzina. Al-Jurjawi tidak tegas dalam menetapkan hukum asal nikah. Ia hanya menguraikan keutamaan nikah. Menurutnya keutamaan nikah lebih kepada poros dan ruang beredarnya segala jenis kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup. Artinya pernikahan dibutuhkan seperti kebutuhan terhadap makanan, tetapi tidak lebih utama dibandingkan dari focus beribadah.⁷⁴ Wahbah Zuhaily (w. 1436 H/2015 M) cenderung berpendapat bahwa hukum asal menikah itu sunnat/*nadb*. Ada beberapa alasan untuk itu, antara lain;

- Pernikahan dibutuhkan agar seorang ayah, kakek atau pun isteri dipelihara oleh anak-anak dan suaminya baik memberi nafkah maupun pakaian. Sementara zina akan membawa bencana. Pernikahan bukan dimaksudkan hanya untuk bersenang-senang saja, melainkan untuk pelayanan (saling bantu).⁷⁵

Vol. IV (Al-Riyādī: Dar 'Ālam al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), hlm. 65. Lihat juga, Abū 'Abdillāh al-Khursyī, *Syarḥ al-Khursyīy 'alā Khalīl*, Vol. III (Mesir: Al-Mathba'ah al-Amīriyyah, 1317 H), hlm. 165. Dan baca, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughniy*, Vol. IX (Al-Riyādī: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), hlm. 341.

Mustahab atau sunat, disebut juga dengan *Mandub tathawwu'*. *Mandub* adalah "perintah *Syāri'* untuk dikerjakan mukallaf dengan perintah yang tak pasti. Dengan kata lain, sighat perintah *Syāri'* itu tidak menunjukkan pengerfian wajib, atau bersamaan dengan perintah itu ada berbagai *qarinah* yang menunjukkan tidak wajib. Baca Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul Fikih*, hlm. 184.

⁷³ Perhatikan Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsāniy al-Ḥanafīy, *Badā'i'u al-Shanā'i'i fī Tartīb al-Syarā'i'i*, Vol. II (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), hlm. 228. Perhatikan juga Aḥmad al-Dardīr, "*Al-Syarḥ al-Kabīr*" dalam Muḥammad 'Arafah al-Dusūqiy, *Ḥāsiyyah al-Dusūqiy 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Vol. II (Mesir: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th), hlm. 214. Lihat Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramliy, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Vol. VI (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), hlm. 181. Lihat juga Manshūr ibn Yūnus al-Buhūtiy, *Kasyshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Vol. (Bairūt: 'Ālam al-Kutub, 1403 H/ 1983 M), hlm. 7

⁷⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 6

⁷⁵ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Menikah adalah ibadah karena diperintahkan oleh Nabi saw. Suatu ibadah pasti berdasarkan syariat. Pernikahan merupakan ibadah yang diterima (sah) karena membawa banyak kemaslahatan, antara lain; menjaga kesucian diri dan kesinambungan keturunan.⁷⁶
- Ia juga menolak pendapat Zahiri yang menyatakan menikah itu wajib. Sebab tidak semua orang mampu untuk menikah. Kewajiban menikah hanya karena seseorang telah memenuhi ketentuan wajibnya, tidak untuk orang lain.⁷⁷

Sebagian ulama mazhab imam al-Syafi'i menyatakan bahwa hukum asal menikah adalah *mubah* atau *jaiz* (boleh) bagi seseorang dalam kondisi normal.⁷⁸ Pendapat ini didasarkan pada beberapa argument. *Pertama*, Hukum dasar pernikahan adalah boleh, sebab tidak termasuk ibadah. Ini terbukti sahnya pernikahan orang kafir, seandainya pernikahan ibadah, orang kafir terlarang

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 48-49

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 49

⁷⁸ Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 3. A-Syirazi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.ft), hLm. 198, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ai ibn Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, Jilid 2, (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 423.

Beberapa kalangan di Indonesia menyebutkan bahwa hukum asalnya adalah mubah. Artinya pemikahan itu boleh dilakukan, sekalipun banyak ayat dan hadits yang bersifat perintah dan menunjukkan keutamaan pernikahan. Lihat Amir Syarifuddin....., hlm, 43. Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku ke-4, Cet Ke-I, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 232. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm. 1330. Muhamma Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Cet Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.126-127. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.4.

Muhammad Daud Ali lebih jauh menjelaskan; "kalau perbuatan nikah itu ditautkan dengan kaidah atau hukum yang lima itu, maka kaidah asalnya adalah jaiz atau mubah atau ibahah, di Indonesia menjadi kebolehan. Tetapi karena perubahan *illat* (motif, alasan)-nya, mungkin kebolehan, (jaiz, mubah, ibahah), perkawinan dapat berubah menjadi sunnat, wajib, makruh atau haram. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*..., hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya.⁷⁹ Kedua, Memfokuskan diri beribadah utama dari menyalurkan nafsu biologis, karena Allah tidak melarang perempuan-perempuan menopause berdiam diri di rumah dan tidak menganjurkan mereka untuk menikah.⁸⁰

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ... (النور: ٦٠)

Dan wanita-wanita yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. (Q.S. *al-Nūr* [24]: 60)⁸¹

Allah swt. memuji Nabi Yahyā dengan kata *hashûran*, yaitu laki-laki yang mengendalikan gairah seks, Allah tidak menganjurkannya untuk menikah. Ini membuktikan pernikahan disunnahkan khusus bagi yang berkeinginan.⁸²

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ... (آل عمران: ٣٩)

menjadi ikutan dan mengendalikan diri (dari hawa nafsu) (Q.S. *Āl Imrān* [3]: 39)⁸³

Argument mereka juga di dasarkan Hadits Nabi saw. :

عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن

⁷⁹ Baca, Muḥammad ibn Khathīb al-Syarbīniy, *Mughniy al-Muḥtāj*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Maʿrifah, 1418 H/ 1997 M), hlm. 170.

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 358

⁸² 'Aliy ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardiy, *Al-Ḥāwiy al-Kabīr*, Vol. IX (Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1414 H/ 1994 M), hlm. 33.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عبد الرحمن بن يزيد قال: « دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »⁸⁴

‘Umar ibn Ḥafsh ibn Ghiyāṣ bercerita kepada kami, ayahandaku bercerita kepada kami, al-A‘masy bercerita kepada kami, ‘Umārah bercerita kepadaku, dari ‘Abd al-Raḥmān ibn Yazīd, ia berkata: Aku menemui ‘Abdullah, bersama dengan ‘Alqamah dan al-Aswad. ‘Abdullah berkata: Kami para pemuda, tidak memiliki apa-apa, duduk bersama Rasulullah saw: Beliau bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, menikahlah, karena ia menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, berpuasalah, karena puasa menjadi kendali baginya. (H. R. al-Bukhāriy)

Rasulullah saw. mengarahkan anjuran menikah ini kepada seluruh umatnya, khususnya para pemuda. Ia bersabda, "Wahai segenap pemuda". Kata "*Ma'syar*" yang berarti "segenap" menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang menjadi ciri masyarakat Islam. Ia tidak menggunakan kata "*Ya Ayyuha al-syabab*" misalnya, karena kata "*Ma'syar*" memiliki nuansa cinta dan kasih sayang dalam komunitas muslim. Ini merupakan bentuk kepedulian Islam terhadap persoalan para pemuda, sehingga Islam memberikan perhatian khusus bagi mereka, yaitu anjuran untuk segera menikah bagi yang mampu. "siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa". Ia menggunakan kata "*Alaihi*" berarti "hendaklah" menyatakan makna banyak. Artinya, "hendaklah ia memperbanyak berpuasa". Ia tidak menggunakan "*Fa al-yashum*" misalnya, berarti "berpuasalah", karena bermakna

⁸⁴ Lihat, Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāriy, *Shahīḥ al-Bukhāriy*, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb man lam Yastathī‘ al-Bā‘ah fāl Yashum, No. Hadis 5066 (Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), hlm. 1293.

puasa sehari atau dua hari. Kata "*Alaihi Bi al-shaum*" bermakna memperbanyak berpuasa.⁸⁵

Hadits di atas memberikan hikmah sangat penting dalam pernikahan, yaitu "karena ia lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan". Ini merupakan jaminan sangat penting bagi manusia memelihara pandangan dan kemaluannya.

Dalam hadits ini terdapat *Shighat Tafdhil* yaitu "*Aghaddu*" dan "*Ahshanu*" berarti "mampu menundukkan" dan "mampu memelihara". Ini menunjukkan tujuan pernikahan, terpeliharanya pandangan dan kemaluan. Kata tersebut memberikan pemahaman bahwa keimanan memiliki kemampuan menundukkan dan memelihara pandangan, sedangkan pernikahan memiliki kemampuan lebih besar dan kuat.⁸⁶ Berdasarkan kedua dalil ini dapat disimpulkan bahwa menikah tidaklah wajib. Hukum wajib tidak dikaitkan dengan kebolehan memilih atau kemampuan.

Mazhab Zahiri berpendapat hukum asal menikah adalah wajib. Ibnu Qudamah (w. 629 H) menjelaskan mazhab Zahiri berpendapat bahwa nikah tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang tidak menikah akan terjerumus kepada maksiat. Diwajibkan menikah karena diwajibkannya menghindari kemaksiatan, dan caranya adalah dengan menikah. Pada kasus lain tidak diwajibkan menikah. Kewajiban menikah dalam hal ini tidak dikaitkan dengan kemampuan.⁸⁷ Demikian juga dengan Abu Bakar Abd al-Aziz (w. 363 H) dari kalangan

⁸⁵ Baca Ibn Daqiq al-'ilid, *Ihkâm al-ahkâm*, juz.4, hlm. 23

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Ibnu Qudamah. *Al-Kâfi*, Juz 4, (Imbabah: Hijr, 1997), hlm. 212.

Hanabilah dan Ahmad menyatakan wajib menikah berdasarkan *nash-nash* yang ada.

Pengikut Zahiri menyatakan wajib berdasarkan perintah menikah secara lahiriah dalam *al-Qurân* dan Sunnah. Dalam sebuah riwayat diceritakan :

عن عكاف بن وداعة الهلالي ، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا عكاف ، ألك امرأة ؟ » . قال : لا ، قال : « فجارية ؟ » . قال : لا ، قال : « وأنت صحيح موسر ؟ » . قال : نعم ، قال : « فأنت إذا من إخوان الشياطين ، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم ، وإن كنت منا فإن من سنتنا النكاح ، يا ابن وداعة إن شراركم عزابكم ، وأراذل موتاكم عزابكم ، يا ابن وداعة إن المتزوجين المبرءون من الجن⁸⁸

Dalam riwayat ini Rasulullah bertanya kepada Ikaf bin Khalid; apakah kamu punya isteri?. Ia menjawab; "tidak". Lalu Rasulullah bersabda; "Menikahlah! (kalau tidak) kamu termasuk golongan setan". Pada riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah bersabda; "Jika kamu menganut kerahiban Nashrani, kamu adalah golongan mereka. Kamu termasuk golongan kami apabila menikah. Tidak ada di kalangan muhajirin dari kalangan umatku yang mati melainkan

⁸⁸ Riwayat ini berasal dari Ukaf bin Wada'ah Al-Hilali dari berbagai jalur, semuanya lemah. Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam kitab *Al-Ishabah* (4/536) setelah menyebutkan riwayat hidupnya, "Semua jalur periwayatan yang disebutkan lemah dan tidak pasti." Dikatakan pula dalam kitab *Ta'jil Al-Manfaah*, (2/20), "Jalur riwayatnya tidak sunyi dari kelemahan (*dhaif*).

Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitab *Al-'Ilal al-Mutanahiah* (2/609). "Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Mereka berkata, "Tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang shahih."

Al-Bushiri berkata dalam kitab *Ittihaful Khairah Al-Maharah*, "Semua sanad di dalamnya lemah."

Al-Albany menghukuminya sebagai hadits munkar dalam *Silsilah Ad-Da'ifah* (2511, 6053) dan jalur periwayatannya tidak jelas. Semuanya bertumpu pada Makhul Ad-Dimasyqi, perawi tsiqah penduduk Syam dalam *Tahzib At-Tahzib* (10/292), hanya saja jalur yang sampai kepadanya lemah. Atau pada syaikh yang dia ambil riwayat tersebut darinya.

memiliki isteri baik satu, dua atau tiga orang.⁸⁹

Menurut mazhab zahiri menghindari zina adalah fardhu, dan tidak ada yang dapat menghindarnya kecuali dengan menikah. Sesuatu yang tidak mungkin menyempurnakan yang fardhu kecuali dengannya, dihukumkan fardhu.⁹⁰

Pendapat Zahiri di atas dibantah oleh Sarkhasi (w. 490 H)⁹¹ dengan alasan bahwa Nabi tidak menyebutkan nikah merupakan rukun Islam atau hal-hal yang wajib; Di kalangan sahabat ada yang tidak sempat menikah karena berjihad; Mereka tidak ada yang menyebutkan bahwa hukum menikah itu fardhu; siapa yang tidak bisa menikah untuk menghindari zina, bisa dengan melakukan puasa.

Sarkhasi menjelaskan mereka meninggalkan nikah karena beranggapan

89

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجوا فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهانية النصارى وفي هذا أخبار كثيرة في أسانيدنا ضعف وفيما ذكرناه غنية قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم تتمسه النار

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah Ta'ala berkata dalam *Fathul Bari*, 9/105-106), "Yang dimaksud dengan 'sunnah' adalah jalan (ajaran), bukan sunnah lawannya fardhu. Sedangkan maksud tidak menyukai sesuatu adalah berpaling darinya. Maka maksudnya, 'Siapa yang keluar dari ajaran saya dan beralih kepada ajaran selain saya, maka dia bukan golongan saya.' Beliau memberi isyarat kepada ajaran *rahbaniah* (kependetaan). Mereka mengada-ada dalam perkara yang memberatkan sebagaimana Allah telah sifati mereka dan mencela mereka karena mereka tidak konsisten dengan janji mereka. Ajaran Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah jalan yang suci yang toleran, dia mengajarkan seseorang untuk berbuka agar dirinya kuat berpuasa, mengajarkan untuk tidur agar kuat bangun malam, serta mengajarkan umatnya untuk menikah untuk mengendalikan syahwat dan menjaga kehormatan diri serta memperbanyak keturunan.

Yang dimaksud 'bukan golonganku', jika 'ketidaksukaan'nya bersumber dari penafsiran keliru karena ketidaktahuan, maksudnya adalah bahwa sikap itu bukan jalanku. Tidak mesti orang tersebut dikatakan telah keluar dari agama. Tapi jika sikap 'ketidaksukaan' tersebut bersumber dari penentangan dan keras kepala yang menyebabkan semangot melakukannya, maksud sabda beliau 'bukan golonganku' adalah 'tidak berada dalam agamaku'. Karena keyakinan seperti itu merupakan salah satu bentuk kekufuran. Hadits ini menunjukkan keutamaan nikah dan anjuran melaksanakannya.

⁹⁰ Kesimpulan ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa kedudukan sebab (kausa) dengan akibat (efek) adalah sama, karena suatu efek timbul dari suatu kausa. Orang yang melakukan kausa dianggap melakukan efek, baik efek itu dikehendaki oleh orang yang melakukan ataupun tidak. Lihat dalam Bani Syarif Maula, *Kajian Ahwal al-Syakhshiyah dengan pendekatan Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal online, hlm. 14. Diakses 1 Mei 2018.

⁹¹ Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, jilid.III.....hlm. 193-194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya sunat. Karena Rasulullah bersabda "ada tiga sunnah para nabi : menikah, bercukur dan akhlak mulia."⁹² Pada hadits lain Rasulullah bersabda; Nikah adalah sunnahku, siapa membenci sunnahku, bukanlah umatku.⁹³ Ulama berpendapat menikah afdhal (lebih baik) dari berkhalwat untuk beribadah sunat kepada Allah swt.

Secara kondisional, hukum menikah dapat menjadi Wajib,⁹⁴ Makruh⁹⁵ atau Haram.⁹⁶ Penetapan hukum nikah seringkali dikaitkan dengan situasi yang melingkupi pelakunya, bukan pada dalil yang ada. Ini memperlihatkan kaitan antara hukum menikah dan motivasi menikah. Motivasi menikah dapat menjadi 'illat dalam penetapan hukum menikah bagi seseorang.⁹⁷ Sekalipun pernikahan

⁹² Tidak ditemukan hadits yang menyatakan tiga sunnah para rasul seperti dikemukakan oleh Syarkhasi di atas. Hadits-hadits mengenai ini menyebutkan; empat, lima atau enam sunnah para rasul. Riwayat yang menyatakan empat sunnah para rasul merupakan riwayat terbanyak, yaitu diriwayatkan oleh Turmuzi, al-Baihaqi, al-Thabrani, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Abd Humaid, dan Sa'id ibn Manshur. Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, Jami' al-Ahadits: Al-Jami al-Shaghir wa Zawaiduh wa al-Jami' al-Kabir, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 221. Berikut dikemukakan hadits yang diriwayatkan al-Turmuzi;

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك

⁹³ Lihat catatan kaki 82

⁹⁴ Ahli Ushul mendefinisikan, wajib adalah "suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan Syari' dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya", Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu.....* hlm. 176. Perintah tersebut disyaratkan bersifat qath'i (pasti). MukhtarYahya dan Fatchur Rahman, *Sejarah dan Pertumbuhan Hukum islam*, hlm. 125.

⁹⁵ *Makruh* adalah perintah Syari' kepada mukallaf agar tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan larangan yang tidak pasti..... Atau perintah untuk menghindari suatu perbuatan, tetapi ada qarinah Yang menunjukkan karahah" Abdul Wahab Khalaf, *ilmu.....*, hlm. 191-192.

⁹⁶ Ahli Ushul menjelaskan, haram adalah "tuntutan Syari' untuk ditinggalkan secara pasti.....atau larangan mengerjakan suatu perbuatan, diiringi dengan dalil yang menunjukkan larangan secara pasti". *ibid*, hlm. 188.

⁹⁷ Muhammad Daud Ali menjelaskan; kaidah asal melakukan perkawinan adalah ja'iz atau ibahah atau kebolehan atau halal.....Kaidah ja'iz atau mubah atau ibahah dapat beralih menjadi sunnat, kalau illat atau motif melakukan perbuatan perkawinan berubah karena berubah kondisi yang ada". Muhammad Daud Ali. Pendidikan....., him. 126-127. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam.....*, hlm. 4.

Pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah cukup nafkah atau mampu lahir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukumi dengan jaiz (boleh/ibahah).

Berkaitan dengan hukum perkawinan, ulama sepakat orang yang mampu secara lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan dilarang hidup membujang (*tabattul*). Seperti pada beberapa hadits berikut;

عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . رواه مسلم

98

Dari Anas bahwa tiga orang sahabat Nabi saw. bertanya kepada isteri-isteri Nabi saw. tentang amalannya di kala sendirian. Sebagian mereka menceritakan; saya tidak makan daging. Dan sebagian lagi bercerita: saya tidak tidur, karena bertahmid dan memuji Allah swt. Lalu ia bertanya, siapakah (di antara kami) yang terbaik, mereka bercerita begini, begini. (Rasulullah bersabda), tetapi saya shalat dan tidur, saya puasa dan berbuka, serta saya menikah. Siapa yang membenci sunnahku, bukanlah umatku". (H.R. Muslim)

Yang dimaksud ‘siapa yang membenci ajaranku..’ disebutkan oleh Ibnu Hajar (w. 852 H/1449 M) “Siapa yang *مَنْ تَرَكَ طَرِيقِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي*” meninggalkan jalanku, menempuh jalan selainku, tidak termasuk golonganku.”

batin dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan jika ia tidak menikah. Mandub bagi orang yang sudah mampu lahir batin untuk menikah, tetapi tanpa menikah dia tidak khawatir akan melakukan perbuatan yang diharamkan (seperti zina). Makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan lahir batin, sementara Pihak isteri tidak merasa terzalimi dengan kondisi itu. Haram bagi orang yang hendak menyakiti atau menzalimi perempuan yang dinikahinya dengan melepaskan tanggungjawab lahir batin. Lihat dewan redaksi Ensiklopedi Islam,.....hlm. 1330

98 Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 5063); Muslim (no. 1401); Ahmad (III/241, 259, 285); An-Nasâ-i (VI/60); Al-Baihaqi (VII/77); Ibnu Hibbân (no. 14 dan 317-at-Ta’liqâtul Hisân); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 96).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berarti menikah ajaran Islam dan tak boleh dibenci. Ajaran Islam dalam hadits ini memiliki maslahat yang besar.⁹⁹

Hadits ini merupakan sanggahan Rasul terhadap sahabat punya tekad untuk enggan menikah karena ingin sibuk dalam ibadah.

Imam Bukhari(w. 256 H/870 M) meriwayatkan hadits lain ;

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا . رواه البخاري¹⁰⁰

Sa'ad bin Abi Waqas berkata; "Rasulullah saw. menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk membujang, kalau lah ia diizinkan membujang, niscaya kami akan mengebiri diri kami. (HR Bukhari)

Disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih *tabattul* berarti memutus. Orang yang mengasingkan diri dengan tujuan beribadah disebut *al-mutabattil*.¹⁰¹ Dalam Subulus Salam disebutkan *tabattul* adalah enggan menikah karena memutuskan untuk beribadah pada Allah.¹⁰² Ibnu Hajar (w. 852 H/1449 M) menyebutkan perkataan Ath Thobariy bahwa *tabattul* dimaksudkan 'Utsman bin Mazh'un

⁹⁹ Ibn Hajar al-asqolani, *Fathu al-Bâri bi syarh shahîh al-Bukhâri*, (Bairut : Dar Thiybah, 1432 H), cet. 4, Juz. 9, hlm. 105

¹⁰⁰ Imam al-Bukhari..... hlm. 1952. Lihat juga Muhammad ibn Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u Baina al- Shohîhain* Juz. 1, hlm. 101

¹⁰¹ Kementerian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz. 8, hlm. 13

¹⁰² Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subûl al-Salâm al-Mûshilah ila bulûgh al-Marâm*, (Beirut : Dar Ibn al-Jauzi, 1432 H), cet. Kedua, juz.6, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengharamkan diri untuk menikahi wanita dan enggan mengenakan wewangian serta segala yang menyenangkan.¹⁰³

Perbedaan ketiga pendapat tentang hukum asal nikah di atas disebabkan oleh metode istinbath hukum dalam memahami perintah (*al-amr*) menikah. Sebagian ulama memahami makna *al-amr* pada *nash-nash* tersebut sebagai wajib. Yang lain memahaminya sebagai sunat (*nadab*) atau mubah. Menurut Muhammad Hudhori, pilihan makna *al-amar* tersebut mesti dengan mempertimbangkan *qarinah*.¹⁰⁴ Perintah menikah didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Nabi-Nya. Terdapat beberapa ayat yang memerintahkan pernikahan, menjelaskan hikmah, tujuan, manfa'at serta aturan-aturan dalam pemikahan. Antara lain; QS. Al-Nisa'; 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا [٤:٣]

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰⁵

Ayat ini secara spesifik membahas larangan berlaku tidak adil terhadap hak-

¹⁰³ Ibn Hajar al-asqolani, *Fathu al-Bâri* ...Juz. 9, hlm.118

¹⁰⁴ Muhammad Hudhori, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), him. 228.

Abdul Wahab Khalaf mengemukakan bahwa lafaz amar menunjukkan arti hakiki (makna wajib) kecuali jika ada *qarinah* (petunjuk). Jika terdapat *qarinah* yang menunjukkan makna lain, ia dapat dipahami sebagaimana ditunjukkan oleh *qarinah* itu. Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushul Fiqhi*...., hlm. 349.

¹⁰⁵ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*, hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak perempuan yatim. Secara maknawi juga anjuran untuk menikah. Pada *al-Qur'an* Surat al-Nisa, ayat 3 terdapat ketentuan perlakuan terhadap perempuan yatim berada dalam pemeliharaan seseorang. Jika khawatir tidak berlaku adil mengurus anak yatim dan hartanya, jangan menikahi anak yatim tersebut dan nikahilah perempuan lain, berapapun jumlahnya. Dua, tiga, atau empat. Jika tidak berlaku adil, nikahilah satu saja. Atau berpaling kepada hamba sahaya yang dimiliki. Bukan berarti boleh sewenang-wenang terhadapnya. Perlakuan adil adalah hal yang mesti diperhatikan.

Berdasarkan keterangan Aisyah ra (w. 58 H), Imam Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H) serta al-Tirmidzi (w. 279 H) dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa, Urwah Ibn Zubair (w. 93 H) bertanya kepada Aisyah ra. tentang ayat (QS. al-Nisa: 3) ini, ia menjawab ayat ini berkaitan dengan seorang anak perempuan yatim yang dipelihara oleh seorang laki-laki (wali), harta anak tersebut bergabung dengan harta wali, dan si wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai.¹⁰⁶

Berikutnya terdapat dalam surat Al-Nisa'; 24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ

¹⁰⁶ Imaduddin Abi Al Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an al Azhim*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, tt), Jilid I, hlm. 449

Terdapat hubungan antara Qs. al-Nisa ayat 3 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, Allah swt. menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim berikut hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah baligh dan dewasa, serta dilarang untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ke 3, Allah swt. melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada harta dan kecantikannya saja. Oleh karena itu jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia sukai, dua, tiga atau empat. Baca H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta, Rajawali Press: 2008), hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:٢٤]

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁷

Ayat ini menjelaskan salah satu manfaat pernikahan, dikenal dengan hukum keberpasangan (*law sex*). Hasrat seksual merupakan naluri setiap makhluk, tak terkecuali manusia. Bahkan Freud sebagaimana dikutip Quraish Shihab dalam bukunya “*Pengantin Al-Quran; Kalung Permata Buat Anak-anakku*” menyatakan bahwa seluruh aktivitas manusia didorong oleh kebutuhan tersebut, sampai-sampai anak yang menyusu atau mengisap jarinya pun dilukiskan oleh ilmuwan itu sebagai pengejawantahan dari dorongan seksual. Sekalipun ia sendiri –Quraish Shihab- tidak membenarkan pendapat itu secara keseluruhan. Namun terlepas dari benar dan tidaknya pernyataan Freud itu, pastinya bahwa dorongan seksual memang besar. Naluri kecintaan kepada lawan seks menjadikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ...hlm. 82

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2007), hlm 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dari sini juga dipahami bahwa pernikahan bagi manusia dalam pandangan agama tidak sebatas jalan berhubungan seks tapi lebih daripada itu pernikahan merupakan sarana untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.¹⁰⁹

Dalam surat Al-Nur; 32 juga dijelaskan,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

¹⁰⁹ Rasulullah saw. telah menggaris bawahi bahwa berhubungan seks dengan pasangan dinilai sebagai sedekah, sebagaimana jawaban nabi kepada sekelompok orang yang datang bertanya mengenai keterbatasan mereka untuk beribadah bila dibandingkan dengan orang-orang kaya;

يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِغُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَوْلَيْتُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَيْعٍ أَوْ خَيْرٍ صَدَقَةٌ فَأَلْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي خَزَائِمٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Wahai Rasulullah.. orang-orang yang memiliki harta berlimpah mendapatkan banyak pahala. Sebab mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang dimiliki. Nabi lalu membalas pernyataan mereka dengan mengatakan, “Tidakkah Allah telah menjadikan berbagai macam hal yang bisa kalian sedekahkan. Sesungguhnya setiap tasbeeh adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar adalah sedekah, bahkan hubungan seks kalian adalah sedekah. Lalu para sahabat pun kembali bertanya, bagaimana bisa hubungan seks suami isteri menjadi sedekah? Nabi pun kembali menegaskan, bukankah apabila ia meletakkannya pada yang haram ia berdosa? Maka demikian pulalah bila ia letakkan pada yang halal, tentu ia mendapat pahala.” Lihat Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *al-Jāmi’ al-Shāhīh*, jil III (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹⁰

Allah swt. menjelaskan menikah sesuatu yang disukai. Allah swt. memerintah untuk membantu mempermudah jalannya pernikahan. Karena nikah baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, serta dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Ayat ini mendorong pemuda dan pemudi melalui pernikahan untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik berupa fasilitas maupun tidak. Inilah gambaran munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya.¹¹¹

Dapat dipahami Ulama yang menyatakan hukum asal menikah adalah wajib berdasarkan pendapatnya pada zahir *nash-nash* tersebut.¹¹² Sedangkan ulama

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an ...* hlm. 354

¹¹¹ Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah swt. telah memperingatkan untuk berhati-hati dari pelacuran dan tindakan yang tidak bermoral. Kemudian Allah swt. melarang perbuatan zina dan segala motif yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina, seperti melihat perempuan, bercampur dengan mereka, membuka aurat, memperlihatkan perhiasan, memasuki rumah tanpa ada izin dan sebagainya. Dimana hal tersebut dapat merusak akhlak serta mendatangkan kerusakan.

Uraian di atas dipertegas di dalam QS al-Nur ayat 32 dan 33. Pada ayat 32 Allah memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, melalui ayat 33 ini para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera menikahkan mereka. Baca Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), hlm. 131. Lihat juga Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.

¹¹² Wahbah Zuhaili menjelasn :

ير الجمهور العلماء ان الامر يدل على وجوب المأمور به, ولا يصرف عن الوجوب الى غيره الا بقينة من القرائن على ذلك. فان لم توجد قرينة كان الامر مفيدا لاجاب المأمور به. فمن احوال غير الايجاب انه قد يأتي الأمر للندب

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya yang diperintahkan, dan tidak dapat dipalingkan dari hukum wajib kepada hukum lainnya kecuali karena adanya salah satu qarinah yang menunjukkan hal itu. Bila tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang berpendapat hukum asal menikah adalah sunat berpegang bahwa dalam perintah menikah disertai dengan *qarinah*, yaitu kemampuan dan memilih yang baik. Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah *mubah* (jaiz), karena beranggapan nikah tidak termasuk ibadah. Hal ini terbukti dengan adanya pernikahan orang kafir, seandainya pernikahan itu ibadah, niscaya orang kafir terlarang melakukannya.¹¹³ Terdapat juga kaidah menyatakan الأصل في المعاملة

"pada dasarnya hukum bermuamalah (adat) itu *المباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* mubah".¹¹⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Bila memasukkan pernikahan pada kategori muamalah, hukum menikah adalah *mubah*. Bagi yang berpendapat pernikahan adalah ibadah, hukumnya wajib sesuai dengan *nash-nash* yang memerintahkannya, atau sunat (*mustahab*) seperti disepakati jumhur ulama.

Ahli ushul fiqh sepakat menikah termasuk *wasail* (jalan) pemeliharaan keturunan (*hifz al-nas/al-nasb*) dan merupakan hal yang bersifat *mashlahat dharuriyat* (mendasar/pokok).¹¹⁵ Wajar ada ulama menyatakan menikah wajib

diperoleh *qarinah*, perintah tersebut menunjukkan wajibnya yang diperintahkan. Bila kondisinya tidak menunjukkan wajib, perintah tersebut menunjukkan hukum nadab (sunat). Lihat *Ushul Fiqhi Islami*, juz.2 (Damaskus : Dar al-Fikr), hlm. 220

¹¹³ Baca, Muḥammad ibn Khathīb al-Syarbīniy, *Mughniy al-Muḥtāj*, Vol. III (Bairūt: Dār al-Maʿrifah, 1418 H/ 1997 M), hlm. 170.

¹¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm., 130

¹¹⁵ Lihat kembali Imam al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ushûl al-Fiqh*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 139-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi yang mampu (*ba'ah*) secara lahir dan batin disebabkan khawatir terjerumus kepada zina atau pun tidak. Kewajiban menikah sama seperti kewajiban haji bagi yang mampu, zakat bagi yang memiliki harta mencapai nisab dan sebagainya. Tidak ada *khilafiah* (perbedaan pendapat) ulama tentang kewajiban haji, zakat dan semisalnya. *Qarinah* kemampuan memberikan mahar, nafkah, berlaku adil dan memenuhi kebutuhan seksual isteri serta keinginan untuk menikah, menyebabkan terjadinya perubahan hukum menjadi sunat, mubah, makruh atau haram.

Pernikahan adalah kebutuhan manusia dan berbagai budaya memperlihatkan berbagai tradisi dalam melaksanakan pernikahan. Sebenarnya, tanpa adanya perintah menikah, manusia cenderung melakukannya. Bahkan pernikahan dalam pengertian bersetubuh adalah fitrah semua makhluk hidup. Terdapat kecenderungan sebagian kaum muslimin yang disibukkan menuntut ilmu dan beribadah kepada-Nya, seperti keinginan beberapa sahabat untuk meniru kerahiban penganut nasrani dan ingin membujang. Imam Syafi'i (w. 204 H) menyebutkan mereka yang memiliki kesibukan beribadah kepada Allah swt. tidaklah diwajibkan menikah sekalipun mereka mampu lahir dan batin.

Perintah menikah dari Allah swt. dan Rasulullah adalah untuk menghindari adanya kecenderungan kerahiban. Islam menganut prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan hukumnya.¹¹⁶ Keseimbangan antara menunaikan hak individu dan keluarga dengan menunaikan hak Allah swt. serta keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat. Inilah fitrah manusia, Islam adalah agama yang sesuai dengan

¹¹⁶ Muhammad Mushthafa Syalabi, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islâmiy; Ta'rifuhu wa Tarikhuhu wa Mazâhibuhu, Nazhriat al-Milkiyah wa al-'Aqd*, (Beirut: al-Dar al-Jami'iah, 1985), hlm. 288-289

fitrah tersebut. Allah swt. menciptakan manusia di atas fitrah, dan memerintahkan manusia untuk beragama sesuai dengan fitrah;

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [٣٠:٣٠]

*Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah swt.; (tetaplah atas) fitrah Allah swt. yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah swt. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui..*¹¹⁷

Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Syihab memaknai fitrah dengan Islam dan Tauhid. Ditafsirkannya fitrah dengan Islam karena untuk fitrah itulah manusia diciptakan. Telah ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan Allah swt. untuk beribadah kepada-Nya (QS adz-Dzariyat [51]: 56). Jika dicermati, kedua makna tersebut tampak saling melengkapi.¹¹⁸

Kata *fithratallâh* berkedudukan sebagai *maf'ûl bih* (obyek) dari *fi'il* (kata kerja) yang tersembunyi, yakni *ilzamû* (tetaplah) atau *ittabi'û* (ikutilah). Itu berarti, manusia diperintahkan untuk mengikuti fitrah Allah. Jika demikian, fitrah yang dimaksudkan tentu tidak cukup hanya sebatas keyakinan fitri tentang Tuhan atau kecenderungan pada tauhid. Fitrah di sini harus diartikan sebagai akidah tauhid atau *dîn al-Islâm* itu sendiri. Frasa ini memperkuat perintah untuk mempertahankan penerimaan total terhadap Islam, tidak condong pada agama batil lainnya, dan terus memelihara sikap istiqamah terhadap *dîn al-Islâm*, *dîn al-*

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 407

¹¹⁸ Al-Suyuti, *al-Durr al-Mantsûr fî at-Tafsîr al-Ma'tsûr*, (Semarang : Toha Putra, 1995, hLM:352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haq, yang diciptakan Allah swt. untuk manusia.¹¹⁹

Said Sabiq (w. 1421 H/2000 M) menjelaskan di antara manusia ada punya keinginan menjaga spirit keagamaannya dan menghindari hal-hal keduniaan. Shalat sepanjang malam, puasa sepanjang hari, dan menghindari perempuan. Mereka menjalani hidup dengan karahiban (tidak menikah) dan mengingkari naluri kemanusiaan. Islam mengajarkan hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan menyimpang dari ajaran Islam. Rasulullah sebagai orang yang paling takut kepada Allah swt. dan paling taqwa melaksanakan shalat malam, juga tidur; berpuasa, juga berbuka; dan dia pun menikah. Siapa yang hendak keluar dari petunjuk Rasulullah tersebut, tidak ada kemuliaan baginya. Sayid Sabiq kemudian mengutip sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di atas.¹²⁰ Al-Jurjawi tidak menafikan sikap seperti ini. Ia tidak sependapat jika kerahiban menjadi alasan untuk menjaga spirit keagamaan. Al-Jurjawi menyatakan nikah merupakan poros dan ruang beredarnya segala jenis kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup. Bahkan manfaat nikah tidak akan putus setelah seseorang meninggal.¹²¹

Kalangan Hanafiah dan Ibn Hazm (w. 456 H) menggunakan metode *Sadd al-Zara'i*¹²² dalam menetapkan hukum wajib atau fardhu sebagai hukum asal

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al- Fath li 'A'lam al-'Arabi, tt), hlm. 7-8.

¹²¹ Baca kembali Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 6

¹²² *Sadd al-Zara'i* adalah wasilah atau cara yang menghantarkan kepada sesuatu, baik yang mafsadat ataupun yang mashlahat...perkataan atau pun perbuatan. Tetapi biasanya kata zara'i diungkapkan untuk menunjukkan sesuatu yang menghantarkan kepada yang masadat, seperti pengharaman berkhawat dengan perempuan *ajnabi* (bukan muhrim), karena hal itu menahan pelaku kepada perbuatan zina. Lebih lanjut jihat Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*,

menikah. Zina merupakan sesuatu yang diharamkan, cara untuk menghindari zina adalah menikah. Karena itu, menikah dihukumkan fardhu.¹²³

Dari penjelasan ini dipahami bahwa hukum asal pernikahan ini masih diperdebatkan. Metodologi *istinbath* hukum sangat menentukan dalam hal ini. Yang pasti, semua ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut penting sebab memiliki banyak tujuan, hikmah atau manfa'at.

Setelah mendeskripsikan pemikiran dan argumentasi fuqaha aliran sunni seputar hukum pernikahan, kritikan mayoritas terhadap alasan-alasan pengikut aliran al-Syafi'i dan Daud Zahiri, penulis berpendapat pemikiran mayoritas fuqaha dari aliran Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan kesunnahan hukum menikah adalah produk pemikiran yang kuat. Hal ini, karena keabsahan argumentasi mereka, sasaran dalil yang tepat (pernikahan untuk memakmurkan bumi), argumentasi mereka selamat dari kritikan, dan demi mengkompromikan dalil-dalil yang sudah ada. Dilihat dari sisi tujuannya, pernikahan adalah sesuatu yang *dharûri* (amat penting)¹²⁴ karena menyangkut pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan keturunan.

Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M) menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan

(Mesir: Al-Raudhah, 1998), hlm. 146.

¹²³ Lihat, ‘Ali ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Vol. IX (Mesir: Mathba‘ah al-Nahdlah, 1347 H), hlm. 440.

¹²⁴ Sebab, bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya seperti menjawab azan, menjawab salam, menghormati tamu dan sebagainya, pernikahan jauh lebih *dharuri* dari hal-hal tersebut. Pernikahan juga menyangkut kelangsungan eksistensi manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga.

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji (zina).¹²⁵ Menurut fuqaha', hukum pemikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; wajib, mandub, mubah, makruh dan haram. Al-Jurjawi juga menerima penggolongan hukum-hukum nikah ini. Ia tidak merinci hukum-hukum nikah, ia hanya menekankan nikah menjadi wadah untuk memelihara keturunan demi membangun dunia.¹²⁶ Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

1) Wajib

Menurut Sayid Sabiq (w. 1420 H/2000 M), pernikahan wajib bagi yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina.¹²⁷ Memelihara

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1950) hlm. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351 H), hlm.440.

¹²⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 4

¹²⁷ Menurut Abu Zahrah (w.1974 M), menikah dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan dengan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina perintah yang tegas dalam Islam, cara untuk menghindarinya adalah menikah. Syara' menetapkan hal yang tidak dapat mewujudkan fardhu kecuali dengannya, dihukumkan fardhu.

Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas, Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang Zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili;

"Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah fardhu bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, sementara ia mampu membiayai pernikahannya -termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'. Sedangkan dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqhi Islami*, juz.2 (Damaskus : Dar al-Fikr), hlm. 45

Dalam madzhab Hanafiyah, istilah fardhu dan wajib dibedakan. Fardhu adalah perbuatan yang dituntut secara tegas (طلب جازما) oleh syara' untuk dilakukan dan dibangun dari dalil yang *qath'i*, yang tidak terdapat syubhat di dalamnya. Fardhu dibangun dari *al-Qurân* al-Karim, *as-Sunnah al-Mutawatirah* atau *as-Sunnah al-Masyhurah* dan Ijma'. Contohnya adalah rukun Islam yang lima yang ditetapkan oleh *al-Qurân* al-Karim, atau yang ditetapkan oleh *as-Sunnah al-Mutawatirah* atau *as-Sunnah al-Masyhurah* seperti membaca *al-Qurân* di dalam shalat, atau

diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, hal itu tidak akan sempurna bila tidak menikah.¹²⁸ Ia mengutip pendapat al-Qurthubi (w. 671 H) "orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya-seperti terjerumus berbuat maksiat- tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah".¹²⁹ Wahbah Zuhaili (w. 1436 H/2015 M) dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan terdapat kaidah menyatakan; "sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib". Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut.¹³⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum pernikahan wajib bila seseorang telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah. Mampu

keharaman menjual empat jenis makanan, yaitu gandum (القمح), jewawut (الشعير), kurma (التمر), dan garam (الملح) secara kredit dengan benda yang sejenis yang ditetapkan oleh Ijma'. Fardhu ini wajib dikerjakan, yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa, dan yang mengingkarinya dihukumi kafir.

Wajib adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara' untuk dilakukan, namun dibangun dari dalil yang *zhanni*, yang masih syubhat. Dalil *zhanni* yang dimaksud adalah Khabar Ahad (خبر الواحد) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Contohnya adalah zakat fitrah serta shalat witir dan *'idain*. Wajib ini sama statusnya dengan fardhu, kecuali bagi yang mengingkarinya tidak dihukumi kafir.

Sedangkan menurut jumhur fuqaha, dua istilah ini tidak berbeda, keduanya memiliki satu makna, yaitu perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara' untuk dilakukan. Menurut mereka, fardhu adalah wajib, wajib adalah fardhu. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqhi*.... hlm. 45

¹²⁸ Said Sabiq, *Fikih*....., hlm. 10

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 11

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*,..... hlm. 46 Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi Wajib / faldhu, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memnuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul perturnbuan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*hlm. 4 Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*.....hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri. Sementara ia dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang berperilaku kerahiban. Keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan 'illat kewajiban menikah. 'Illat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah swt. pada surat Al-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah swt. Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³¹

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah swt. akan memberikan seseorang kemampuan

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual.¹³² Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah swt. menegaskan dalam surat al-Nur : 33;

وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ
وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٢٤:٣٣]

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah swt. memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah swt. yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹³³

Surat al-Nur ayat 32 dan 33, menggambarkan kehidupan sosial masa lalu, yaitu pada masa sistem perbudakan masih berlaku. Ayat ini turun berkenaan

¹³² Perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan الباءة Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna الباءة adalah jimak. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; "hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu "bersetubuh, nikahlah. Hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adaiah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *al-Inkihat al-Fasidah :Dirasat Fiqhiyyah Muqaranah* (Riyadh : Maktabah Dauliyah, 1983), hlm. 37.

¹³³ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan budak Huwaithab bin Abdul Izza, yang bernama Shabih. Dia meminta kepada majikannya agar me-*mukatab*-kannya tetapi majikannya itu enggan. Kemudian turunlah ayat 33.

Kemudian Huwaithab me-*mukatab*-kannya sejumlah 100 dinar dan Huwaithab memberi pula kepadanya 20 dinar.¹³⁴ *Al-Qurân* mengajarkan bahwa apabila seorang majikan diminta oleh budaknya agar ia memukatabkannya, sebaiknya majikan mengabulkan permintaan budak tersebut. Akan tetapi hal itu tergantung keadaan budak tersebut, jika dia dipandang telah layak untuk dimukatabkan dan telah mampu mencari harta untuk menebus dirinya, seharusnya majikannya mengabulkan permintaan budak itu.¹³⁵

Ayat di atas sebagai jawaban atas tradisi bangsa Arab Jahiliyah yang mempersulit apabila budak yang ingin memerdekakan diri secara *mukatabah*, dengan cara membayar uang tebusan sesuai perjanjian, Firman Allah swt. ini memerintahkan para majikan untuk memenuhi keinginan mereka dan menjadikan mereka orang yang merdeka setelah mereka memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Serta Allah swt. juga mendorong para tuan (pemilik) budak yang bersangkutan untuk memberikan sebagian hartanya kepada budak yang dimilikinya untuk dapat dipergunakan membayar tebusan atas dirinya.

Mushthafa Ali Al-Shabuni (lahir 1348 H/1930 M) menafsirkan kedua ayat di atas; Allah swt. memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman

¹³⁴ Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahadi, *Asbab al Nuzul*, (Beirut: 'Alam al Kutub, tt) hlm. 245

¹³⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, sekalipun yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah swt. akan mencukupkan rezki mereka dengan memberikan karunia-Nya, Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahnnya. Allah swt. Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Allah memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi mereka tidaklah ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Allah swt. memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi untuk menikah agar menghindari perbuatan keji yang diharamkan Allah swt., sampai Allah swt. melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pemikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah swt., akan Allah swt. berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah swt. memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah swt. melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah.¹³⁶

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) agar tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak

¹³⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), hlm. 178-179.

Ibnu Mardawaih mengeluarkan riwayat dari Ali karamallu wajhah, bahwa pada masa jahiliah, orang-orang memaksa budakbudak wanitanya untuk berzina atau melacur agar mereka dapat mengambil upahnya, lalu Islam mengaturnya dengan menurunkan ayat ini dan melarang mereka berbuat demikian. Baca Ahmad Mushthofa Al-Maraghi, *Tafsiri Al-Maraghi* (Edisi Terjemahan), (Semarang: Toha Putra, 2000), hlm. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hamba sahaya. Justeru, Allah swt. memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah swt. akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

Pada ayat 25 Surat al-Nisa', Allah swt. berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٤:٢٥]

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah swt. mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³⁷

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka.¹³⁸

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu' dianjurkan dalam Islam, bila tidak memiliki kemampuan finansial boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) agar terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah swt. adalah orang yang bertaqwa.¹³⁹

2) Mandub

Disunnatkan menikah menurut jumhur, bila seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak menzalimi isterinya bila menikah.¹⁴⁰ Abu Zahrah (w. 1974 M) menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah hukumnya mubah, *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu.¹⁴¹ Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pemikahan. Ini adalah dalil tentang sunnatnya hukum menikah.¹⁴²

¹³⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhhammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), hlm. 225-238.

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *ahwal.....*, hlm. 23

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 24

¹⁴² Menurut Muhmad Daud Ali pemikahan itu hukumnya sunnat kalau dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Mubah*

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti (w. 1591 H/1641M), menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah. Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama.¹⁴³

4) *Makruh*

Nikah dihukumkan makruh bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan jika menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah.¹⁴⁴ Termasuk makruh menurut Imam Syafi'i (w. 204 H/819 M), orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban.¹⁴⁵

seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*..... hlm. 126-127

¹⁴³ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, *Syarh Muntaha al- Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), hlm. 99

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul*...., hlm. 46

¹⁴⁵ *Ibid.*,

5) *Haram*

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang akan menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pemikahan atau tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi.¹⁴⁶ Zuhaily (w. 1436 H) menegaskan, sekalipun pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام¹⁴⁷

"Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal".

Kaidah ini dipahami bahwa perkara yang haram tentu menyimpan kerusakan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai langkah preventif menghindari kerusakan tersebut lebih baik melepaskan yang halal dari pada mengkonsumsi barang haram yang dianggap halal. Secara harfiah diartikan bahwa apabila ragu dalam mendefinisikan halal dan haram ketika melakukan sesuatu, lebih baik untuk

Menurut Muhammad Daud Ali Makruh; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya, la tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*...., hlm.4-5.

¹⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul*.....hlm. 46.

Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya haram bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut Perhitungan umum dan wajar pemikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*..... hlm, 4-5

¹⁴⁷ Muhammad Bakr Isma'il, *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashalah wa al-Taujjih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), him. 122. Wahbah Zuhaili, *Ushul*.....hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindarinya atau tidak melakukannya. Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia, serta dengan menikah akan terhindar dari zina.¹⁴⁸

3. *Nash-Nash* disyariatkannya Nikah

Dari bacaan dalam kitab *al-Ziwaj al-Islami al-Sa'id*,¹⁴⁹ ada beberapa ayat dalam *al-Qur'an* menyebutkan tentang pernikahan. Antara lain :

Pertama, surat al-Nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [٤:١]

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah swt. menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah swt. memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah swt. selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁵⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa makna *نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* dalam ayat di atas adalah adam. Al-Qaffal (w. 975 H/1026 M) mengatakan bahwa makna ayat ini ialah

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Mahmud al-Mashri Abu 'Imar, *al-Ziwaj al-Islami al-Sa'id*, (Mesir : Maktabah al-Shofa, 2007), hlm. 11-13

¹⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sesungguhnya Allah swt. telah menciptakan setiap orang diantara kalian berasal dari satu jiwa kemudian dia menjadikan istri untuknya yang diciptakan dari dirinya atau kemungkinan *khitab* (pembicaraan) ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. Mereka adalah keluarga Qusay, dan yang dimaksudkan dengan *nafsin wahidah* dalam ayat ini adalah Qusay sendiri.¹⁵¹ Ada juga sebagian yang memahami *nafsin wahidah* dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syaikh Muhammad Abduh (w. 1905 M), al-Qosimi(w. 2005 M) dan beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian.¹⁵²

Ulama berbeda pendapat tentang *وخلق منها* “darinya Allah swt. menciptakan”, apakah maksud “nya” menciptakan hawa dari jiwa Adam atau dari jiwa hawa sendiri. Yang menyatakan dari jiwa hawa sendiri beralasan dengan pemahaman ayat, “sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri”. Menurut Abu Muslim al-Asfahaniy yang dimaksud dengan makna lafaz *منها* adalah dari yang sejenis dengannya.¹⁵³ Atau menurut pendapat lain maksud dari *وخلق منها* “darinya Allah swt. menciptakan” ialah dari tulang punggung Adam, tapi ungkapan ini tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya, selama tidak ada bukti yang kuat, pernyataan pertama yang dipengang.

¹⁵¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, cet.* (Dar-Fikr.: tt) Jilid. 2, hlm. 175.

¹⁵² M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurân*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 332.

¹⁵³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.....* jild. 2, hlm. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(وخلق منها زوجها) “Dan darinya Allah swt. menciptakan istrinya.” Yaitu

Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, ia melihat Hawa yang cukup menakjubkan. Hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.¹⁵⁴ Penegasan makna “Allah swt. menciptakan darinya pasangannya,” memiliki makna bahwa pasangan suami istri itu hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai (نكاح) yang berarti *keberpasangan* disamping dinamai (زواج) yang berarti penyatuan jasmani dan rohani.

“dan daripada keduanya Allah swt. memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak.” Artinya Allah swt. lahirkan dari keduanya yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita yang banyak sekali, serta ditebarkan di berbagai pelosok dunia dengan perbedaan golongan, sifat, warna dan bahasa mereka. Kemudian setelah itu, hanya kepada-Nya tempat kembali dan tempat berkumpul.¹⁵⁵

Dalam *Tafsir al-Marâghi* juga dijelaskan bahwa dari dua sejoli ini (Adam dan

¹⁵⁴ Didalam hadits shahih dinyatakan:

ان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهب تقيمه كسرته وان استمعت بما استمعت بما وفيها عوج

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Jika engkau memaksakan untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Tetapi jika engkau bersenang-senang dengannya, bersenang-senanglah dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.” Lihat Shoheh Imam Muslim, hadits no. 2670

¹⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Darr al-Qurânul Karim) Cet II,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawa) akan lahir keturunan. Allah swt. menjadikan keturunan itu dari dua pasangan, suami istri. Keturunan manusia dikembangkan melalui pasangan yang terdiri dari laki-laki dan wanita. “Allah swt. memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki banyak dan perempuan,” ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang berkembang biak.¹⁵⁶

Dengan demikian secara umum ayat ini menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah akan menjadikan populasi manusia bertambah. Selain itu dengan menikah berarti seseorang sedang berupaya mendekatkan diri kepada Khalik-Nya.

Kedua, surat al-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [٤:٣]

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁵⁷

Ibnu Hajar (w. 852 H/1449 M) menyebut bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menikahi yang baik serta larangan meninggalkan yang baik. Ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang

¹⁵⁶ M. Quraiys Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan.....*, hlm. 332.

¹⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 77

melampaui batas.¹⁵⁸

Tema ayat ini menurut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M)¹⁵⁹ terdefiniskan sesuai dengan sebab turunnya, yaitu ada kalanya tema ayat ini menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya, bila ada seorang anak yatim perempuan berada di bawah pengasuhan seseorang, ia ingin menikahinya tetapi khawatir tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar *mitsil* (mahar yang biasa diberikan kepada wanita lainnya yang setingkat dengannya), hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya, karena masih banyak wanita lain yang bisa ia nikahi dan Allah swt. pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita lain.

Ada kalanya tema ayat ini seputar perintah berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap zalim terhadapnya ketika menikahi lebih dari satu (poligami). Maksudnya, ayat ini turun bersamaan dengan sikap hati-hati orang Quraisy dalam mengasuh anak yatim. Tidak demikian terhadap istri-istrinya, mereka memiliki sepuluh istri, tetapi diperlakukan dengan zalim dan tidak adil. Ayat ini turun menyerukan “seperti halnya merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, begitu juga harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita (istri), kurangilah jumlah wanita yang dinikahi itu. Karena siapa yang berusaha menjauhi sebuah perbuatan dosa, namun ia tetap melakukan sesuatu perbuatan yang disamakan dengan dosa yang ingin ia jauhi

¹⁵⁸ Ibn Hajar al-asqolani, *Fathu al-Bâri...*, Juz. 9, hlm. 6

¹⁵⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid II* (Jakarta : Gema Insani, 2013), Hml. 571-572 . lihat juga kembali catatan kaki 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut, ia berarti bukan orang yang menjauhinya.”¹⁶⁰

Yang dimaksud dengan *al-khauf* (takut, khawatir) adalah tahu dirinya tidak bisa berlaku adil. Hal ini diungkapkan dengan kata *al-khauf* sebagai bentuk isyarat sesuatu yang diketahui (dalam hal ini adalah tidak bisa berlaku adil) adalah sesuatu yang ditakuti dan di larang. Maksudnya, apabila merasa akan berbuat zhalim terhadap anak yatim perempuan dinikahi dengan tidak memberikan kepadanya mahar, atau dengan memakan harta anak yatim secara batil, jangan menikahi anak yatim perempuan tersebut. Tetapi nikahilah wanita-wanita yang lain: satu, dua, tiga, atau empat. Juga harus berlaku adil terhadap para istri yang dinikahi ketika kalian berpoligami. Janganlah menikahi wanita lebih dari empat agar bisa berlaku adil terhadap mereka.¹⁶¹

Perintah pada ayat, فانكحوا adalah perintah yang bersifat *ibaahah* (memperbolehkan), seperti perintah pada ayat, وكلوا واشربوا (al-Baqarah :187) dan bentuk-bentuk perintah yang sejenis lainnya. Ada pendapat mengatakan perintah tersebut adalah bersifat wajib. Yang dimaksud wajib disini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan di ayat tersebut, yaitu dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain , jika berpoligami, wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi.¹⁶²

Berkaitan dengan poligami, Al-Jurjawi menekankan bahwa syariat hanya membolehkan poligami sampai empat, dengan catatan harus berlaku adil. Tidak boleh poligami lebih dari empat, karena pasti akan terjadi kezhaliman. Seseorang

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*,

162 *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mungkin dapat menahan diri dari berbuat zhalim dan melampaui batas betapa pun bijak dan banyaknya ilmunya. Kecuali Rasulullah saw., beliau ma'sum (terpelihara) dari kesalahan dan dosa. Tidak pernah terjadi perilakunya bertentangan dengan *al-Qurân*.¹⁶³

Ayat di atas menurut al-Jurjawi tidak mungkin diamalkan secara lahiriah. Ia harus ditakwil. Sebab jika tidak ditakwil, berarti jumlahnya sembilan orang. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti ini. Takwilnya ada dua: *Pertama*, Menunjukkan pilihan, yakni menikah antara dua, tiga atau empat. Seakan-akan Allah berfirman, "Dua, atau tiga, atau empat". Menggunakan huruf *waw* (dan) pada posisi *aw* (atau) adalah boleh dalam bahasa Arab. *Kedua*, Penyebutan bilangan ini adalah bentuk ketercakupan bilangan lain di dalamnya. Ucapan *tsalatsa* (tiga), tercakup di dalamnya dua, pada kata- kata *rub'a'* (empat) terkandung di dalamnya tiga.¹⁶⁴

Walaupun secara khusus ayat ini berbicara tentang aturan teknis berpoligami, namun secara umum ayat ini menjadi salah satu dasar yang dijadikan ulama sebagai *nash* pensyariaan nikah. Hal ini dapat dipahami dari kalimat perintah untuk menikah dalam redaksi ayat tersebut.

Ketiga, surat al-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹⁶³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 17

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 18

[١٦:٧٢]

Allah swt. menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah swt.?"¹⁶⁵

Secara umum ayat ini menurut al-Jurjawi mengingatkan bahwa pernikahan dapat menjadikan populasi manusia makin bertambah. Dengan pertambahan itu keberlangsungan peradaban manusia akan terus ada selama bumi ini masih ada. Di sinilah kemudian Allah swt. mendorong manusia untuk melaksanakan pernikahan. Al-Jurjawi menyatakan bahwa dengan menikah keturunan akan menjadi banyak. Rasul saw. membanggakan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat. Dengan jumlah yang banyak kaum muslimin dapat menunjukkan keagungan dan kekuatan mereka.¹⁶⁶

Secara khusus ayat ini menyinggung masalah pembentukan keluarga dan menjelaskan bahwa Allah swt. adalah Zat yang memberikan seorang pasangan dan menjadikannya sebagai orang yang mencintai pasangannya, kemudian menganugerahkan kasih sayang melalui anak dan cucu. Meski keluarga adalah komunitas sosial terkecil di tengah masyarakat, tapi keluarga merupakan pondasi masyarakat. Semua tatanan sosial berlandaskan pada kontrak antara manusia.

Satu-satunya sistem penciptaan bagi manusia adalah tatanan keluarga. Dari situlah manusia lahir dan dewasa yang kemudian membentuk keluarga lagi.

¹⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 274

¹⁶⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 4 & 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sistem keluarga, akan menghancurkan sistem sosial manusia. Islam sangat menganjurkan dan menekankan pernikahan dan pembentukan keluarga yang kemudian melahirkan generasi manusia dan mendidiknya. Bahkan disebutkan, ibadah seseorang yang sudah berkeluarga lebih bernilai dari seseorang yang belum berkeluarga. Karena dengan berkeluarga akan melibatkan dan memberi manfaat kepada banyak orang: istri, anak-anak dan keluarga lainnya. Banyaknya orang yang terlibat dalam amal sholeh tentu lebih baik dibanding yang terlibat hanya sedikit.¹⁶⁷

Dari ayat ini terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. *Pertama*, melalui pernikahan, Allah swt. selain menjamin kebutuhan materi dan lahiriah, juga memenuhi kebutuhan spiritual dan batin. Dan *kedua*, meninggalkan pernikahan dan menghindar dari mempunyai anak adalah bentuk kekufuran pada kenikmatan Allah swt.¹⁶⁸

Keempat, surat al-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah swt. Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid*, 7

¹⁶⁸ Sangat disesalkan bahwa hubungan ilegal diluar pernikahan di sejumlah kalangan masyarakat, menyebabkan sejumlah besar pihak memilih tidak menikah dan menghindari dari pembentukan keluarga. Selain itu, kondisi itu menyebabkan kehancuran sistem keluarga karena pengkhianatan baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan.. Baca Iis Ardhianita & Budi Andayani, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*, dalam Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Volume 32, No.2.101-111.

¹⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 354

Dari ayat ini dapat dilihat *khitabnya* ditujukan kepada para wali anak perempuan. Sehingga ayat ini mendorong seorang wali yang mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk segera menikahkan anak gadisnya tersebut jika sudah mencukupi umur dan syarat-syarat lainnya. Dalam tafsir al-Wajiz dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk menikahkan orang-orang merdeka yang tidak memiliki pasangan, selama mereka mampu memberikan mahar dan nafkah. Ayat ini juga memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya yang bertaqwa dan baik, yaitu mereka beriman dan sanggup menunaikan kewajiban-kewajibannya, sekalipun mereka itu miskin. Allah swt. akan mencukupi mereka dengan kemuliaan dan karunia-Nya. Orang yang menikah akan dicukupkan oleh Allah swt. dengan kaya jiwa dan harta. Allah Maha kaya, Maha melapangkan rizki dan Maha ada. Tidak akan berkurang kekuasaan-Nya dengan mencukupkan rizki hamba-Nya, Dia Maha Tahu kemaslahatan makhluk-Nya, serta memberikan rizki mereka pada saat dibutuhkan.¹⁷⁰

Ayat ini berisi anjuran nikah dan membantu laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menikah, termasuk juga budak-budak yang layak dan cukup usia, hendaklah dibantu mereka dinikahkan dan janganlah sekali-sekali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin, Allah swt. berfirman bahwa jika sewaktu nikah berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rizki dan kemampuan dengan karunia Allah swt. dan rahmat-Nya.¹⁷¹

¹⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz 'ala Hamisy al-Qurân al-'azhim*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1992), hlm. 355

¹⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kuala Lumpur; Victory Agencie ,1994) terj. hlm 468-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, surat al-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷²

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.¹⁷³

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa manusia dengan tabiatnya cenderung nyaman dengan orang yang setia mendampingi. Kehadiran istri akan melenyapkan duka dan kegersangan dirinya. Keberadaan istri akan menghilangkan kesedihannya dan keteraturan hidupnya akan terbantu, lebih-lebih urusan rumah tangganya.¹⁷⁴

Selain itu dalam ayat ini Allah swt. juga mengingatkan bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang

470

¹⁷² Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 406

¹⁷³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 16.

¹⁷⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.¹⁷⁵ Merasakan ketenangan dengan diliputi kasih sayang dari seseorang merupakan dambaan semua orang, oleh karenanya ayat ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya dengan pernikahanlah semua itu dapat diraih. Pernikahan dapat disebut sebagai fitrah manusia. Al-Jurjawi membahasakan bahwa keadaan hidup umat manusia tidak mungkin berjalan normal kecuali jika keadaan rumah tangganya baik. Hidupnya tidak nyaman kecuali tempat tinggalnya diatur dengan baik. Pengaturan rumah tangga ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran wanita yang dianugerahi oleh Allah keistimewaan berupa kemampuan mengatur rumah tangga.¹⁷⁶

Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan pria dan wanita, serta diarahkannya pertemuan itu sedemikian rupa sehingga terlaksana apa yang dinamai 'perkawinan' guna mengusir keterasingan dan beralihnya kerisauan menjadi ketentraman.

Keenam, surat Yasin : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [٣٦:٣٦]

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹⁷⁷

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua

¹⁷⁵ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

¹⁷⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*..., juz. II, hlm. 4

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 442



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Inilah paling tidak pesan dari surat Yasin ayat 36 ini. Al-Jurjawi menyebut pria dan wanita adalah mitra dalam membangun kehidupan dunia. Masing-masing punya peran dan tugas sendiri-sendiri. Menjalankan peran dan tugas masing-masing dalam bingkai rumah tangga merupakan upaya membangun kehidupan dunia yang berkelanjutan.¹⁷⁸

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa manusia mempunyai status yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berperilaku terpuji. Karena itu dalam ayat ini tersirat pesan bahwa tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk dan menjauhkan dari dosa.

Ketujuh, surat al-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah swt.

Dalam firman Allah swt. di atas sudah jelas bahwa Allah swt. memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah swt. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini juga disinyalir bahwa perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah swt. adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Ini juga berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹⁷⁹

Selain ayat-ayat di atas, ada beberapa hadits yang menganjurkan untuk menikah, antara lain :

Pertama,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة¹⁸⁰

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Hadits ini disepakati Ulama sebagai anjuran untuk menikah. Maksud biaya nikah adalah konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija`*) adalah mematahkan, maksudnya

¹⁷⁹ Lihat Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13

¹⁸⁰ Diriwayatkan oleh Al Bukhari 9/106-Fathul Baari-, Muslim 9/172-syarh Nawawi-, Abu Dawud 6/39-41- 'Aunul Ma'bud-, An Nasa'I 6/56-57, Tirmidzi 4/199-Tuhfatul Ahwadzi-, Ibnu Majah 1/566-567, Ad Darimi 2/57, Ahmad dalam *Al Musnad* 1/472,425,432, At Thayalisi 272, Humaidi 115, Abdurrazaq 10380, Ibnu Abi Syaibah 4/126, Ath Thabrani dalam (*Mu'jam*) *al Kabir* 10/10168,10169,10170,10171, Al Baihaqi 7/77, Al Khattabi dalam *At Tarikh* 3/156, Ibnul Jarud 672-Ghatsul Makdud- dan Al Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 9/403 dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'ahuma. Lihat *Ghatsul Makdud fi takhrij Hadits al Muntaqo* Ibnul Jarud 3/15.

puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsu orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak dengan jalan menegendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.¹⁸¹

Kedua,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَخْتَصِمْنَاهُ. احمد و البخارى و مسلم¹⁸²

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah saw. pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Hadis di atas memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk tidak hanya beribadah dalam artian sempit saja dan tidak bergaya hidup kependetaan.¹⁸³ Akan tetapi Islam dengan aturannya memberikan keseimbangan kepada tubuh untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Kehidupan manusia di dunia, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah (dalam arti sempit), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain (ibadah dalam arti luas). Pemenuhan kebutuhan hidup, seperti mencari nafkah, manyalurkan kebutuhan seks merupakan ibadah apabila dilakukan sesuai dengan

¹⁸¹ Baca Abdul Azis Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, terjemahan (Jakarta : Amzah, 2009), hlm.42

¹⁸² Lihat kembali catatan kaki 65. HR. Al-Bukhari (no. 5074) kitab *an-Nikaah*, Muslim (no. 1402) kitab *an-Nikaah*, at-Tirmidzi (no. 1086) kitab *an-Nikaah*, an-Nasa-i (no. 3212) kitab *an-Nikaah*, Ibnu Majah (no. 1848) kitab *an-Nikaah*, Ahmad (no. 1517).

¹⁸³ Larangan bersikap hidup kependetaan disebabkan oleh: (1) melemahkan anggota tubuh utama yaitu hati dan IQ, yang berpengaruh terhadap daya intelektual seseorang. (2) berarti merusak dunia dan keturunan. Baca dalam Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-ghaib*, jilid VI juz XII, Beirut, Dar al-Fikr, 1994/1414, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tuntunan Islam.

Ketiga,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَّا وَ اللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمُ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما ¹⁸⁴

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi saw. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi saw., sedangkan Allah swt. telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah saw. datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah swt., sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah swt. diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah swt. diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya]

Keempat,

¹⁸⁴ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5063), Muslim (no. 1401), Ahmad (III/241, 259, 285), an-Nasa-i (VI/60) dan al-Baihaqi (VII/77) dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلَّى وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم¹⁸⁵

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi saw. yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw., beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Kelima,

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ التَّبَثُّلِ، وَ قَرَأَ قَتَادَةُ { وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً. الرعد: 38 } الترمذى و ابن ماجه¹⁸⁶

Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d: 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]

Keenam,

عَنْ أَنَسٍ رَضِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و الحاكم.

¹⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiry), hlm. 291

¹⁸⁶ HR. At-Tirmidzi (no. 1982) kitab *an-Nikaah*, Ibnu Majah (no. 1849) kitab *an-Nikaah*, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (no. 1499).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و قال الحاكم صحيح الاسناد¹⁸⁷

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah swt. telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah swt. telah menolongnya pada separo agamanya. Bertaqwalah kepada Allah swt. untuk separo sisanya”. [HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya”]

Ketujuh,

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, hendaklah dia bertaqwa kepada Allah swt. pada separo sisanya”.

Dengan merujuk pada hadits-hadits di atas, dapat dilihat bahwa elastisitas hukum nikah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keimanan, sebab Rasulullah saw. dalam persoalan nikah ini mengungkapkan dengan kategori “bukan pengikutnya bagi yang mampu dan tidak mau menikah”. Ibnu Rusyd (w.1198 M) mengungkapkan bahwa pernikahan bagi kebanyakan Ulama adalah sunnat, al-Zhahiri -seperti dijelaskan sebelumnya- mengatakan bahwa hukumnya wajib. Ulama *mutaakhir* dari Malikiyah membedakan penerapannya: nikah hukumnya wajib bagi sebagian orang dan sunat bagi yang lain serta mubah bagi yang lainnya. Sebab perbedaan pendapat ini adalah *shighah amar* terhadap nikah yang terdapat dalam *al-Qurân* dan Hadits, sehingga ada yang menyimpulkan

¹⁸⁷ Hadits *hasan lighairihi*: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (no. 976) dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/161) dan dishahihkan olehnya, juga disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shahih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/404, no. 1916)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa nikah itu wajib bagi sebagian, sunnat bagi sebagian lain dan mubah bagi sebagian lainnya didasarkan pada maslahat.¹⁸⁸

Dengan demikian tidaklah salah bila dikatakan bahwa pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Dari beberapa ayat *al-Qurân* dan hadits-hadits yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya pernikahan memiliki maksud agar agama seseorang semakin sempurna, nafsu birahinya tidak serakah, terjaga ketahanan mental dan jasmani, memperkokoh tali persaudaraan, baik antar individu maupun dengan masyarakat, menjaga kemuliaan bangsa dan negara, serta meraih ampunan dosa.

Menurut Mudjab Mahalli (w. 1424 H/2003 M), pada dewasa ini telah banyak manusia yang memilih kedudukan dan martabat hewani, enggan menikah, memilih hidup bebas tanpa batas dalam menyalurkan nafsu birahinya. Kenyataan ini tidak perlu dimungkiri, karena sudah ada sejak Allah swt. menciptakan bumi. Bahkan sampai kiamat perilaku hewani itu mungkin tetap akan menghiasi kehidupan manusia yang tak pernah tersentuh nilai keimanan. Nafsu hewani telah menyatu dengan mereka sehingga membuat dirinya tidak mampu memahami

¹⁸⁸ Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Maktabah Darlhyah al-kutub al-Arabiyah, 1990), jilid. 2, hlm. 2. Lihat juga *Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits* oleh Ridwan Hasbi dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No.1, Januari 2011, hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan-tujuan mulia dari disyariatkannya pernikahan.¹⁸⁹

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun (Arab, *rukn*), jamaknya arkan, secara harfiah berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, jamaknya *syara 'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.¹⁹⁰

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudhari Bek (w. 1927 M), ialah: "Sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudhari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹⁹¹

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun

¹⁸⁹ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 83.

¹⁹⁰ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, 1408 H/ 1988 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 112.

¹⁹¹ Muhammad Al-Khudlari Bek, *Ushul al-Fiqh* (Beirut : Dar al-Fikr, 1969), hlm. 59.

Wahbah Zuhaili mendefenisikan rukun dengan :

ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من حقيقته

Sedangkan Syarat beliau defenisikan dengan :

ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن حقيقته

Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Libanon : Dar al-Fikr, 1999), hlm. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri; sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu al-syai` ma yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya; berbeda dengan syarat yang ada di luar daripada sesuatu itu sendiri.¹⁹² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan "Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i, dan dia berada luar hukum itu sendiri."¹⁹³

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam rukun nikah; sementara oleh sebagian ulama yang lain dikategorikan ke dalam syarat nikah.¹⁹⁴ Ulama Malikiah¹⁹⁵ misalnya menyebutkan lima macam *arkân* nikah

¹⁹² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*..... hlm. 112

¹⁹³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1997), Jil. 5, hlm. 1691

¹⁹⁴ Pada garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Sayid Sabiq ada dua: *pertama*, Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Dan yang *kedua*, Akad nikahnya dihadiri para saksi. Baca Sayyid Sabiq, *Fiqh*.....hlm.48

¹⁹⁵ Lihat Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: (1) wali perempuan¹⁹⁶ (2) maskawin (3) suami¹⁹⁷ (4) istri¹⁹⁸ (5) sighat

Mar'iy,t.t), juz 2, hlm. 72.

¹⁹⁶ Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali atau tidak sah, berdasarkan sabda Nabi saw :

لأنكاح الأَبُولِيَّ (رواه الخمسة)

Tidak sah perkawinan tanpa wali.

Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf (w. 182 H) berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa, sebagai berikut:

Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda. . . akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya.

Namun, bagi walinya yang 'ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah daripada mahar mitsil. Bahkan apabila ia mengawinkan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' dan tanpa kerelaan walinya yang 'ashib yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah ketidaksahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidaksahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain, wali berhak juga menjalani perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya, atau belum nyata mengandung (hamil), sehingga apabila sudah demikian keadaannya maka gugurlah haknya untuk meminta perceraian dengan maksud agar tidak terlantarlah si anak dan untuk menjaga kandungan.

Apabila suaminya kufu', sedangkan maharnya tidak lebih rendah daripada mahar mitsil dan apabila si wali menerima maka akad boleh berlangsung; akan tetapi bila wali tidak mau menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar memfasakhkan perkawinan itu.

Apabila si perempuan itu tidak mempunyai wali 'ashib, misalnya ia itu memang tidak mempunyai wali sama sekali, atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib maka siapapun tidak berhak menghalangi perempuan tersebut untuk melakukan, baik apakah ia kawin dengan laki-laki yang kufu' ataupun tidak kufu' , dengan mahar mitsil ataupun dengan mahar yang lebih rendah daripada mahar mitsil, sebab pada keadaan yang demikian segala urusan kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya, dan lagi pun ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan laki-laki yang tidak kufu' tersebut, dan juga mahar mitsilnya sudah gugur, lantaran ia pun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya. Baca dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh*.....hlm. 113-114

¹⁹⁷ Syarat-syarat suami antara lain: beragama Islam; Terang (jelas) bahwa calon suami itu

akad.¹⁹⁹ Kebanyakan ulama Syafi'iah juga menyebutkan lima rukun nikah²⁰⁰, tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dari mazhab Maliki. Kelima *arkan* nikah yang dikemukakan ulama Syafi'iah ialah: (1) suami (2) istri (3) wali²⁰¹ (4) dua orang saksi (5) *shighat* akad.²⁰²

Di balik perbedaan para ulama tentang penempatan komposisi rukun dan

betul laki-laki; Orangnya diketahui dan tertentu; Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri; Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya; Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu; Tidak sedang melakukan ihram; Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan Tidak sedang mempunyai istri empat.

¹⁹⁸ Sedangkan syarat-syarat calon istri antara lain : Beragama Islam atau Ahli Kitab; Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci); Wanita itu tentu orangnya; Halal bagi calon suami; Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah; Tidak dipaksa/ikhtiyar; serta tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

¹⁹⁹ Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Mazhab Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Mazhab Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah *lafazh nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Menurut mazhab asy-Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalnya menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. Baca lebih jauh dalam Imam Nawawi, *Al-Majmu' Sarh al-Muhaddzab* juz 17 hlm. 312, dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), hlm. 345

²⁰⁰ Lihat Abu Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t), juz 2, hlm. 73

²⁰¹ Dalam *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqh yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'iyah, disebutkan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut: Ayah kandung.; Ayah dari ayah (Kakek); Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung); Saudara laki-laki seayah.; Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki; Anak laki-laki dari saudara seayah; Saudara laki-laki ayah (paman); serta Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu). Lihat dalam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* (Damaskus, Dar al-Khair, 1994 M).hlm. 119

²⁰² Al-Jaziri, *al-Fiqh*.....hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat nikah di atas, sesungguhnya ada persamaan yang sangat kuat, yaitu semua fuqaha dan mazhab fiqih menempatkan *shighat* akad (*shighat al-'aqd*) sebagai rukun nikah yang paling mendasar. Berkenaan dengan soal ini, Al-Jaziri (w. 1941 H), misalnya, menyatakan: untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksudkan *pertama*, ialah ijab, yaitu lafal yang lahir dari pihak wali (perempuan) atau orang lain yang menempati posisi wali. *Kedua*, kabul, yaitu lafal yang lahir dari pihak suami atau orang lain yang menempati posisi suami.²⁰³

Atas dasar ini, kata Al-Jaziri, substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain ialah "pengungkapan (pernyataan) dari ijab dan kabul."²⁰⁴ Itulah pula sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqih Islam dalam pernyataannya: "*inna arkân al-zawâj al-ijâb wa al-qabûl*,"²⁰⁵ bahwa rukun pernikahan itu ialah ijab dan kabul. Dengan demikian, di luar ijab kabul pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam syarat- syarat sah nikah, bukan lagi ke dalam rukun nikah.²⁰⁶

Berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

²⁰³ *Ibid.*,

²⁰⁴ *Ibid.*,

²⁰⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1973), jil, 2, hlm. 24

²⁰⁶ Mahar/maskawin dalam pernikahan adalah hak wanita. Dengan menerima mahar berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Meminta mahar terlalu tinggi adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Pemberian mahar ini pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, dan menjadi syarat sahnya nikah. Baca Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang 'tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan haknya, izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰⁷

5. Keluarga Ideal

²⁰⁷ Lihat UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 dan seterusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap pasangan suami istri akan mendambakan kehidupan keluarga harmonis. Keluarga harmonis akan terwujud jika pasangan hidup memahami hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang dan adil sesuai basis fitrahnya. Fitrah laki-laki yang senang dilayani harus dipenuhi oleh fitrah perempuan yang bangga dan gemar melayani. Fitrah perempuan yang senang diperhatikan dengan pujian dan sanjungan harus dipadankan oleh fitrah laki-laki yang pandai memberikan perhatian, pujian dan sanjungan.

Dengan demikian nilai sukses bagi sebuah rumah tangga tidak hanya diukur dengan ukuran kebaikan duniawi, tetapi juga jauh lebih bernilai jika diukur dengan ukhrawi. Kesimpulannya adalah kebaikan duniawi dan ukhrawi merupakan sebuah standar kepatutan mutlak, ciri dan karakteristik rumah tangga sukses dalam pandangan Islam. Islam sangat perhatian terhadap tema tentang pasangan hidup. Pasangan hidup sangat menentukan sukses atau tidak sebuah rumah tangga.

Pasangan hidup menurut Muhammad Said Dasuki²⁰⁸ terdiri dari dua tipe, yakni tipe pasangan ideologis dan tipe pasangan biologis. Tipe pasangan ideologis berfungsi pula sebagai pasangan biologis, sedangkan pasangan biologis belum tentu menjadi pasangan ideologis. Hal ini dapat ditelaah berdasarkan beberapa ayat-ayat *al-Qurân* yang berbicara mengenai pasangan hidup.

Untuk pasangan hidup ideologis, *al-Qurân* membahasakannya dengan sebutan *zauj*. Ada 27 ayat yang berkenaan dengan *zauj*, antara lain surat *al-a'raf*

²⁰⁸ Baca dalam Muhammad Said Dasuki, *Cinta di Rumah Nabi* (Jakarta : Gema Insani, 2017), hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 19 dan 189.²⁰⁹ Sedangkan untuk pasangan hidup biologis, *al-Qurân* tidak menyebutnya *zauj*, tetapi *imra'ah*. Meskipun begitu, kenyataannya, mereka yang disebut *imra'ah* adalah istri dari suaminya sendiri. *al-Qurân* enggan menyebutnya *zauj* karena fungsi pasangan yang saling melengkapi, yakni saling mendukung dan menyemangati, saling membantu dalam kebaikan, saling teguh memegang prinsip dan keyakinan, dan saling menguatkan komitmen iman dan Islam, semua tidak terdapat pada salah satu pasangan sehingga pasangan hanya bersifat biologis semata, tidak lebih daripada itu.²¹⁰

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 106-107

Surat al-a'raf ayat 19 :

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ [٧:١٩]

(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim".

Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*....., hlm. 152

Surat al-a'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ [٧:١٨٩]

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Lihat dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*....., hlm. 175

²¹⁰ Perhatikan misalnya firman Allah dalam surat al-Tahrim ayat 10-11 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ [٦٦:١٠]

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [٦٦:١١]

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga masing-masing pasangan mesti menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangannya. Pribadi yang memegang prinsip ini tidak akan menuntut yang lebih dari pasangannya, karena dia menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan yang akan membangun bahtera rumah tangga tersebut. Dengan prinsip ini akan tercipta apa yang disebut oleh *al-Qurân* dengan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (menerima satu paket).

Mu'âsyarah bi al-ma'rûf adalah perintah dalam *al-Qurân*, yaitu memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik dan menyenangkan. Allah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [٤:١٩]

suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Lihat dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*....., hlm. 561

Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s., kedua istri mereka dalam ayat tersebut disebut *imra'ah*, tidak disebut *zauj*, Demikian pula Asiah, istri Fir'aun. Hal ini terjadi karena istri kedua nabi tersebut telah berkhianat dan tidak sejalan mendukung dan membela dakwah dan perjuangan risalah suaminya sebagai nabi yang diutus oleh Allah swt. Fir'aun pun tidak sejalan dengan keimanan istrinya, Asiah. Fir'aun tetap angkuh dengan kekufuran dan menyombongkan diri, bahkan memproklamasikan dirinya sebagai tuhan. Jadi, hubungan mereka sebagai pasangan suami istri hanya sebatas pasangan dengan fungsi-fungsi biologis, yakni hanya sekadar melahirkan anak dan keturunan, tidak lebih.

Lain hal dengan Nabi saw. dan para istrinya, mereka merupakan pasangan ideologis dan biologis yang ideal, memiliki ikatan kuat dan harmonis. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu pun dari istrinya yang berkhianat, tidak ada satu pun yang tidak mendukung perjuangan dan dakwah Nabi saw. Seluruh istri-istri Nabi saw. sangat menyenangkan pandangannya karena kecintaan, ketaatan, kesetian, kepatuhan, dan pembelaan yang mereka tunjukkan secara nyata kepada pasangan hidup mereka, suami tercinta Nabi saw.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²¹¹

Salah satu yang perlu digarisbawahi dari ayat tersebut adalah kata *mu'âsyarah* (bergaul). *Al-Qurân* mengistilahkan hubungan suami isteri dengan kata *mu'âsyarah*, yang pada awalnya kata tersebut berarti pencampuran dan masuknya sesuatu ke sesuatu yang lain.²¹² Sesuatu yang telah bercampur tidak mungkin atau sangat sulit dipisahkan. Begitulah kehidupan suami isteri, perlu mempertahankan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* karena ikatan pernikahan bukan hanya diikat oleh faktor cinta, tetapi ada faktor lain, yaitu rahmat dan amanat.²¹³

Ibnu Katsir (w. 774 H) ketika menafsirkan ayat ini menyebut 'perbaguslah oleh kalian ucapan terhadap istri, sikap, dan penampilan sebisa mungkin sebagaimana kalian suka hal itu dari istri kalian'.²¹⁴ Nabi Muhammad saw. juga pernah bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي²¹⁵

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku

²¹¹ Lihat dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*..., hlm. 80

²¹² Lihat dalam Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqâyîs*...jil.IV, hlm. 264

²¹³ Baca M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*...hlm. 113

²¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-qurân al-'azhîm* (Riyadh : Dar al-Thayyibah, 1999), Juz. II, hlm. 242

²¹⁵ HR At-Thirmidzi no 3895 dari hadits Aisyah dan Ibnu Majah no 1977 dari hadits Ibnu Abbas dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 285).



adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku”

Hadits di atas, hadits yang sangat mulia. Sebuah hadits yang menunjukkan agar manusia bersikap mulia dan berlaku jujur. Begitu pula bagi seorang suami khususnya, karena ia sebagai pemimpin dan bertanggungjawab kepada keluarga. Menjadi keharusan, agar suami mencerna tingkat urgensinya.

Di antara akhlak Nabi saw., terkait *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, adalah Nabi saw. selalu riang gembira bergaul bersama para istrinya, bersenda gurau dan berlemah lembut dengan mereka, tidak pelit dalam hal nafkah—baik lahir maupun batin—serta sering membuat sang istri tersenyum dan tertawa. Setiap malam, seluruh istri Nabi saw. berkumpul di rumah istri yang mendapat jatah gilirnya, Nabi saw. makan malam bersama mereka, bercengkerama, dan bercanda ria sebelum tidur. Setelah itu, masing-masing kembali ke kamar.

Dalam potongan ayat surat an-Nisa : 19 disebutkan *فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا* *وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا* 'Jika ada hal yang tidak kalian sukai dari para istri, Allah tetap menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak." Dengan kata lain, seorang suami diminta bersabar jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari istrinya, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Seorang istri, sejatinya, telah mempersembahkan kebaikan yang banyak untuk suaminya (*khairan katsiraa*). Kebaikan yang banyak ini, menurut Ibnu Abbas yang dikutip oleh Muhammad Said Dasuki²¹⁶, adalah anak yang lahir dari rahim seorang istri. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan sang istri dengan penuh kasih

²¹⁶ Muhammad Said Dasuki, *Cinta*..... hlm. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang. Nabi saw. bersabda,

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرٌ²¹⁷

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak suka satu tabiat/perangainya maka (bisa jadi) ia ridha (senang) dengan tabiat/perangainya yang lain.”

Inilah yang disebut menerima satu paket dari pasangan masing-masing, menerima kelebihan sekaligus kekurangannya. Jangan gunakan pendekatan teori maksimal dalam menilai pasangan sebab maksimal hanya ada di surga. Realitas dunia memaksa seseorang menerima apa adanya, satu paket kelebihan sekaligus kekurangan dari pasangan masing-masing. Merasa bersyukur dan *qana'ah* (puas) terhadap apa yang Allah takdirkan—terkait jodoh dan pasangan hidupnya—adalah kunci kebahagiaan pasangan dan kelanggengan rumah tangga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pangkal segala perilaku baik berawal dari rumah. Ini karena rumah adalah tempat persinggahan sehari-hari, tempat pertemuan dengan istri dan anak-anak yang terjadi hampir setiap hari. Jika kebaikan perilaku, kelembutan perangai, kesantunan bahasa, dan kebaikan budi ada pada diri seseorang dalam rutinitas keseharian di rumahnya, dapat dipastikan bahwa hal yang sama akan terjadi di luar rumah. Oleh karena itu, cukup mudah menilai baik atau tidak kondisi seseorang, yakni hanya dengan mendapatkan informasi yang valid bahwa ia sangat baik terhadap anggota keluarganya dan

²¹⁷ HR. Muslim (no. 1469) kitab ar-Ridhaa', Ahmad (no. 8163).

mereka pun tenteram bahagia bersamanya. Jadi, cukuplah jika orang tersebut memenuhi kategori sebagai orang yang paling baik terhadap keluarganya.

Keluarga menjadi parameter utama kebaikan seseorang karena keluarga merupakan miniatur masyarakat.²¹⁸ Jika seseorang baik terhadap keluarganya, ia akan cenderung baik pula di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Kebalikannya *original* 'asli' dan tidak semu karena keaslian dalam hal kebbaikannya benar-benar tulus, jauh dari kepura-puraan. Dapat dipahami bahwa pernikahan adalah jenjang yang menentukan masa depan seseorang. Bila niatnya didorong motivasi agama, ada jaminan untuk meraih keluarga sakinah seperti diidam-idamkan setiap insan. Rumah tangga yang dibangunnya pun bagaikan sebuah ungkapan puitis, *baiti jannati*.²¹⁹

Bertemu pasangan hidup dan anak-anak setiap hari teruji untuk selalu bersikap sabar, ramah, lembut, serta menghindari amarah, emosi, dan lontaran

²¹⁸ Modernisasi dan industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan nilai kehidupan yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hidup masyarakat dari sosial religius cenderung ke arah individu materialistik;
2. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah konsumtif. Struktur keluarga *extended family* cenderung ke arah *nuclear family*, bahkan sampai *single parent family*;
3. Hubungan kekeluargaan (hubungan emosional ayah-ibu-anak) yang semula erat dan ketat (*family right*), cenderung menjadi longgar (*family loose*);
4. Nilai-nilai yang mendasar agama cenderung berubah ke arah sekuler dan serba membolehkan (*premisive society*);
5. Lembaga perkawinan (keluarga) mulai diragukan dan masyarakat cenderung memilih hidup bersama tanpa nikah;
6. Ambisi karir dan materi sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu interpersonal, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Lihat dalam Miftah Faridl. 2006. "*Merajut Benang Kaluarga Sakinah*" dalam jurnal Al-Insan No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan), hlm. 43

²¹⁹ Baca dalam Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata yang tidak terpuji. Sebaliknya, kebaikan dan keramahan seseorang di luar rumah bisa jadi karena kebutuhan karakter yang harus ditampilkan dengan kesan yang baik.

Hal ini bisa karena tuntutan profesi dan suasana lingkungan kerja yang menuntut "pamrih" sehingga celah untuk marah dan menunjukan perangai buruk di ruang publik menjadi tertahan oleh situasi dan keberadaan orang-orang tertentu di lingkungan kerjanya.²²⁰ Oleh karena itu, banyak fenomena yang seseorang dapat menunjukan perilaku yang baik dan kata-kata yang santun dengan orang lain di luar rumah, tetapi ia tidak dapat melakukan hal itu ketika berada di rumahnya sendiri. Ia merasa bisa berbuat dan berkata apa saja terhadap orang-orang di rumah. Ia baik hanya kepada orang lain, tetapi tidak kepada keluarganya sendiri.

Nabi saw. adalah pribadi yang integritas pada keluarganya tidak terbelah, Nabi saw. bukanlah tipe orang yang begitu halus dan lembut ketika berbicara dengan orang lain, tetapi kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Nabi saw. pun bukanlah sosok yang begitu perhatian dan peduli terhadap nasib orang lain, tetapi

²²⁰ Gaya hidup Barat yang menggemborkan kesetaraan gender dan pembelaan hak-hak wanita akan berpengaruh pada gaya hidup kaum wanita sebagai ibu rumah tangga dengan mencoba berkarir ganda di luar rumah. Bukan berarti karir ganda dilarang, namun tidak sedikit keluarga karir ganda ini mengakibatkan ketegangan dan krisis dalam keluarga dan tidak jarang yang berujung pada perceraian bahkan *broken home*. Ambisi karir ini mendorong istri untuk berkarir di luar yang akan mengakibatkan: *pertama*, suami sering mengeluh bahwa sejak istri turut bekerja dan berpenghasilan, dirasakan wibawa dirinya terhadap istri menurun karena istri telah belajar mandiri dan mengurangi ketergantungannya kepada suami; *kedua*, bagi istri yang berkarir dan berpenghasilan lebih tinggi dari pada penghasilan suami, dapat mengakibatkan rasa rendah diri pada suami dan menimbulkan rasa cemburu; *ketiga*, peran sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah dapat berbalik manakala suami tidak bekerja. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan rasa rendah diri, harga diri menurun, wibawa menurun di hadapan istri dan anak-anak berkurang, dan kendali kepemimpinan keluarga berpindah kepada istri. Lihat kembali Dadang Hawari. 1997. *Al-Quran...*, hlm. 231

lalai dan abai terhadap nasib keluarganya sendiri. Nabi saw. selalu konstan kebbaikannya, baik saat di rumah maupun di luar rumah.²²¹

Terkadang, dapat dimengerti mengapa sikap seseorang cenderung membaik terhadap orang lain. *Pertama*, karena tidak lama bersama orang tersebut. *Kedua*, karena ada kepentingan tertentu sehingga sikap dan kata-kata harus ditunjukkan sebaik mungkin. *Ketiga*, karena jarang bertemu atau baru pertama kali bertemu sehingga tidak ada hal-hal yang menguji kesabaran atau memancing emosi. Sebaliknya, hal berbeda ditunjukkan terhadap keluarga sendiri yang setiap hari kerap bertemu. Ada saja muncul berbagai persoalan yang akan menguji kesabaran dan kebaikan seseorang. Jika pada situasi ini seseorang tetap bertahan dengan kebaikan perangai dan tutur katanya, karakter kebbaikannya akan tampak asli dan jauh dari kepura-puraan, terutama karakter di luar rumah.²²²

Selain itu membeberkan masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kepada orang lain akan dapat memperkeruh suasana dan mengundang hasutan atau masukan-masukan yang belum tentu baik untuk persoalan yang sedang dihadapi. Karena omongan dari luar bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan setiap pasangan jika tidak dapat memilahnya dengan baik. Terlebih lagi rumah tangga tersebut akan menjadi bahan perbincangan bagi orang-orang sekitar. Cukup hanya pasangan suami-istri yang tahu tentang masalah yang sedang dihadapi.

²²¹ Muhammad Said Dasuki, *Cinta...* hlm. 111-112

²²² *Ibid*, hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis satu diantara dua hal²²³ yang sering terjadi dalam rumah tangga pada masa sekarang adalah konsentrasi anggota keluarga, (khususnya suami dan istri) hanya terfokus untuk mencari kesenangan dalam kehidupan perkawinan dari pada berpikir tentang tanggung jawab. Beberapa pasangan menikah apabila mereka sepakat untuk mencari kesenangan dan kenikmatan saja. Apabila kehidupan perkawinan tidak dapat memberikan apa mereka cari, mereka memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Ini menimbulkan erosi kesakralan lembaga perkawinan, sehingga perceraian sebagai konsekuensinya menjadi suatu hal biasa. Anak-anak yang lahir dari pasangan ini, sedikit lebih beruntung dari pada anak-anak yatim piatu, dimana mereka masih memiliki orang tua.

Sebagai alternative solusi terhadap realitas rumah tangga zaman sekarang ini nilai-nilai agama yang terhimpun di dalam teks-teks agama dijadikan dasar, sehingga kehidupan keluarga akan dapat bertahan. Selain itu yang harus dilakukan adalah mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai moral yang ada dalam masyarakat. Apabila prinsip dan nilai ini hidup, perubahan apapun yang terjadi tidak akan mampu mengendalikan masyarakat, karena di dalam dirinya sudah tertanam prinsip dan nilai tadi.²²⁴ Apalagi Islam yang *nota bene* kaya dengan nilai-nilai moral yang sangat tinggi, perubahan dan tantangan akan dapat diikuti

²²³ Hal lain yang sering terjadi adalah putusnya sistem keluarga besar yang utuh. Hal ini dapat ditelusuri dari adanya gejala-gejala meningkatnya jumlah orang tua bahkan kekek nenek lanjut usia yang dikirim ke panti jompo yang terpisah dari kehidupan keluarga mereka sendiri. Padahal dalam sistem keluarga besar, kekek nenek pasti ada untuk memperhatikan cucu-cucu mereka. Tetapi dalam budaya masyarakat modern, terlebih di barat tempat mereka bukan lagi di tengah-tengah keluarga. Baca dalam Imam Mustofa, (2008), *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal al-mawardi Edisi XVIII, hlm. 239

²²⁴ Lihat R. H. Tawney, dalam Lynn H. Miller. 2006. *Global Order: Values and Power in International Politics, (Agenda Politik Internasional)* alih bahasa Daryanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 155.

tanpa keluar dari koridor dan prinsipnya.

Islam telah menempatkan keluarga pada posisi dan kedudukan sangat penting dan strategis dalam pembinaan pribadi dan masyarakat. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat tergantung pada pembinaan dalam keluarga. Pembinaan keluarga ditujukan untuk melahirkan jalinan cinta kasih (*mawaddah war rahmah*). Jalinan cinta kasih atas dasar agama merupakan sumber utama kebahagiaan keluarga, sehingga memungkinkan setiap anggota keluarga mengembangkan kepribadiannya secara baik dan utuh. Karena itu, dalam pandangan ajaran Islam, kesamaan agama dan keyakinan suami istri merupakan hal yang mutlak.

Keluarga dalam pandangan Islam bukanlah sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi kehidupan keluarga sakinah salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah memperdalam dan mengintensifkan penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperdalam pendidikan agama terutama esensi disyariatkannya pernikahan.

Quraish Shihab menuturkan dalam bukunya.²²⁵ Ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Bashri—seorang tabi'iy besar—untuk meminta

²²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XVI; (Bandung: Mizan, 2001), hlm.397-398

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangannya. Dia berkata: "Ada dua orang yang datang melamar putriku, siapa yang kuterima? "Terimalah yang paling baik agamanya, karena jika ia senang kepada istrinya, pasti ia menghormati (memelihara)-nya; sedangkan bila ia membencinya, ia tidak akan menganiayanya," jawab Al-Hasan.

Seorang yang lain pernah mengeluh kepada 'Umar ibn Al- Khaththab bahwa cintanya kepada istrinya telah memudar dan ia bermaksud menceraikannya. 'Umar menasihati: "Sungguh jelek (niatmu). Apakah semua rumah tangga (hanya dapat) terbina dengan cinta? Di mana takwamu dan janjimu kepada Allah ? Dimana pula rasa malumu kepada-Nya ? Bukankah kamu sebagai sepasang suami istri, telah saling bercampur (menyampaikan rahasia) dan mereka (sitri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ?"²²⁶

Dapat dimaklumi bahwa faktor keberagamaan merupakan sesuatu yang urgen dalam membangun fondasi rumahtangga. Kedua kisah itu sebagai gambaran kekuatan fondasi bangunan kehidupan rumah tangga.

B. *Maqâshid al-Syarî'ah*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Maqâshid al-Syarî'ah*²²⁷

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ Dalam *al-muwâfaqât*, al-Syathibi membagi *maqâshid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qash al-Syâri'*) dan maksud mukallaf (*qash al-mukallaf*). *Qash al-Syâri'* adalah *maqâshid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah (***jalb al- mashâlih wa daf' al-madhorroh***) menarik kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan di akhirat.

Sedangkan *qash al-mukallaf* merupakan tujuan syariat bagi hamba (*mukallaf*) dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqâshid mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Kaidah berperan dalam *maqâshid mukallaf* adalah: *Maqâshid mukallaf* hendaklah selaras dengan *maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat. Lihat Abu Ishak

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi *al-Qurân* dalam tiga kelompok besar: *aqîdah*, *khuluqiyyah*, dan *‘amaliyah*. *Aqîdah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *‘amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwâl*) dan perbuatan-perbuatan (*af’âl*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.²²⁸

Al-Qurân selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.²²⁹ Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah swt. hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam *al-Qurân*. Dasar-daar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw. melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan sumber-sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan

al-Syathibi, *al-muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Juz. II (Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1424), hlm. 7

Dalam konteks ini *maqâshid* yang dimaksud ialah *maqâshid* atau tujuan yang ditetapkan oleh *Syâri'* dalam mensyariatkan hukum.

²²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.]), hlm. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurân* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001), hlm. 40.

²²⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7.

Jumlah ini bukanlah suatu yang disepakati. Ada beberapa pendapat tentang jumlah ayat hukum. Ibn al-‘Arabi menyebut jumlahnya lebih dari 800 ayat. Imam Al-Ghazali dan Ulama Ushul Syafi’iyah menyebut sekitar 500 ayat. Al-Shan’ani mengatakan sekitar 200 ayat. Sedangkan Ibn al-Qayyim mengatakan sekitar 150 ayat. Baca dalam Muhammad Sulaiman al- Fara, *Muqaddimah fi tafsîr âyât al-ahkâm wa manâhij al-mufasssirîn*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengaitkannya dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

Secara etimologi (bahasa), *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshad* dan *maqsud*²³⁰ yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²³¹ Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam *al-Qurân*. Ia bermakna mudah, lurus, dan sedang-sedang saja seperti kalimat dalam surat al-Taubah ayat 42,²³² pertengahan

²³⁰ Kata ini juga semakna dengan kata *qashdan*. Lihat Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abu al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi, *al-Mishbah al-Munîr fî Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, tth), hlm. 504-505., Syauqi Dhaif, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo : Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004), hlm. 738

²³¹ Kata *al-maqasid* berasal dari bahasa Arab sebagai *isim masdar mimi* yang diawali dengan huruf mim, asal kata kerjanya adalah *قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا*, lafadh ini secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa makna yaitu: *pertama, qasadtuhu, qasadtulahu* dan *qasadtul qasдахu* artinya aku mendatangi sesuatu atau seseorang, *kedua, qasadtul al-'uda qasdan* artinya aku mematahkan sebuah tongkat, *ketiga, taqasada al-kalbu wa ghairuhu*, artinya anjing dan sebagainya mati, *keempat, aqsada al-sahmu* artinya panah itu mengenai sasaran, *kelima, al-qasid* artinya kumpulan sajak atau daging kering, *keenam, bainana wa baina al-mai lailatun qasidah* artinya kami dekat dengan air, *ketujuh, fulanun muqtasidun fî al-nafaqah* artinya si fulan sederhana dalam memberi nafkah, *kedelapan, seperti kata seorang penyair (Abu Li'am at-Taghlibi atau Abdurrahman bin al-Hakam): “‘Ala al-hakami al-ma'ti yauman idha qada // qadiyyatahu an la yajura wa yaqsida* artinya seorang arbiter (penengah) jika mengadili hendaklah tidak menzalimi dan berlaku adil.”

Lihat dalam Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Al-Sihah Tajû al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah*, (Beirut, cet. 4, Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1990 M), hlm. 525; dan Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) Hlm. 178-179

Dari delapan makna *al-maqasid* secara etimologi, makna keempat lebih mendekati kepada maksud penggunaannya dalam penelitian ini yaitu yang artinya mengenai sasaran.

232

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْغُوكَ وَلَكِنْ بَغَدْتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۖ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ
[٩:٤٢]

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seimbang seperti kalimat dalam surat Fathir ayat 32,²³³ dan dengan makna lurus seperti kalimat dalam surat al-Nahl ayat 9,²³⁴ serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti kalimat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 19.²³⁵ Selain itu Ia juga bermakna tuntutan dan kesengajaan.²³⁶

Adapun *Syari'ah*²³⁷ secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan

"Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 194

233

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتِنُ اللَّهُ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ [٣٥:٣٢]

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 438

234

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [١٦:٩]

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 268

235

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَاعْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ [٣١:١٩]

Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 412

²³⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), hlm. 767. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 112

²³⁷ Kata *syari'ah* banyak terdapat dalam ayat al-Qur'an dengan beberapa bentuk *tashrif*, di antaranya adalah pada surah al-Maidah: 48 (dalam bentuk *syir'ah*), al-Syura: 13 (dalam bentuk *syara'a*) dan al-Jatsiah: 18 (dalam bentuk *syari'ah*), yang mempunyai arti *thariqah* (jalan), *sunnah* (jalan kebiasaan) dan *minhaj* (jalan yang nyata dan jelas). *Syir'ah* dan *syari'ah* memiliki makna yang sama. Tetapi jamak dari *syari'ah* adalah *syarai'u* dan jamak dari *syir'ah* adalah *syira'an*. Berdasarkan makna *lughawi* ini, pengertian syariat adalah pedoman yang harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi seperti mereka yang bepergian ke suatu tempat harus melalui jalan-jalan tertentu. Apabila jalan ini tidak dilalui, mereka akan tersesat. Demikian juga orang yang tidak melalui syariat, akan menemui

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²³⁸ Sedangkan menurut Yusuf Qaradhowi (lahir. 1926 M) dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu’jam al-Fadz al-Qurân al-Karim*” menjelaskan bahwa kata Syariat berasal dari kata *Syara’a*, *al-syari’a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir’ah* dan *syarî’ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²³⁹

Kesamaan syariat dengan arti bahasa *syarî’ah* yakni jalan menuju sumber air

kebuntuan dalam meraih kebahagiaan.

Baca lebih lanjut Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma’ wa al-Lughat*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H), hlm. 153; dan Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, juz X, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), hlm. 384.

²³⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.]), hlm. 175. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syariah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61

Syarî’ah secara literal berarti sumber air, jalan, atau jejak langkah. Istilah *Syarî’ah* pada mulanya mengacu kepada ajaran Islam secara keseluruhan, baik bidang akidah, hukum, dan moral (*akhlâq*). Pengertian demikian diambil dari makna ayat QS. al-Syûrâ (42): 13 dan QS. Al-Jâsiyyah (45): 18. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu mengalami penyempitan makna sebatas ajaran agama yang menyangkut hal-hal lahiriah (eksoterik), sehingga pengertian *Syarî’ah* menjadi identik dengan fiqh (hukum Islam), kendati keduanya memiliki perbedaan kecil. Sementara itu pengertian fiqh sendiri juga mengalami penyempitan makna dari pemakaian istilah semula (secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian) memiliki makna pemahaman terhadap ajaran agama secara keseluruhan. Pengertian demikian berakar dari ekspresi al-Quran (QS. al-Taubah [9]:122). Singkatnya, *Syarî’ah* berbeda dengan fiqh. *Syarî’ah* adalah kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal, tetapi fiqh merupakan hasil upaya manusia memahami Kehendak Tuhan tersebut. Dalam pengertian ini, *Syarî’ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara fiqh hanyalah upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan *Syarî’ah* (*maqâsid al-Syarî’ah*). Menurut *fuqahâ*, tujuan *Syarî’ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq mashâlih al-ibâd*), dan tujuan fiqh adalah untuk memahami dan menerapkan *Syarî’ah*.

Tentang karakteristik *Syarî’ah* lihat al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî’ah*, ‘Abd Allâh Darrâz, ed. (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 29, 44-53, 104 dst., Syams al-Dîn Abî ‘Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Alamîn*, Sidqî Muhammad Jamîl al-‘Attâr, ed. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Jilid II, hlm. 3.

²³⁹ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, hlm 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti syariah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah swt. menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁴⁰

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syariah²⁴¹ merupakan *al-nushûsh al-muqaddasah*, dari *al-Qurân* dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tharîqah al-mustaqîmah*.²⁴² Muatan syariah dalam arti ini mencakup ‘*amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.²⁴³

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisyuni (lahir. 1953 M) menyatakan bahwa syariah bermakna sejumlah hukum ‘*amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum lainnya.²⁴⁴ Oleh Mahmud Syaltut (w. 1383 H /1963 M), syariah diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt. untuk dipedomani manusia

²⁴⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hlm.2-3

²⁴¹ Sedangkan *syari'ah* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah adalah:

الأحكام التي كلفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والجزاءات

Hukum-hukum yang dibebankan oleh Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah swt. yang berupa wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

Lihat dalam Al-Nawawi al-Jawi, *Muraqi al-'Ubuliyah*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 4

²⁴² Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

²⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid* , hlm. 61-62.

²⁴⁴ Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqâshidi qawâ'iduhu wa fawâiduhu*, (Ribath : Mathba'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baidha', 1999), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”²⁴⁵ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri dalam penelitiannya mengatakan, bahwa syariah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”²⁴⁶

Setelah memahami makna kedua kata ini secara terpisah, gabungan kata *al-maqâshid al-syarî'ah* sudah menjadi sebuah kata dan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya, sehingga untuk memberikan definisinya harus digabung.²⁴⁷ Abdul Aziz bin Abdurrahman mendefinisikan *al-maqâshid al-syarî'ah* adalah setiap kemaslahatan hamba, baik umum maupun khusus yang dipelihara oleh Allah di dalam mensyarî'atkan berbagai hukum atau memelihara hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan baginya atau dapat

²⁴⁵ Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

²⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, hlm. 63

²⁴⁷ Dalam literatur salaf, tidak ditemukan definisi secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah*. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut-sebut sebagai “Sang Bapak *maqâshid al-syarî'ah*” tidak pernah menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang dalam karyanya *al-Muwafaqat* terkait ilmu maqashid sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definis *maqâshid al-syarî'ah* sendiri.

Sekalipun pemaknaan secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah* tidak bisa ditemukan dalam literatur-literatur terdahulu (salaf), namun terma tentang maqashid yang berupa teori-teori awal aplikasinya bisa terdeteksi secara jelas. Dalam kurun waktu tiga abad dari abad ke-3 sampai abad ke-5, ide maksud/sebab (hikmah, illat, atau makna) tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam madzhab tradisional, seperti penalaran melalui qiyas, istihsan dan pertimbangan kemaslahatan.

Kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah* belum menjadi subjek (topik) karya ilmiah tersendiri atau menjadi perhatian khusus hingga akhir abad ke-3. Kemudian perkembangan teori “tingkatan” keniscayaan oleh Imam al-Juwaini (w. 438 H) terjadi lebih lama, yaitu pada abad ke-5 H. Berikut ini adalah usaha melacak konsepsi-konsepsi maqashid awal antara abad ke-3 dan abad ke-5. Baca Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Mizan Media Utama, Bandung, hlm. 46-49.

menghindarkannya dari kemudharatan.²⁴⁸

Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah swt. yang disyariatkan kepada umat manusia. Dalam makna ini, bukan hanya istilah *maqâshid al-syarî'ah* yang lazim digunakan. Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqâshid al-syâri'* dan *al-Maqâshid al-syar'iyah*.²⁴⁹

Istilah *maqâshid al-syarî'ah* dalam sejarahnya dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-syâthibi (w. 790 H) –walaupun istilah *maqâshid* secara eksplisit lahir di tangan al-Hakim al-Tirmizi (w. 320 H)²⁵⁰-. Al-syâthibi dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II mengungkapkan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين الدنيا معا²⁵¹

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah swt. dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

Sedangkan secara terminologis, makna *maqâshid al-syarî'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan

²⁴⁸ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *Ilmu Maqasid al-Syari'*, (Riyadh, Maktabah Raja Fahd, 2002 M), hlm. 21.

²⁴⁹ Ahmad Raysuni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syathibi* (Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1995), cet,4, hlm. 17

²⁵⁰ Lihat dalam Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharat fi Maqâshid al-Syar'iyah*, cet.I, hlm. 60

²⁵¹ Al-Syatibi, *Muwaffaqat* juz II, hlm. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ulama klasik sebelum al-syâthibi (w. 790 H), belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *maqâshid al-Syarî'ah*.²⁵² Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bunani (lahir. 1956 M) memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi (w. 772 H/1370 M) mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi (w. 983 M) menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali (w. 505 H/1111 M), al-Amidi (w. 631 H) (w. 1233 M) dan al-Hajib (w. 1249 M) mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqâshid al-syarî'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.²⁵³

²⁵² Menurut Ibrahim Abdurrahim, banyak ulama kontemporer (semisal al-Raisuni, Nuruddin al-Khadimi, dll), setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks *turâts*, mereka menyimpulkan bahwa ulama salaf, termasuk al-Syathibi, belum mendefinisikan Maqashid Syariah secara jelas dan *jâmi'an-mâni'an* (konprehensif-protektif). Mereka sebatas mengungkapkan *maqâshid* dengan istilah-istilah singkat dan berbeda-beda seperti: *al-hikmah*, *al-mashâlih*, *al-aghradh*, *al-ghâyah*, *al-asrâr*, *al-al-ahdâf*, dsb, yang pada dasarnya menunjukkan maksud yang sama yaitu Maqashid Syariah.

Sementara menurut beberapa peneliti Maqashid Syariah kontemporer lainnya seperti: Ahmad Fayati dalam bukunya *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm Malik*, Bin Zaghibah Izzuddin dalam bukunya *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah* dan Jamaluddin Athiyah bahwa *maqâshid* sudah mulai didefinisikan sejak di tangan al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ* dan *Syifâ' al-Ghlâil*-nya idem al-Syatibhi dalam *al-Muwâfaqât*-nya. Baca dalam Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbang Pemikiran Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*, (Mesir : anNahdla Press, 2016), hlm. 5

²⁵³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqâshid al-Syariah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) Hlm. 180.

Yusuf Qaradhawi membedakan antara pengertian *maqashid* dan 'illat sebagaimana juga disebutkan oleh ahli ushul dalam pembahasan qiyas. Para ulama ushul memberi pengertian bahwa 'illat adalah sifat yang tampak dan terbatas yang sesuai terhadap hukum, 'illat adalah sebab adanya hukum dan bukan tujuan (*maqshad*) adanya hukum. Seperti 'illat tentang *rukhsah* dalam bepergian seperti *mengqashar* dan *menjama'* shalat, berbuka saat puasa ramadhan, 'illat dari *rukhsah* tersebut adalah bepergian dan bukan *masaqqah* yang timbul bagi musafir saat bepergian. *Masaqqah* tersebut dinamakan hikmah bukan 'illat. Para ulama tidak menghubungkan hukum dengan hikmah karena sulit membatasi pengertian hikmah.

Adapun Yusuf Qaradhawi lebih condong menghubungkan hikmah dengan beberapa hukum jika hikmah tersebut jelas dan berpendapat bahwa kemungkinan *maqashid* bisa dinamakan hikmah *syariat* dalam arti 'illat yang tidak terlihat di luar hukum. Dari itu tidak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya tentang pengertian *maqashid* seperti yang dipaparkan oleh Raisuni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun makna *maqâshid al-syarî'ah* secara istilah menurut al-Kurdi (lahir. 1357 H) adalah:

المعاني التي شرعت لها الأحكام²⁵⁴

yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*.

Sedangkan menurut Imam al-syâthibi (w. 790 H) *maqâshid al-syarî'ah* adalah:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والأجل معا²⁵⁵

Dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang

bahwa *maqashid asy-syariah* adalah manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini *maqashid* atau objek yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum. Istilah populer yang digunakan ialah *maqashid syariah*, *maqashid al-syari'* (Allah) dan *maqashid syara'*.

Maqashid bisa diartikan sebagai hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan pokok dalam pensyariatan hukum-hukum, pensyariatan beberapa *fardhu*, pensyariatan *halal*, pensyariatan *haram*, pensyariatan *had-had*. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan tersebut dapat diketahui dari *zhahir nash* yang bersifat *sharih* (jelas). Hanya saja, *nash* tidak mencakup semua tujuan dasar dari ketentuan hukum. Baca Yûsuf al Qardhâwî, *Dirasah Fi Fiqhi maqashid syariah*, (Maktabah Wahbah). hlm. 21

²⁵⁴ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

²⁵⁵ Tujuan syari' dalam meletakkan hukum-hukum syari'at hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak secara bersamaan. Lihat Al-'Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah swt. memiliki *maqâshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²⁵⁶

Definisi *Maqâshid al-syarî'ah* oleh ulama kontemporer yang paling masyhur dan representatif adalah sebagai berikut:

Ibnu Asyur (w. 1973 M) : Ibnu Asyur (w. 1973 M) membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua: *'âmmah* (umum) dan *khâsshah* (khusus). Dan masing-masing memiliki definisinya.

Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث
لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة²⁵⁷

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah.

Definisi Ibnu 'Asyur diatas mengarah pada arti *Maqâshid al-syarî'ah* secara umum (*Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah*:). Dalam bukunya tersebut, Ibnu 'Asyur mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibnu 'Asyur dalam kitab yang sama, ia memberikan definisi untuk arti

²⁵⁶ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syariah*..... hlm 5 dan 167

²⁵⁷ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I hlm.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqâshid al-syari'ah secara khusus dengan bahasa:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة²⁵⁸

Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus.

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syariat secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari'at nikah, menghindari dampak konflik pasangan suami isteri yang berkelanjutan dalam syariat talak dan lain sebagainya.

'Allal al-Fasi (w. 1394 H/1974 M): ia mendefinisikannya dengan definisi yang meliputi dua elemen *maqâshid* sekaligus ('*âmmah* dan *khâssah*)

المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه²⁵⁹

Maqâshid al-syari'ah adalah : tujuan syariah (menunjukkan maqâshid '*âmmah*), dan rahasia-rahasia yang diletakkan Tuhan pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah (menunjukkan Maqâshid *khâssah*).

²⁵⁸ Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran.....* hlm. 6

²⁵⁹ 'Allal al-Fasi, *Maqâshid al-syariah al-Islamiyah wa Makârimuha*, (Mesir : Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. V, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi al-Fasi ini mengakomodir arti *maqâshid al-syarî'ah al-'Ammah* dan *maqâshid al-syarî'ah al-khâssah* yang ditawarkan Ibnu 'Asyur di atas. Tidak hanya itu al-fasi juga membeberkan secara riil cakupan dari *maqâshid al-syarî'ah al-'Ammah* dengan penjelasan beliau:

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi”.²⁶⁰

Ahmad al-Raisuni (lahir 1953 M):

مقاصد الشريعة هي : الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد²⁶¹

Maqâshid al-syarî'ah adalah: tujuan-tujuan dimana syariah diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba.

Pada hakikatnya definisi ini merujuk kepada ta'rif al-Fasi, hanya saja perbedaannya, Raisuni menghapuskan frasa terakhir yang menunjukkan objektif khusus.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaily (w. 2015 M) dalam karyanya yang masyhur, *Ushul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai berikut:

²⁶⁰ Ibid.,

²⁶¹ Nuruddin al-Khadimi, *'Ilm Maqâshid al-syariah* (Riyadh : Maktabah al-Ubaikan, 2001), cet. I, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان²⁶²

“Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ dalam setiap hukum”.

Menurut Satria Effendi M. Zein (w. 2000 M)²⁶³, *maqâshid al-syarî’ah* adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qurân* dan hadis sebagai alasan

²⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dar al-Fikr, jilid 2, 1996, hlm. 1017.

²⁶³ Satria Effendi Muh.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu’ wa Dilalatuhi ‘ala al-Ahkam*”, sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah swt, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas *Syariah* IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas *Syariah* IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan *Syariah* Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma’ al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam(OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: “*Fikih Umar bin Khattab*”, dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, “*Elastisitas Hukum Islam*”, dalam buku *Metode Mempelajari Islam*, 1992, “*Fikih Mu’amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia)*”, dalam buku *Aktualisasi Pemikiran Islam*, “*Wawasan al-Qurân tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*”, dalam buku *al-Qurân – IPTEK dan Kesejahteraan Umat*, “*Metodologi Hukum Islam*”, dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional*, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, baca Satria Effendi M.Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas *Syariah* & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁶⁴

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah*²⁶⁵, para ulama *ushul* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.²⁶⁶ Ini bertarti bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan yang ingin diwujudkan *al-Syâri'* bagi hamba-hamba-Nya melalui pensyariatan berbagai hukum. Kemaslahatan itu sendiri dapat diperoleh dengan cara mengerjakan suatu perbuatan yang bermanfaat, atau meninggalkan perbuatan yang berbahaya (*mudharat*).²⁶⁷

Maqâshid al-syarî'ah ini bisa jadi berupa *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah*, yakni yang meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqâshid al-syarî'ah al-khâshshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqâshid al-syarî'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau

²⁶⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

²⁶⁵ Dari beberapa definisi *maqâshid al-syar'iyah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *maqâshid al-syar'iyah* bisa diidentikkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu *maqâshid al-syâri'* dan *maqâshid al-tasyri'*. Apabila ditinjau dari istilah *al-Syari'* (Allah), *al-syari'at* (hukum-hukum Allah) dan *al-tasyri'* (proses pensyari'atan hukum) maka akan nampak aspek perbedaan ketiganya. Namun, substansi yang terkandung dalam ketiga istilah ini adalah sama yaitu pengimplementasian (pemenuhan) kemaslahatan dan pengeliminasian (penghapusan) kemudahratan.

²⁶⁶ Hal ini sejalan dengan definisi *maqâshid al-syariah* yang dikemukakan oleh Yûsuf Hamid al-'Âlim: "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian. Lihat, Yusuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syariah al-Islâmiyyah* (Riyadh: al-Dâr al-'Âlamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi dan Ill, 1994), hlm. 79

²⁶⁷ Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti dari *maqâshid al-syarî'ah* mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqâshid al-syarî'ah al-'Âmmah*) atau secara khusus (*maqâshid al-syarî'ah al-Khashshah*). Baca dalam W Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh ...* hlm. 1017.

maqâshid al-syarî'ah al-juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²⁶⁸

Mustahil Allah swt. menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia. Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M) berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyariaan hukum yang telah ditetapkan Allah swt. adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (*dharûriyyat*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyat*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).²⁶⁹

Mashlahah merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari. Secara etimologis, *mashlahah* mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.²⁷⁰ Pada tataran substansinya boleh dibilang bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madharat*).

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan kemudian kajian teori *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum Islam menjadi hal yang sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum

²⁶⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*hlm. 183. Lihat juga Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm al-'Izz bin 'Abd al-Salâm*, hlm. 87

²⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Millah, 1978), hlm. 197

²⁷⁰ Said Ramadhan al Buthi, *Dhawabith al mashlahah*, (Beirut: Muassasah alRisalah, tt), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, hukum Islam yang sumber utamanya (*al-Qurân* dan *sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Keadaan ini baru bisa dirasakan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqâshid al-syarî'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁷¹

Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M), menyatakan bahwa *nash-nash* syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan hukum).²⁷² Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbâth* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.²⁷³

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt. dalam *al-*

²⁷¹ Baca lebih jelas dalam Ghofar Shidiq, *Teori maqâshid al-syarî'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, vol.XLIV, no.118, Juni-Agustus 2009.

²⁷² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), hlm. 198

²⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qurân, begitu pula suruhan dan larangan Nabi saw. dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Allah swt. tegaskan dalam beberapa ayat *al-Qurân*, di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [٢١:١٠٧]

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" ²⁷⁴

Mengeni ayat ini, al-Maraghi (w. 1371 H/1952 M) menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat serta membawa syari'at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak dapat memperoleh kemaslahatan tersebut, karena mereka berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, tidak menerima rahmat ini, tidak bersyukur dengan nikmat ini, lalu mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. ²⁷⁵

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Esensi maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Akal dapat mengetahui dan memahami motif di

²⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ... hlm. 331

²⁷⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*...juz.17, hlm. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balik penetapan suatu hukum karena berorientasi kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt. atau dengan jalan rasionalisasi. Seperti suruhan Allah swt. untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam ayat berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
[١٣:٢٨]

" (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah swt. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram".²⁷⁶

ثَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [٢٩:٤٥]

" Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (al-Qurân) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar".(QS Al-'Ankabut:45)

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syâri'* (pembuat syariat) dan akupun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Muatan *maqâshid al-syarî'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarî'ah*. Ia

²⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ...hlm. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan bahwa syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁷⁷ Jadi, pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqâshid al-syarî'ah* adalah hikmah dan 'illah²⁷⁸ ditetapkan suatu hukum.

²⁷⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth.), hlm. 6

²⁷⁸ 'Illah dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* dan 'Illah yang digunakan al-qiyâs berbeda. *Ta'lil Ushûliy/ta'lil qiyâsi* disyaratkan bersifat jelas (*zhahir*) dan spesifik (*mundhabit*), dan diorientasikan untuk dikiaskan, bukan untuk menggali makna yang dituju (*al-ma'na al-maqshûd*). Semisal dalam riba, 'illah yang dipergunakan adalah faktor makanan, makanan pokok, timbangan, atau ukuran, dan sifat-sifat ini dipergunakan untuk mencetuskan hukum. Tentu sangat berbeda jika diperbandingkan dengan 'illah dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* yang berorientasi pada hikmah hukum atau motifnya, dan dipergunakan untuk menggali tujuan hukum, bukan mencetuskan hukum.

Ada dua hal yang membuat perbedaan mendasar antara 'illah *maqâshid al-syarî'ah* dan *al-qiyâs*. Pertama: 'illah *maqâshid al-syarî'ah* sejatinya memperhatikan hukum melalui hikmah dan makna yang tersirat/nilai, tanpa mempertimbangkan kejelasan makna atau spesifikasi makna 'illah, sebab ia hanya sebatas menelisik dampak hukum. Bukan untuk menyandingkan hal yang bersifat parsial untuk dianalogikan dengan yang lain dalam pencetus hukum layaknya yang dilakukan ulama usul fikih dalam *al-qiyâs*. Bisa dikatakan, 'illah dalam *maqâshid al-syarî'ah* adalah 'illah hakikat. Semisal hukum riba, *maqâshid al-syarî'ah* berfungsi menggali nilai hikmah dan makna yang tersirat dari pengharaman riba sehingga merengkuh motif utama dari hikmah dan makna tersebut yang berujung pada *hifzh al-mal* (menjaga harta). Sedang 'illah yang dipakai adalah: riba dapat menghalangi kesetaraan hak sesama, dan menimbulkan sifat individualistik dan ketamakan. Maka hikmah atau nilai yang menjadi motif utama adalah *hifzh al-mal*. Sedangkan dalam teori *al-qiyâs*, 'illah yang dipakai adalah sifat terbatas dari hal-hal yang dihukumi riba, semisal faktor makanan, makanan pokok, timbangan, dan ukuran. Dan sifat-sifat tadi diproyeksikan sebagai 'illah yang melandasi hukum, bukan nilai hikmah, atau makna tujuan dari hukum.

Kedua: *ta'lil* dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* menggunakan cara pandang secara umum (*ijmâliyy*), dan tidak mempertimbangkan hal-hal parsial yang beragam. Melalui *view* tersebut, maka *ta'lil* dalam *maqâshid al-syarî'ah* bisa menyentuh hal-hal yang tidak tergapai oleh *ta'lil* versi *al-qiyâs*. Sebagai bukti, *ta'lil* kepunyaan *maqâshid al-syarî'ah* dapat menyentuh nilai seluruh ibadah dengan gambaran 'illah *ijmâliyy*-nya bahwa ibadah secara keseluruhan disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena *ta'lil* versi *maqâshid al-syarî'ah* bersifat *ijmâliyy*, maka ia tak bisa menjawab sebagian besar hal yang bersifat rinci (*tafshili*) dari ibadah, semisal: mengapa puasa wajib di bulan ramadhan? Dan mengapa puasa diawali dari saat fajar menyingsing, dan diakhiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam kajian ushul fiqh, hikmah²⁷⁹ berbeda dengan ‘*illat*. ‘*Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zhahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.²⁸⁰

Kemaslahatan dianggap sangat penting kaitannya dengan upaya dinamika dan pengembangan hukum karena sebagai sesuatu yang terhubung dengan nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah swt. kepada manusia. Dengan demikian, istilah *mashlahah*²⁸¹ identik dengan istilah filsafat hukum

oleh surutnya matahari ? Baca lebih jauh Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran.....* hlm. 81-82

²⁷⁹ Sedangkan filsafat dan hikmah memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya terletak pada asal-usul pemakaian kedua terma tersebut. Menurut Juhaya S. Pradja, filsafat berasal dari Yunani yang pada masanya belum muncul agama (Katholik) sehingga dalam perjalanannya tidak berangkat dari suatu keyakinan akan adanya Tuhan maupun akhirat. Kemudian, kata itu pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Adapun istilah hikmah berkembang setelah Islam muncul, sebagaimana di dalam *Al-Qur’an* dijumpai ayat-ayat yang menerapkan kata hikmah.

Dalam perkembangannya, istilah filsafat masuk dunia gereja dan mendapat pengaruh gerejani. Istilah filsafat dapat dikatakan berbau Barat, baik yang menjurus ke *theis* maupun *atheis*, sedangkan hikmah merupakan istilah khas Islam yang secara pasti menjurus pada *monotheis*. Oleh karena itu dalam perspektif tersebut, hikmah lebih tinggi daripada filsafat. Kesimpulannya adalah, hikmah sebagai filsafat yang berkembang dan digunakan terus-menerus oleh para ulama, sehingga mujtahid dan fuqaha dapat disebut sebagai para filosof besar dalam bidang hukum Islam. Baca Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Yayasan Piaara, 1987), hlm 5—6

²⁸⁰ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu.....* hlm. 65

Lebih lanjut bisa dikatakan bahwa ungkapan bahasa Arab menggunakan *mashlahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang berisi manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud menunjuk dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain. Baca lebih lanjut Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1143. Dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

²⁸¹ Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*)

Islam. Memperdalam kajian filosofis ini, Fathurrahman Djamil menyebut bahwa, ”Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut relativitas kadar kemampuan manusia.”²⁸²

‘*Illah*’²⁸³ merupakan pertanda (*madzinnah*) adanya hikmah. Hikmah

dengan jama’nya *mashalih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il *shalaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Baca lebih lanjut Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul...*, hal. 250 dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 53, Ibn Mandzur al-Afriqiyy, *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348. Dalam Kamus Bahasa Indonesia *mashlahah* maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hlm. 635

²⁸² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 68

²⁸³ Secara etimologi ‘*Illat* dalam kajian ushul fiqhi berarti sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang lain. Oleh sebab itu penyakit disebut ‘*illat*, karena dapat mengubah kondisi fisik si penderita dari kuat menjadi lemah. Baca 7 Ibnu Manzur, *lisanul arab*, jilid ke-4, hlm. 3069. *Ensiklopedi hukm Islam*, hlm. 696

Terdapat perbedaan redaksi ulama ushul fiqh dalam mendefinisikan *illat*. Jumhur ulama Hanafi, hambali dan al-Baidawi mendefinisikan ‘*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan suatu hukum. Artinya ‘*illat* sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum, misalnya sifat memabukkan merupakan ‘*illat* minuman khamar, maka memabukkan adalah tanda hukum keharaman khamar.

Menurut Imam al-Gazali (tokoh mazhab Syafi’i) ‘*illat* adalah sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan karena perbuatan Syari’. Menurutnya ‘*illat* itu bukanlah hukum, tetapi merupakan penyebab adanya hukum ; dalam artian adanya ‘*illat* menyebabkan munculnya hukum. Lihat *Ensiklopedi hukm Islam*, hlm. 696

Kedua definisi ini sesungguhnya tidak berbeda, hanya al-Gazali menekankan bahwa pengaruh ‘*illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya, melainkan harus karena adanya izin Allah swt. Namun demikian kedua definisi ini sepakat bahwa hakekatnya bukan sifat itu yang secara langsung mempengaruhi hukum akan tetapi sifat itu berpengaruh berdasarkan kehendak *syâri*’. Seperti *syâri*’ menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, disebabkan perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi hukuman potong tangan itu pada hakekatnya adalah kehendak Allah swt. bukan semata-mata karena perbuatan mencuri.

Berbeda dengan Mu’tazilah (aliran teologi Islam yang liberal dan rasional), menurut mereka ‘*illat* adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah. Menurut mereka ‘*illat* itulah yang menyebabkan hukum itu disyaria’tkan. Oleh karena itu hukum itu tidak tergantung pada *syâri*’ tetapi pada ‘*illat*. Contohnya; pembunuhan secara disengaja secara logika menjadi penyebab seseorang itu diqisas, dalam hal ini tidak perlu campur tangan *syâri*’ karena secara logika saja dapat dipahami. Maka Allah wajib menetapkan hukum qisas bagi pembunuh agar menghindari kemafsadatan dan untuk mencapai kemaslahatan. Lihat *ibid*, hlm. 697

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwa apabila disebut dengan ‘*illat*, yang dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi atau secara implisit terdapat dalam ‘illah, sehingga tersistem dalam teori bahwa tidak mungkin ditemui hikmah bila tidak ada ‘illah. Di samping itu, ‘illah merupakan dasar perbuatan. Tanpa hikmah, suatu hukum dianggap tidak berasal dari kebenaran yang tersembunyi. Hasbi al-Shidiqqiy (w. 1975 M) menjelaskan bahwa, sebenarnya pencarian hikmah melalui ‘illah, merupakan refleksi kebijaksanaan melalui perantara ilmu dan akal (*al-Hikmat, ishâbatu al-haqqi bi al-‘ilmi wa al-‘aqli*).²⁸⁴ Dengan demikian, *mashlahah* berupaya sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu keselarasan, yang dalam bahasa filsafat hukum Islam disebut dengan hikmah.²⁸⁵

adalah; *Pertama*; hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. *Kedua*; sifat zahir yang dapat diukur sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan, baik berupa manfaat bagi manusia maupun menolak mafsadat. Pengertian “sifat yang zahir” adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia. Sedangkan “bisa diukur” adalah berlaku umum untuk setiap individu. Baca lebih lanjut Huderl Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1988), hlm. 298.

²⁸⁴ Teungku Muhammad Hasbi al-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 11

²⁸⁵ Kata hikmah mempunyai beberapa pengertian, tergantung siapa yang mendefinisikan sesuai dengan jenis keilmuan atau konsentrasinya. Antara lain; Secara bahasa hikmah : Adil. Lihat Ibnu Manzur, *Lisan.....*hlm. 953. Kata hikmah secara bahasa berarti keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Lihat *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta ; PT. Intermedia, 2006), hlm.550.

Sementara menurut M. Hasbi al-Sidiqy hikmah itu adalah makrifat yang paling bernilai tinggi dan orang yang bersifat dengan hikmah yang dikatakan hakim adalah orang yang paling bernilai. Lihat kembali M. Hasbi al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 20..

Dalam *al-Qurân* kata hikmah dan turunannya (bentuk lain dengan asal kata hikmah) digunakan pada 36 ayat, dan khusus menggunakan kata hikmah saja terdapat dalam 20 tempat. Kata hikmah secara bersamaan dipakai dengan kata *al-kitab* sering dinyatakan sebagai suatu pemberian; QS: 2; 129 dan 231 QS: 3: 81, QS: 4: 54 dan 113, dan QS: 33: 34. Hikmah dianugerahkan kepada nabi Daud AS, Isa AS, Muhammad saw. bahkan kepada Lukman (QS. 2:151, 251, QS. 5: 110, QS. 31: 12, QS. 38: 20 dan QS. 43: 63). Hikmah merupakan anugerah besar (QS. 2; 269) dan hikmah dihubungkan dengan pemurnian (QS. 2: 129). Baca Sukmadjaja Asyarie-Rosi Yusuf, *Indeks al-Qurân*, (Bandung : Pustaka, 2006), cet. VI, hlm. 69 dan Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 35.

Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam *tafsir al-Manar* mengatakan :

الحكمة : العلم الصحيح و يكون صفة محكمة بالنفس حاكمة على الإرادة توجهها إلى الفعل

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keselarasan atau hikmah²⁸⁶ ini hanya dapat diketahui melalui kejelasan teori

mashlahah yang digunakan. *Mashlahah* sendiri secara teoritis, menduduki posisi-

Hikmah adalah pengetahuan yang benar, dan dia itu merupakan sifat yang kokoh pada diri seseorang lagi menguasai iradat, dan menghadapkan iradat – iradat itu pada pekerjaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia hikmah memiliki beberapa pengertian: 1. kebijaksanaan (dari Allah), 2. Kesaktian, 3. Manfaat = makna yang dalam, seperti ; nasehatnya penuh hikmah.

Hikmah menurut ilmu filsafat seperti yang dikemukakan oleh Phitagoras (580 – 500 SM), hikmah adalah kebijaksanaan. Hal ini hanya terdapat pada Tuhan, manusia dipandang mulia apabila dia mencintai dan bersungguh-sungguh dalam mencari hikmah. Dengan demikian, walaupun manusia memilikinya, hal itu adalah anugerah dari Tuhan sehingga dia mampu melihat kebenaran terhadap apa yang tepat pada segala sesuatu.

Menurut ahli sufi hikmah adalah kebijaksanaan, suatu pengetahuan tentang esensi, sifat, kekhususan, dan hasil dari segala sesuatu sebagaimana adanya, melalui study tentang cara, akibat, dan kegunaannya. Mereka menyebut empat macam kebijaksanaan yang diekspresikan dalam istilah hikmah yaitu; (1). *Al-Hikmah al-Mantuqah* (kebijaksanaan menurut bunyi lafalnya) yakni pengetahuan dalam *al-Qurân* atau dalam *tariqah*, (2). *Al-Hikmah al-maskutah* (kebijaksanaan yang tidak menurut bunyinya) yakni hanya dipahami sufi, tidak oleh orang biasa.(3). *Al-Hikmah al-Majhulah* (kebijaksanaan yang tidak diketahui) yaitu perbuatan Allah yang tidak diketahui makhluk, seperti kematian anak kecil, pembakaran api neraka, atau segala sesuatu yang dipercayai tetapi tidak bisa dipahami. (4) *al-Hikmah al-Jami'ah* (kebijaksanaan kolektif), yaitu pengetahuan tentang yang hak dan pelaksannannya, serta persepsi tentang yang batil dan penolakan terhadapnya.

Bagi sufi, hikmah dapat mensucikan jiwa dari kotoran tabi'at yang zalim, apabila telah mengetahui hikmah jiwa akan senantiasa rindu kepada alam roh tanpa kecendrungan terhadap syahwat jasmaniah yang mematikan jiwa yang hidup, dan lulus dari pengaruh serta belenggu syahwat yang mengikat orang yang tidak mengetahui hikmah. Sedangkan kata hikmah digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) untuk menyatakan manfaat suatu perbuatan dan rahasia hukum perbuatan tersebut.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy : hikmah adalah ;

الحكمة :إصا به الحق بالعلم والعقل

Hikmah ialah memperoleh kebenaran dengan perantaraan ilmu dan akal.

Sedangkan secara istilah hikmah menurut ulama ushul fiqh adalah suatu motivasi dalam *pensyariatan* suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan. M. Hasbi al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 20

²⁸⁶ Kata hikmah bagi *fuqaha* adalah sinonim dengan kata *asraral- ahkam* (rahasia-rahasia hukum). Penggunaan kata hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat. Filsafat artinya kebijaksanaan, dalam bahasa Arab itulah hikmah. Kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dengan makna khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat sesuatu itu untuk melakukan suatu perbuatan. Ilmu menjadi pemicu untuk beramal, selanjutnya hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan, atau dengan kata lain hikmah sebagai filsafat praktis. Lihat kembali Hasbi as siddiqi *Falsafah*....hlm. 20 dan Juhaya S. Praja *Tafsi*... hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

posisi tertentu, baik sebagai sumber hukum, metode penetapan hukum, maupun tujuan hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang khas dalam tradisi filsafat ilmu dalam memahami suatu pengetahuan. Karena itu, pendekatan yang digunakan untuk membaca teori *mashlahah* adalah pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu secara terang memberikan posisi tertentu menurut kaiditas-kuiditas dan kualitas-kualitas teori tertentu.

2. Perkembangan Teori *Maqâshid al-syarî'ah*

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *maqâsid al-syarî'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Rahasia diperbolehkan nikah *mut'ah* waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipoternkan kemaluannya.²⁸⁷

²⁸⁷ Alasan mengapa *mutah* diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk agama Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap sebagai

Juga Praktek Rasulullah saw. yang menikahi Maria al-Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani (Kristen).²⁸⁸ Dari hadits dan *sirah* Rasul saw. didapatkan

dosa. *Mutah* hanya diperkenankan pada masa-masa awal karena orang-orang berjuang di medan tempur. Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.

Disamping itu juga pada permulaan Islam jumlah umat Islam sangat sedikit dan mereka harus terus-menerus melawan musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan membawa keluarga. Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, tidak rasional kalau mereka dituntut membawa keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa Jahiliyyah) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Nikah *mutah* waktu itu diperbolehkan sebagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk konteks para pejuang muslim yang tabiat seksualnya tidak terbanding dan keadaan ekonomi mereka sangat kurang. Dalam keadaan seperti ini wajib disyariatkan sebuah hukum yang berlaku sementara, untuk menghilangkan zina dan dapat memberikan jalan keluar atas problem seksual yang dialami mereka. Syariat itu adalah nikah *mutah* atau nikah *muaqqat*.

Pemberlakukan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala tentara itu terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan serta tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi saw, bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan. Baca kembali Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-A’rba’ah*, Juz 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), hlm. 90-91; Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 62

²⁸⁸ Pada tahun 6 Sebelum Hijriah, Rasulullah saw. mengirim surat kepada Muqauqis melalui Hatib bin Baltaah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Muqauqis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam, justru dia mengirimkan Mariyah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan Hatib merasakan kesedihan hati Mariyah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib mennghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut.

Rasulullah saw. telah menerima kabar penolakan Muqauqis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Muqauqis itu. Beliau mengambil Mariyah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Tsabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu sehingga Rasulullah saw. harus menitipkan Mariyah di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid.

Banyak sumber Muslim mengatakan bahwa Muhammad saw. kemudian memerdekakan dan menikahi Maria, namun ini tidak jelas apakah ini fakta historis atau apologi historis. Masalah lain, budak tidak secara otomatis merdeka karena masuk Islam, sehingga hal ini tidak begitu jelas mengapa Maria harus dimerdekakan jika dia siap diislamkan.

Nabi Muhammad tinggal dalam rumah bata lumpur dekat dengan masjid Madinah, dan setiap istrinya memiliki ruang tersendiri dalam rumah bata itu, yang dibangun dalam bentuk barisan yang dekat dengan ruangnya. Maria, walau begitu, tetap ditempatkan di rumah di tepi Madinah. Maria juga tidak dikategorikan sebagai istri dalam beberapa sumber paling awal, seperti dalam catatan Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Ishaq.^[4] Sumber-sumber Muslim sepakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

gambaran bahwa sewaktu Rasulullah saw. masih hidup, Rasul menikahi empat orang wanita ahli kitab.²⁸⁹ Rasul saw. juga menikah dengan Shafiyah binti Huyyay binti Ahtab, yang semula beragama Yahudi. Setelah menikah dengan Rasul saw. beliau masuk Islam.²⁹⁰ Kemudian Rasul saw. menikahi Juwairiyah dan setelah itu baru menikahi Raihanah.²⁹¹

Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang mereka temui. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, dengan cepat mereka menangkap rahasia-rahasia *syâri'* sehingga

bahwa dia merupakan kehormatan yang sama yang dimenjadi istri Muhammad, dengan anggapan bahwa dia diberi gelar yang sama seperti istri-istri Muhammad lain – "Ibu orang-orang Mu'min."

Maria memberikan Nabi Muhammad seorang putra, Ibrahim bin Muhammad. Hanya satu istri Muhammad lainnya, Khadijah yang telah meninggal, telah memberikannya anak. Ibrahim meninggal ketika masih dalam masa pertumbuhan. Perhatian Muhammad terhadap Maria diyakini menyebabkan kecemburuan diantara istri-istri lain. Hal itu tidak dapat teratasi hingga turunnya surah ke-66 dalam Al-Qur'an dengan subyek Maria. Setelah Rasulullah wafat, Mariyah hidup menyendiri dan menunjukan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 hijrah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Sayyidah Mariyah al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi'. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin.

²⁸⁹Mereka *Ummul Mukminin* ialah: Syafiyah, Juwairiyah, Rihanah, dan Maria Qibthiyah. Lihat: Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Depag: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 113.

²⁹⁰Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari (224-310 H), *Tarikh al-Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408 H/1988 M), jilid ke-2, hlm. 213.

²⁹¹Semula bernama Barra, kemudian ditukar oleh Rasul dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah adalah putrid Harits pemuka Kabilah Bani Musthaliq (Yahudi). Ia termasuk tawanan perang antara kaum muslimin dengan Bani Musthaliq karena pengkhianatan Bani Musthaliq dalam perang Khandaq (mereka bekerjasama dengan kafir qurays untuk menghancurkan Islam dari dalam). Mas kawinnya dengan tebusan pembebasannya 400 dirham. Menurut keterangan, ayah Barra datang kepada Rasul untuk menebus dengan dua onta yang sangat baik yang disembunyikan dibelakang bukit. Oleh Rasul ditawarkan untuk ditanyakan kepada Barra sendiri. Ternyata Barra lebih memilih Allah dan RasulNya. Perkawinan ini sangat bernilai politik bagi pengembangan Islam dan meredakan permusuhan dengan orang Yahudi. Karena Juwairiyah dinikahi Rasul, maka sahabat-sahabat yang menawan keluarganya untuk dijadikan budak, kemudian membebaskannya. Karena pembebasan ini, maka keluarga Juwairiyah secara serempak menyatakan untuk masuk Islam. Lihat: Abdul Kadir Madaniy, *Isteri-Isteri Nabi saw*, terjemahan dari buku *Nisa' al-Nabi*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1978), hlm 247-249. Lihat juga: Ichtiyanto, *Perkawinan campuran....* hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamanya.²⁹²

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan penerapan *maqâshid* pada masa sahabat adalah pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah bin Umar (w. 73 H) perihal hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibnu Umar (w. 73 H) mengatakan:

وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاقِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ²⁹³

Saya tidak tahu lagi adakah syirik yang lebih besar dari ungkapan seseorang perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa, pada hal Isa salah seorang dari hambah Allah.”

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalil yang mengharamkan bagi pria muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* karena kemusyrikan. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh Ibnu Umar (w. 73 H) bahwa pengkhususan keharaman (larangan) pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang musyrik bukan yang bertauhid.²⁹⁴ Keharaman itu pun tidak hanya sebagai konsekuensi hukum saja, tetapi lebih dari itu Allah nyatakan bahwa orang-orang

²⁹² Praktek Rasulullah saw. tersebut diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Di antara sahabat Rasulullah saw. yang melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah Utsman bin Affan (w. 36 H) dan Huzaifah bin Yaman (w. 36 H). Utsman bin Affan (w. 36 H) menikahi Na'ilah binti al-Farafisah al-Kalbiyah yang beragama Nasrani. Na'ilah pada akhirnya masuk Islam. Huzaifah bin Yaman (w. 36 H) menikahi seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.

²⁹³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (w. 256 H), *Shahih al-Bukhari*, ولا تتكحوا : في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5285, jilid 4, 1415 H/ 1995 M), hlm, 293. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li l'Ilami al-'Arabi, 1418 H/1998 M), hlm. 423. Sanad hadits tersebut ialah:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين....

²⁹⁴ Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab al-Thalaq Bab 18*, juz ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 520.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

musyrik itu senantiasa mengajak masuk ke dalam neraka. Pendapat Ibnu Umar (w. 73 H) ini, menurut penilaian Muhammad Ali ash-Shabuni (mufasssir kontemporer Mekkah) dalam kitabnya *Rawai`i al-Bayan* bermula dari sikap kehati-hatian Ibnu Umar (w. 73 H) dalam menetapkan hukum. Menurutny, alasan yang lebih tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan keluarga yang tidak mudah diwujudkan apabila antara suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup, dan agama.²⁹⁵

Seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, *maqâshid al-syarî'ah* membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqâshid al - syarî'ah* merupakan bagian dari Ushul Fiqh. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya *maqâshid al-syarî'ah* menjadi sebuah disiplin keilmuan yang mandiri:

Pertama, *maqâshid al- syarî'ah* selalu berada dibalik *nash-nash al-Qurân*, al-Hadits dan fatwa sahabat. *Kedua*, *Qiyâs* lebih dulu menjadi perdebatan sebelum akhirnya ditulis dan menjadi bagian dari Ushul Fiqh. *Qiyâs* didasarkan pada *'illat*²⁹⁶ dari segi kelayakannya sebagai *'illat* atas hukum serta metode penetapan

²⁹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai`u al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, cet. Ketiga, 1400 H/ 1980 M), hlm.49

Contoh lain pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *Mu'allafah Qulubuhum*. Kelompok *Mu'allafah Qulubuhum* ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nash* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan. Dengan demikian ruh *maqâshid al-syarî'ah* telah ada semenjak masa Nabi dan sahabat.

²⁹⁶ Mayoritas ulama : Abu Hanifah (9-150 H), Imam Malik (93-179 H), imam al-Syafi'i (150-241 H) dan Ahmad bin Hanbal (164- 241 H) menggunakan *'illat* untuk menetapkan hukum persoalan yang tidak disebutkan secara tekstual dalam *al-Qurân* dan Sunnah nabi. Pencarian *'illat* umumnya didominasi dengan menggunakan *ra'yu*. Porsi penggunaan *ra'yu* berbeda-beda antara seorang ulama mujtahid dengan yang lainnya. Lihat Al-sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, jilid II,

'*illat* hukum, jadi secara otomatis dengan membicarakan *Qiyâs*, pasti akan membicarakan *maqâshid al-syarî'ah*. Ketiga, Ulama dalam membahas masalah-masalah fikih selalu memberikan himbauan atas hikmah ditetapkan suatu hukum, dan hal itu merupakan petunjuk mengenai keberadaan *maqâshid al-syarî'ah*.²⁹⁷

Lahirnya *al-Risâlah* karya Imam Syafi'i (w. 204 H)²⁹⁸ bisa dikatakan sebagai

(Kairo): Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372 H), hlm. 118-119; al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 92-100; Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Bairut : al-Maktabah al-'ilmiyah, tt), hlm. 476-286; Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid I, (Beirut : Dar al-Jil, tt), hlm. 130-220.

Fungsi *illat* sangat urgen dalam rangka penciptaan hukum, karena dengan mengetahuinya akan memudahkan mengetahui hukum yang dicari. Baca dalam Muhammad al-Ghazali, *al-Musytasyfa min ilm al-ushul*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), Jilid 11, hlm. 260

Sangat sulit rasanya untuk mengadakan pengembangan hukum tanpa mengetahui terlebih dahulu '*illat*nya, karena '*illat* merupakan spirit hukum itu sendiri. Keyakinan ini didasarkan atas keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan logis dan hikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan hukum tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan bagi manusia. Akan tetapi secara khusus setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Baca Alyasa Abu Bakar, *Beberapa Penalaran Fiqih dan Penerapannya dalam Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosda Karya Offset, 1994), cet. 2, hlm. 179.

²⁹⁷ Muhammad Sa'd bin Ahamad bin Mas'ud al-Yûbi, *Maqâshid al - Syarî'ah wa 'Alâqatuhâ bi al - Adillah as - Syar'iyah*, (Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998), hlm. 41-45.

²⁹⁸ *al-Risâlah* adalah kitab ushul yang pertama kali ditulis dalam sejarah yang terbit pertama kali di Kairo pada tahun 1940 M. Karya ini paling tidak dapat menjadi acuan istinbat pada masanya. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, salah seorang pentahkik kitab ini, bahwa dalam sejarahnya *al-Risâlah* ditulis dua kali dengan metode dikte (*imlak*) oleh al-Syâfi'i di hadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir. Tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas di kalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syâfi'i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwayat kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadits kenamaan Hijaz, 'Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi (135-198 H). Hasil penulisannya ini kemudian disampaikan kepada al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Risâlah* yang berarti "surat" yang dikirimkan (*epitle*). Sebenarnya al-Syâfi'i menyebutnya هذا الكتاب atau هذا كتابي atau هذا كتابنا. Jadi nama *al-Risâlah* bukan dari al-Syâfi'i. lihat Ahmad Muhammad Syakir, "Muqaddimah al-Risâlah " dalam al-Syâfi'i, *al-Risâlah* , (Beirut : Mathba'ah Islamiyah, tt), hlm. 11-12

Menurut klaim mayoritas ulama sunni, terutama Syafi'iyah, bahwa *al-Risâlah* adalah kitab ushul yang pertama kali ditulis dalam sejarah secara lengkap dan sistematis untuk ukuran pada masanya, sehingga al-Syâfi'i sering disebut-sebut sebagai peletak dasar (*pioner*) atau guru arsitek disiplin ilmu ushul fiqh ini. Pendauletan sebagai peletak dasar ilmu ushul al-Fiqh oleh syafi'iyah ini disangkal oleh ulama Hanafiyah. Menurut Hanafiyah bahwa Abu Yusuf-lah orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lahirnya teori syariah dan teori fikih atau lahirnya sebuah kreasi besar umat Islam yang masih tetap otentik sampai berabad-abad lamanya. Perhatian para ulama terhadap *maqâshid al-syarî'ah* mulai lebih serius ketika *al-Risâlah* itu lahir dan terus berkembang sampai pasca *al-Risâlah* selama kira-kira dua abad lamanya. Meskipun teorisasi *maqâshid* menjadi sangat subur, kehadiran *al-Risâlah* ternyata menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing kubu tidak pernah lepas dari penawaran teori tentang *maqâshid*.

Hasil-hasil karya tentang *maqâshid* dan masalah sekitarnya kemudian bermunculan. Hanya saja sangat disesalkan bahwa hasil-hasil karya para ulama besar yang membahas masalah *maqâshid* dari abad III sampai abad IV itu langkah ditemukan diperedaran selain *al-Risâlah*, seperti *al-Furûq* hasil karya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ali, terkenal dengan sebutan al-Hakim Abu Abdillah (w. 320 H) dan buku-buku Ushul Fiqh hasil karya para ulama seperti al-Maturidi (w. 333 H.), al-Qaffal (w. 365 H.) dan al-Baqillani (w. 403 H.) yang terkenal dengan sebutan *Syaikh al - Ushuliyyin* karena berhasil menyatukan kutub Madinah (*ahl al - hadits*) dan kutub Iraq (*ahl ar - ra'yi*) dari polemik berkepanjangan seputar syari'ah dalam bukunya yang berjudul *al-Taqrîb wa al - Irsyâd*.²⁹⁹

Studi tentang *maqâshid* terus berkesinambungan dan bahkan semakin

yang pertama kali menyusun kitab ushul al-fiqh. Demikian juga ulama Syi'ah juga mengklaim bahwa imamnya, Muhammad al-Baqir dan anaknya, Ja'far al-Shadiq, yang telah menulis kitab ushul al-fiqh pertama kali. Tetapi alasan mereka itu sulit diterima karena mereka hanya menulis sub-sub kecil bagian dari ilmu ushul al-fiqh dalam kitab-kitab yang bukan merupakan kitab ushul fiqh. Kecuali *al-Risâlah* -nya imam al-Syâ fi'i yang merupakan kitab ushul al-fiqh yang sistematis dan memiliki epistemologis kuat untuk ukuran zamannya. 'Abd. Al-Wahhab Ibrahim Sulaiman, *al-Fikr al-Ushûl*, (Jeddah : Dar al-Syuruq, 1983), hlm. 60-62

²⁹⁹ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid 'inda al - Imam as - Syâtibi*, (Amerika: al-Ma'had al-Ālami li al-Fikri al-Islâmi, 1995), hlm. 40-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semarak pasca al-Baqillani (w.403 H) atau pasca *al-Taqrîb* yang juga bisa disebut sebagai era baru bagi umat Islam dalam memasuki dunia keilmuan yang lebih bersih dari polemik. Pada pasca *al-Taqrîb* lahirlah Imam al-Juwaini (w. 438 H) yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain.³⁰⁰ Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 438 H) disebut sebagai ulama yang pertama sekali menekankan pentingnya memahami *maqâshid al - syarî'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah swt. mengeluarkan beragam perintah dan larangan-Nya. Kemudian al-Juwaini (w. 438 H) mengelaborasi lebih jauh *maqâshid al- syarî'ah* itu dalam hubungannya dengan ‘*illat, ashl* (tujuan tasyri’)*’* dapat dibedakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: *ashl* yang masuk dalam kategori *dharûriyat* (primer), *al – hâjat al - ‘ammah* (sekunder), *makramat wa tahsiniyat* (tersier).

Kemudian oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), penulis *al - Mustashfa* yang juga membahas Ushul Fikih, mengembangkan pola pemikiran al-Juwaini (w. 438 H) tersebut. Ia menjelaskan maksud syariat terfokus pada *mashlahat*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam maslahat ini bagi al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda dilihat dari sisi tujuannya; primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelas bahwa teori *maqâshid al-syarî'ah* sudah mulai tampak bentuknya.³⁰¹

Setelah al-Juwaini (w. 438 H) datang Fakhruddin Muhammad ibn Umar al-

³⁰⁰ *Ibid.*,

³⁰¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Razi (w. 606 H.) yang menyambung *al - Burhân*³⁰² dan turut menyemarakkan studi tentang *maqâshid*. Al-Razi (w. 606 H) tidak puas dengan *al-Burhân*, ia berusaha mengolahnya, menambah dan mengurangi *al-Burhân* yang pernah menjadi simbol kejeniusan Ushul Fikih itu dirangkum dalam bukunya yang berjudul *al - Mahshûl*.³⁰³ Ketidakpuasan al-Razi (w. 606 H) terhadap *al-Burhân* mendorongnya untuk memasukkan unsur-unsur kejeniusan sederet ulama Ushul Fikih lainnya. Dipilihlah kemudian *al-Mustashfa*, hasil karya al-Ghazali, anak didik al-Juwaini (w. 438 H). Di samping *al - Mustashfa*, al-Razi (w. 606 H) juga mengadopsi *al-Mu'tamad* hasil karya Abu Husain al-Basri al-Mu'tazili (w. 436 H) dan *al- 'Amdu* hasil karya al-Qadhi Abdul Jabbar (w. 415 H). *Al - Mahsul* kemudian lahir sebagai rangkuman dari empat buku induk dalam Ushul Fikih hasil karya empat ulama besar dan terkemuka.³⁰⁴

Studi tentang *maqâshid* terus berlanjut dan berkesinambungan dengan lahirnya ulama-ulama besar seperti al-Amidi (w. 631 H.), Ibn Hajib (w. 646 H.) murid dari al-Amidi (w. 631 H), al-Baidhawi (w. 685 H.) penulis buku *al - Minhaj*, al-Asnawi (w. 772 H.) penulis buku *Nihayat al - Sul*, dan Ibn al-Subki (w. 771 H.).³⁰⁵ Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqâshid al - syariah* adalah Izzuddin ibn Abdissalam (w. 660 H.) penulis buku *al-Qawa'id al-Kubra* dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih menekankan

³⁰² *al - Burhân* ditulis oleh Abi al-Ma'ali al-Juwaini. Kitab ini adalah satu di antara beberapa kitab pengikut syafi'iyah yang konsen menteorisasikan takhrij. Lihat lebih rinci dalam 'Utsman Ibn Muhammad al-Akhdhar Syaussyan, *Takhrij al-Furû' 'alâ al-Ushûl, Dirâsah Târikhiyah wa Manhajiyyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh : Dar Thayyibah,1998), hlm. 206-208

³⁰³ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid 'inda ...* hlm. 40-47

³⁰⁴ *Ibid.*,

³⁰⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat. Menurutnya, *maslahat* keduniaan tidak dapat terlepas dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dharûriyat*, *hâjiyat* dan *takmilât* atau *tatimmât*. Berdasarkan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya adalah konsep *maslahat* merupakan titik sentral *maqâshid al - syari'ah*.³⁰⁶

Selanjutnya di tangan al-Thûfi (w. 761 H), gebrakan-gebrakan yang sangat liberal mulai tercetus, karena menurut pandangan al-Thûfi (w. 716 H) sumber-sumber hukum yang paling kuat adalah teks-teks keagamaan (*al-Qurân* dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi) dan konsensus para ahli hukum (*ijma'*). Bila dua sumber ini sejalan dengan kemaslahatan manusia, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, bila tidak sejalan terutama dalam masalah mu'amalah, perlindungan kemaslahatan diprioritaskan dari kedua sumber tersebut.

Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, kata al-Thûfi (w. 716 H) tidak dimaksudkan untuk menghentikan secara total validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional. Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan prinsip hukum paling tinggi karena ia merupakan tujuan pertama agama dan pokok dari maksud syariah. Untuk mendukung pendapat ini, al-Thûfi (w. 716 H) menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara untuk

³⁰⁶ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid*..... hlm. 47-71

memperoleh mata pencaharian mereka.³⁰⁷

Munculnya al-Syathibi (w. 790 H) setelah al-Thûfi (w. 716 H) menandai babak baru dalam pembahasan *maqâshid* yang lebih terstruktur, meskipun pada dasarnya konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang digagas oleh al-Syathibi (w.790 H) bukanlah hal yang baru, -sebagaimana dikutip oleh al-Raysuni (lahir. 1953 M)-, al-Syathibi banyak mengambil ide-ide dari ulama sebelumnya, seperti al-Juwaini (w. 438 H), Izzuddin, al-Qarâfi (w. 684 H), ibn Rusyd, dan khususnya al-Ghazali, kecuali dalam masalah pembahasannya yang sistematis dan penjelasannya yang lebih luas, karena sebagian besar pembahasan dalam kitab *al-Muwâfaqât* menitik beratkan pada *maqâshid al-syarî'ah*.

Dalam hal pembagian *maslahat*, ia sejalan dengan al-Juwaini (w. 438 H) dan al-Ghazali yang membagi *maqâshid* menjadi tiga (*dharûriyah*, *hâjiyah*, dan *tahsiniyah*). Ia juga tidak melarang penambahan *al-'irdh* (menjaga kehormatan)

³⁰⁷ Harun, *Pemikiran Najmuddin at -Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Instinbath Hukum Islam* , dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 1, no. 1, th. 2009, hlm. 30

Menurut al-Yasa' Abubakar, al-Thufi tidak mendefinisikan maslahat secara jelas sehingga banyak yang menganggapnya memberikan makna yang relatif sangat longgar dan luas tentang maslahat. Banyak tokoh masa sekarang yang menggunakan celah ini untuk mengubah arti *nash* (hukum suatu perbuatan) secara semena-mena, dan bahkan ada yang berani menyatakan bahwa sesuatu *nash* telah *dinasakh* karena tidak sejalan dengan maslahat (tidak berlaku lagi).

Namun perlu disebutkan, al-Thufi tidak memberikan suatu contoh pun tentang *nash* yang dia anggap tidak sejalan dengan maslahat, sehingga pernyataannya tentang kemungkinan ada *nash* yang tidak sejalan (bertentangan) dengan maslahat harus dianggap masih sebagai hipotesis, bukan sebagai fakta. Lebih dari itu perlu disebutkan, uraiannya yang sangat sering dikutip dan bahkan dianggap sebagai pendapat yang "progresif" ini, tidak diberikan sebagai suatu teori yang berdiri sendiri dan diulas secara mendalam di dalam buku ushul fiqh, ataupun dalam suatu makalah yang ditulis untuk topik itu. Uraian tentang maslahat ini ia berikan sebagai bagian dari syarah dan ulasan atas Hadis *al-dharar la yuzal bi al-dharar*. Ia menulis sebuah kitab (makalah panjang) sebagai syarah atas Hadis arba 'in Imam al-Nawawi, yang mana Hadis ini merupakan salah satu dari 43 Hadis yang dia ulas tersebut. Jadi uraian tentang maslahat ini ia berikan sebagai bagian dari uraian untuk mensyarah Hadis, bukan untuk menjelaskan pengertian maslahat (*al-mashalih al-mursalah*) atau menjelaskan bagaimana penggunaan metode istislah di dalam penalaran. Baca al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam *dharûriyah*. Menurut al-Raysuni, al-Syathibi menyebut nama al-Ghazali sekitar empat puluh kali di dalam *Muwâfaqât*.³⁰⁸ Dapat dipahami bahwa sejarah yang paling santer diperbincangan tentang teori *Maqâshid al-syarî'ah* dimulai dari Imam Syafi'i, Ibn Hazm (w. 456 H), al-Juwaini (w. 438 H), al-Ghozali (w. 505 H), al-Razzi, al-Amidi (w. 631 H), Izzudin ibn Abd al-Salam (w. 660 H), al-Qorafi (w. 684 H), al-Thûfi (w. 716 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), al-syâthibi (w. 790 H), al-Zarkasyi (w. 794 H), Ibn Asyur (w. 1973 M), kemudian berpindah kepada pemikir Mesir Gamal al-Banna.³⁰⁹

Dilihat dari sejarah munculnya teori *maqâshid al-syarî'ah* kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalaupun dilihat secara umum teori *Maqâshid al-syarî'ah* hanya terhenti pada al-syâthibi sebagai tokoh terakhir pada masanya. Karena itulah perjalanan *Maqâshid al-syarî'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-syâthibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan *Maqâshid al-syarî'ah* sampai pada masa pasca al-syâthibi, yakni sampai pada kemunculan Thahir Ibn-Asyur (w. 1973 M).³¹⁰

Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan Ushul Fiqh, *maqâshid al-syarî'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral,

³⁰⁸ Lihat dalam Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al – Maqâshid*..... hlm. 317-321

³⁰⁹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013) hlm. 36.

³¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas ...* hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni, Abu Ishaq al-syâthibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* ini tentu juga tidak meninggalkan peran tokoh-toko yang lain seperti al-Ghazali, al-Thufi, al-Amidi (w. 631 H) dan lain sebagainya yang mempertegas dan mengawali konsepsi *maqâshid al-syarî'ah*. Ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting *maqâshid al-syarî'ah* mengalami pergeseran makna.

Peta sejarah perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* yang dikemukakan oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, Muhammad Husyn dalam Ahmad Imam Mawardi memetakanya dengan kategorisasi perkembangan pemikiranya. Menurutnya perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* dapat dibagi menjadi tiga (3) era: era pertumbuhan (*Nasyatu al-Fikr al-Maqâshidiy*) dari mulai tahun 320 H sampai dengan 403 H; dan era kemunculan (*Zhuhur al-Fikr al-Maqâshidiy*) mulai tahun 478 H sampai dengan tahun 771 H; dan era perkembangan (*Tathawur al-Fikr al-Maqâshidi*) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H. Dan dari tahun 790 sesudah berakhirnya al-syâthibi diteruskan dengan metode *maqâshid al-Syariah* Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan sekarang. Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, *Maqâshid al-syarî'ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikanya *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta persoalan membangun *global ethics* (etika global) dalam upaya merealisasikan

perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulama dunia dan cendekiawan muslim terhadap *maqâshid al-Syarî'ah*.³¹¹

3. *Maqâshid al-syarî'ah* Dalam Penentuan Hukum

Pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khalaf (w. 1956 M) adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi *al-Qurân* dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh *al-Qurân* dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Yang inti dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.³¹²

Al-Raisyuni (lahir 1953 M) mengutip statemen al-Syathibi (w.790 H) yang mengatakan *maqâshid* (tujuan) adalah sebuah jiwa dari setiap perbuatan. Alangkah menakjubkan jika terdapat manusia yang dapat bertahan hidup tanpa memiliki tujuan yang jelas, karena ia hidup layaknya tanpa jiwa. Keadaan serupa

³¹¹ *Ibid*, hlm. 198-199.

Jika dipetakan secara periodic dan global dari perkembangan awalnya yang tidak terpisahkan dari ilmu usul fikih, banyak peneliti mengklasifikasikan perjalanan *maqâshid al-syarî'ah* ke beberapa fase berikut. *Pertama*, masa penyemaian (abad I H.); *kedua*, masa kodifikasi dan ilmu (abad II H.); *ketiga*, masa keemasan (abad III, IV, V H.); *keempat*, masa stagnasi (paska abad V); *kelima*, masa kebangkitan, di tangan as-Syathibi (w. 790 H), *keenam*, masa stagnasi (paska as-Syathibi sampai Syeikh Muhammad Abduh (w. 1905 H.); *ketujuh*, masa kebangkitan di era modern, di mulai sejak Syeikh Muhammad Abduh dan di tangan tokoh-tokoh *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer seperti Ibnu Asyur, Alal al-Fasi dsb. Dimana ditandai dengan dicetaknya *al-Muwâfaqât* untuk pertama kalinya di Tunisia.

Oleh sebab itu, menurut Ahmad ar-Raisuni, titik mula dan pelecut kebangkitan *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer adalah *al-Muwâfaqât*. Setelah dicetak kemudian disebarakan ke penjuru Jazirah Arab, terjadilah dialektika *intens* antara ulama kontemporer dengan *al-Muwâfaqât*. Dari situ, bangkitlah *maqâshid al-syarî'ah* dengan berbagai variannya hingga saat ini. Baca dalam Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharât fî Maqâshid* , cet. I, hlm. 88-89.

³¹² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi pada seorang ahli fikih. Tanpa menyertakan *maqâshid* dalam prosesi ijtihadnya, hanya akan menjadikan produk hukum yang dihasilkannya bernuansa *frigid*, kaku, *nir-hikmah* bahkan jauh dari nilai-nilai kemudahan yang dikehendaki oleh syariat.³¹³

Berdasarkan pada filosofi inilah kemudian pada bagian pembuka kitab *maqâshid al-Syarî'ah*nya, Ibnu Asyur (w. 1393 H/1973 M) memulai pembahasan dengan legalitas hukum dan urgensi penerapannya dalam proses ijtihad. Ini mengindikasikan adanya keinginan kuat dari Ibnu Asyur (w. 1393 H/1973 M) untuk memantapkan keyakinan para pakar hukum Islam, bahwa menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai landasan ijtihad adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan oleh setiap mujtahid. Bahkan dalam karyanya, *Alaisha al-Shubhu bi Qarîb*, Ibnu Asyur (w. 1393 H/1973 M) mengatakan bahwa salah satu biangkerok terjadinya kejumudan dan perbedaan pendapat antar ulama mazhab fikih hingga berujung pada fanatisme antar mazhab adalah akibat dari pengabaian terhadap urgensi *maqâshid al-syarî'ah* pada prosesi ijtihadnya.³¹⁴

Adapun hubungan antara *maqâshid al-syarî'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

Pertama, Qiyâs

Secara bahasa *Qiyâs* berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau

³¹³ Bahkan dengan tegas, al-Raisuni menyindir mereka yang melepaskan *maqashid* syariah dari bagian dalam proses ijtihadnya bukan merupakan seorang ahli fikih. Baca Ahmad al-Raisuni, *Madkhal ila Maqâshid al-syariah* (Kairo : Dar al-Kalimah, 2009), hlm. 16.

³¹⁴ Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Alaisha al-Shubhu bi Qarîb, al-Ta'lim al-Arabiyy al-Islâmiyy, Dirâsah Târîkhiyyah wa Arâ' Islâhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam: 2006), hlm. 200.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian *Qiyâs* secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan ‘*illat* hukum antara keduanya”³¹⁵ *Qiyâs* sebagai metode Ijtihad³¹⁶ dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam dengan pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. *Qiyâs* termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah *al-Qurân*, hadits dan *ijma’*. Masuknya *Qiyâs* kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain:

³¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (vol.1 (Damsiq : Dar al-Fikr, 2005), hlm. 574. Lihat juga Abd Majid Al-Shaghir, *al-Fikr al-Uşûly wa Isykâliyyat al-Sultâh al-Ilmiyyah fî al-Islâm* (Beirut: Dar al-Muntakhab al-Arabi, 1994), hlm. 356; Tototk jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 270

³¹⁶ *Qiyâs*, perlu diingat, adalah sebuah prosedur yang memberikan perluasan hukum kepada situasi-situasi baru. Sungguhpun demikian, ia tidak dapat digunakan untuk mengadaptasi atau menyesuaikan perintah-perintah tekstual yang tetap kepada keadaan-keadaan yang berubah. Dalam teori ini, karena memanfaatkan sebuah *mashlahah* yang bukan menjadi dalil hukum sebagai *ratio legis* menjadikan seorang yuris mampu melakukan apa saja dengan cara mengakurasi ketentuan baru yang mungkin jumlahnya lebih besar melebihi ketentuan yang mapan dari kasus yang saling berebut klaim-klaim hukum. Contoh yang standar tentang kasus sekelompok tawanan Muslim yang dijadikan perisai orang-orang kafir melindungi dirinya. Meskipun *al-Qurân* (al-An’âm [6]: 151) melarang membunuh orang mukmin yang tidak berdosa tersebut, al-Ghazâlî berpendapat bahwa untuk menyelamatkan masyarakat Islam, ketentuan larangan ini boleh tidak diikuti.

Selain itu dalam pemikiran al-Ghazali juga dikenal dengan *munasib*. *Munâsib* didefinisikan al-Ghazâlî sebagai “sesuatu yang, seperti halnya *mashâlih*, menjadi teratur (dicapai secara rasional: *intazhama*) begitu ia dikaitkan dengan perintah (*hukm*)”. Untuk pembahasan mengenai makna, klasifikasi serta derajat *munâsib*, al-Ghazâlî merujuk kepada tambahan yang cukup penting mengenai pembahasan tentang *mashlahah* dan derajat-derajatnya.

Hubungan *mashlahah* dengan *munâsib* tersebut sangatlah erat. *Mashlahah* dalam pandangan al-Ghazâlî adalah bagian dari *munâsib*. Konsekuensinya, *mashlahah* yang diterimanya adalah *mashlahah* yang relevan (*munâsib*) dengan *nash* secara umum. *Mashlahah* demikian disebutkan sebagai *mashlahah mursalah*. Sedangkan *masalahah* yang secara langsung ditunjukkan oleh atau terdapat keterangan *nash*, meskipun secara implisit, maka merupakan *mashlahah mu’tabarâh*, yang masuk dalam kategori *qiyâs*.

Namun, *munâsabah* dan *mashlahah* tidaklah identik. Meskipun al-Ghazâlî menganalisis *munâsib* juga dalam batasan efektifitas dan kesahihan dengan cara yang sama dengan yang dilakukannya terhadap *mashlahah*, tetapi rinci-rincinya berbeda. Di antara berbagai klasifikasi *munâsib*, satu di antaranya secara khusus penting, karena ia menjelaskan hubungan antara *munâsib* dan *mashlahah* dan juga perbedaan antara *istihsân* dan *istishlâh* di mata al-Ghazâlî. Menurutnya, *munâsib* dibagi menjadi tiga kategori besar: *mu’atstsir*, *mulâ’im*, dan *gharîb*, yang dijabarkan menjadi empat macam. Tentang keempat macam ini lihat al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ*, hlm. 311-315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kedekatan *Qiyâs* dengan sumber *nash* hukum dalam mekanisme penalaran *ta'lili* ('illah hukum).
- b. Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi *Qiyâs* sebagai langkah awal proses panggilan hukum.
- c. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah swt. dalam *al-Qurân*.³¹⁷

Qiyâs sebagai istimbath *ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan *nash*. *Qiyâs* sebagai penalaran *ta'lili* harus senantiasa mempertimbangkan *maqâshid al-syariah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Pertimbangan *Maqâshid al-syariah* menjadikan metode *Qiyâs* lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum.³¹⁸

Kedua, *Istihsân*.

Istihsân secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. Adapun pengertian *istihsân* menurut istilah oleh Abdul Wahab Khalaf (w. 1357 H/1956 M) adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *Qiyâs jali* (yang jelas) kepada ketentuan *Qiyâs Khafi* (yang samar), atau ketentuan yang *kulli* (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah *dalil* (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki

³¹⁷ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid*..... hlm 135

³¹⁸ A. Ghufroon Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpindahan tersebut”.³¹⁹ Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.³²⁰

Abdul Karim Zaidan membagi *istihsân* dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi berapa macam.³²¹

1. *Istihsân* yang disandarkan kepada teks *al-Qurân* atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. *Istihsân* yang disandarkan kepada *ijma'*. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. Tetapi berdasarkan *istihsân*, diperbolehkan mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah

³¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991) hlm.79

³²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, vol. 2, hlm, 21. Wahbah Zuhayli memberikan contoh akad bekerja di pabrik (*istishnâ'*) yang pada waktu akad dilakukan, barang yang diadakan (*ma'qûd alayhi*) belum ada. Contoh dan kajian tentang *istihsân* ini sangat baik dikemukakan oleh al-Syarakhsi dalam kitabnya *Ushul al-Syarakhsi*.

Di antara contoh *istihsân* adalah apa yang dikemukakan oleh al-Sarakhsi dalam kitab tentang pencurian. Dia menyatakan: "Jika sekelompok orang memasuki sebuah rumah, kemudian mengumpulkan harta bendanya dan menaikannya ke punggung salah seorang di antara mereka, lalu mereka keluar bersama-sama dengannya, maka dalam qiyâs, yang dikenai hukum potong tangan hanyalah yang mengangkut barang itu, sementara menurut *istihsân*, mereka semua dikenai hukuman potong tangan.

Dalam kitab *hudûd*, al-Sarakhsi memberikan contoh lain, yaitu apabila persaksian zina berbeda pendapat tentang dua kamar yang ditempati sebagai locus operandi, sementara kedua kamar itu berada dalam satu rumah, maka menurut qiyâs, si pelaku yang disaksikan itu dibebaskan dari *hadd*, sementara menurut metode *istihsân*, tetap dikenai sanksi *hadd*. Lihat, Abû Bakr ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut, Lubnân: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), him. 2001

³²¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fî Ushûl Fiqh*, (Beirut: Penerbit Mu'assasah Risalah, 2002), hlm 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma'*.

3. *Istihsân* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.
4. *Istihsân* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut *qiyas*, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsân*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat *al-Qurân* sudah disebutkan bahwa *Istihsân* dan agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah swt. Berfirman (QS. 22: 78). “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”
5. *Istihsân* yang disandarkan kepada *qiyas khafi*. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi dan pembagian di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya *istihsân* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari *nash*, *ijma* atau *Qiyâs*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik. Dengan demikian, *Istihsân* pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut Gufron Mas'adi, *Istihsân* harus berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *maqâshid al-syarî'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syâthibi disebut *Al-nadzar fî al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsân* adalah mempertajam analisis *Istihsân* itu sendiri.³²²

Ketiga, *Maslahat al-Mursalah*.

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab

³²² A. Ghufon Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001) hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih*³²³ yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il *shalaha*³²⁴, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Dari beberapa definisi *mashlahat* yang dikemukakan oleh *fuqaha* dapat dipahami bahwa *mashlahat* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih ke *mashlahatan*, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.

Secara prinsip yang dimaksud dengan *mashlahat* adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, *mashlahat* atau *kemashlahatan* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatakannya. Dari sisi terminologi *mashlahah mursalah* menurut 'Ali 'Abd Rabbih adalah "gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan *mashlahat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari',

³²³ Ibn Mandzur al-Afriqiyy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348

³²⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.(Jakarta, 1976), hlm. 635

diterima atau ditolak.³²⁵

Pada dasarnya mayoritas ulama ushul fiqh³²⁶ menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.³²⁷ Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama ushul memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan *maslahat al-mursalah* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *dharûriyyat*. Bahwa menetapkan kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*. Maslahat benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.³²⁸

³²⁵ 'Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin*, (Mathba'ah al-Sa'adah, 1980), hlm. 99

³²⁶ *Ushûl al-Fiqh*= teori hukum Islam. Yakni penyimpulan dengan metode induksi (*istiqrâ'*) hal-hal (prinsip-prinsip) yang universal dari dalil-dalil (*Syarî'ah*) dengan cara sedemikian rupa hingga mereka menjadi pedoman bagi mujtahid. Lihat Abû Ishâq al-Syâtibî Ibrâhim bin Mûsâ al-Lakhamî al-Gharnatî al-Mâlikî, *al-I'tishâm*, Maktab al-Buhûts wa al-Dirâsah, ed. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Juz 1, hlm. 22. Lihat juga al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah*, 'Abd Allâh Darrâz, ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 29-31. Definisi lainnya, yang serupa, *Ushûl al-Fiqh* adalah prinsip-prinsip yang dipergunakan oleh mujtahid untuk menarik hukum-hukum *Syarî'ah* yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang spesifik. Lihat misalnya, Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihâd*, (Islamabad: Islamic Research Institute, t.t.), hlm. 29.

³²⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.) hlm. 96

³²⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyangkut kehujjahan maslahat³²⁹ dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan fuqaha (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digarisbawahi: *Pertama*, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan *nash* (*maslahah mu'tabarat*).³³⁰ *Kedua*, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan maslahah mursalah³³¹ dan terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan nash syara'.

Hal ini didasarkan keberadaan maslahat menurut syara'. Dalam hal ini al-Syalabi –dalam ensiklopedi hukum Islam- membaginya menjadi tiga bagian³³² yakni: *pertama*, kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Kedua*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir

³²⁹ al-Bûthî dengan tegas mengatakan *al-Mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dhawâbith al-Mashlahah*. Kelima kriteria tersebut adalah; *maslahah* tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan *al-Maqâshid al-Syar'iyyah* yang lima, (b) tidak bertentangan dengan *al-Qurân*, (c) tidak bertentangan dengan al-Sunnah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting. Lihat Muhammad Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M). hlm. 178-182

³³⁰ Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung : Rosda karya, 2015) hlm. 155

³³¹ Lihat Abdul Halim. "Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, *al-Qurân*, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12. (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007), hlm. 39.

³³² Lihat dalam Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1145-1146

miskin.³³³

Hal ini oleh al-Lais bin Sa'ad (w. 175 H/791 M), ahli fikih mazhab Maliki, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan ramadhan. Ulama memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. di atas, karena bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut. Karenanya ulama ushul fiqih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syara', sehingga hukumnya batal/ditolak syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.³³⁴ *Maslahat mulghah* (terbaikan) adalah suatu pendapat yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki

³³³ Lihat Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) dan Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Contoh lain dari mengedepankan kemaslahatan semu (*mulghah*) yang tidak didukung sedikitpun oleh dalil-dalil yang *mu'tabar* selain dari logika dan persangkaan semata adalah apa yang dilakukan oleh presiden Tunisia Bu Raqibah pada tahun 1975 M yang mengharamkan seluruh karyawan perusahaan di Tunisia untuk melaksanakan puasa Ramadhan di tahun itu, dengan alasan akan membuat mereka menjadi loyo dan lemas sehingga akan berpengaruh kepada hasil produksi yang sangat dibutuhkan oleh negaranya. Menurut dia bahwa dengan tidak berpuasa maslahatnya lebih besar karena terkait langsung dengan kehidupan orang banyak atau *daulah* (Negara) secara umum.

Begitu juga dengan apa yang diusulkan oleh salah satu komunitas muslim yang tinggal di Amerika untuk memindahkan pelaksanaan shalat Jum'at ke hari Ahad, dengan alasan bahwa hari jum'at adalah hari sibuk mereka dengan berbagai aktifitas, jadi sulit bagi mereka untuk menghadirinya, walaupun ada yang sempat hadir maka jumlahnya pun akan sangatlah sedikit. Oleh karena itu seandainya shalat jum'at dilaksanakan di hari Ahad maka kemaslahatannya akan lebih besar sebab bisa dihadiri oleh banyak orang. Baca lebih lengkap Helmi Basri, *Mewaspadai ...*, hlm. 239

³³⁴ Ini adalah salah satu dari empat pembagian *mashlahah* menurut al-Ghazâlî. Beliau membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi Hukum Islam di sebut dengan empat tolak ukur *maslahah*, yaitu: (a) *mashlahah mujâbah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' *nau'* (spesies atau macamnya); (b) *mashlahah mulâ'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' *jins* (genus atau jenisnya); (c) *mashlahah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh syara'; dan (d) *mashlahah gharibah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh syara'. (Baca Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1041).

kegunaan karena dihubungkan dengan situasi psikososial, sedangkan setelah itu pendapat ulama tersebut diabaikan oleh ulama sesudahnya karena situasi psikososial pelaku telah berubah.³³⁵

Di sisi lain, kajian mengenai maslahat sebenarnya bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda. Maslahat sebagai tujuan *syara'* dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan *syara'*, mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. Oleh karenanya, terjadilah dialektika antara *nash*, realitas dan kemaslahatan. *Nash* sendiri dalam pandangan ulama ushul berdasarkan *dalalahnya* dibagi ke dalam *dalâlah qoth'iyah* dan *dalâlah dzanniyah*.³³⁶ Tidak ada yang menyanggah bahwa *nash-nash* tersebut ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Menurut al-Raysuni (lahir 1953 M) perbedaaan pandangan menyangkut *nash* atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas; perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.³³⁷

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan *nash* dengan maslahat dalam pandangan manusia

³³⁵ Namun demikian, pendapat Lais tersebut di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Raysuni bahwa kita akan mendapatkan kemaslahatan berubah jika dilihat dari sudut waktu yang panjang, di mana kemaslahatan dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya, baca, Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad : antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20

³³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 36-37

³³⁷ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad....* hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam dua perspektif di atas. Jawaban persoalan tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua: *Pertama*, apabila maslahat bertentangan dengan *nash* yang *qoth'iy al-dilalah*, jumhur ulama (kecuali al-Thûfi) sepakat untuk lebih mendahulukan *nash*. Akan tetapi, bila pertentangan tersebut terjadi dengan *nash* yang *dzanny al-dilalah*, dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.³³⁸

Pertama, pendapat yang lebih mendahulukan *nash* secara mutlak. Bagi mereka *nash* menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan *nash*, *nash* lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafi'iyah dan Hanabilah.³³⁹

Kedua, pendapat yang mendahulukan maslahat dari pada *nash*, apabila maslahat itu bersifat *dharuriyah*, *qot'iyah*, dan *kulliyah*. Al-Ghazali mencontohkan dengan dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.³⁴⁰ *Ketiga*,

³³⁸ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor , (2014), *Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)* , al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Volume I, Issue I, hlm. 17

³³⁹ *Ibid.*,

³⁴⁰ Ini menunjukkan menunjukkan bahwa *mashlahah* yang diperkenankan untuk dijadikan sandaran dalam menarik ketentuan hukum dalam konsep *mashlahah* al-Ghazâlî adalah *mashlahah mu'tabarrah* dan *mashlahah mursalah* yang mempunyai sifat *dharûriyyah*, *qat'iyah*, dan *kulliyah*. Jika *mashlahah mu'tabarrah* maka penalarannya disebut *qiyâs*. Jika tidak *mu'tabarrah* maka ia disebut *istishlâh*, yang serupa dengan *istihsân*, dan penalaran seperti ini dianggap tidak *shahîh*.

Imam al-Ghazâlî menempatkan *istishlâh* dan *istihsân* sebagai metode penalaran yang tidak memiliki kesahihan seperti yang dimiliki *qiyâs*. Dia menyebut metode-metode seperti itu sebagai "*ushûl mawhûmah*" yaitu prinsip-prinsip di mana para mujtahid lebih menyandarkan diri pada imajinasi atau pertimbangannya sendiri daripada tradisi. Jadi menurut al-Ghazâlî, metode penalaran dengan *mashlahah*, dalam arti *mashlahah ghair mu'tabarrah* tidak diperkenankan.

Dengan demikian, al-Ghazâlî mengintegrasikan *mashlahah* ke dalam *qiyâs* dengan cara mengidentifikasikannya dengan *munâsabah* (kesesuaian, keserasian), sebagai sebuah kriteria untuk membatasi *ratio legis* dari ketentuan yang berdasarkan teks. *Mashlahah* yang tidak menjadi dalil dalam model ini secara konseptual menempati posisi *ratio legis*. Baca Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ fi 'Ilm al-Usûl*. Muhammad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada *nash*. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada *nash*, apabila *nash* tersebut bersifat *dzanni*, baik *dilalah* maupun *tsubutnya*, sedangkan maslahatnya bersifat *qoth'iy*. Kedua, Sulaiman al-Thûfi (w. 716 H) yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada *nash*, baik *nash* tersebut bersifat *qoth'iy* maupun *dzanny*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.³⁴¹

Penetapan hukum untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal: *Pertama*, kemaslahatan sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³⁴²

Al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) meletakkan beberapa syarat sehingga maslahat dapat menjadi dalil hukum dalam melakukan *istinbath*. *Pertama*, maslahat itu sejalan dengan tindakan syara'. *Kedua*, maslahat itu tidak bertentangan dengan *nash* syara'. *Ketiga*, maslahat itu termasuk ke dalam kategori

'Abd al-Salâm 'Abd al-Syâfi, ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 2000), hlm. 175-180 dan 180

³⁴¹ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad*....hlm. 31-32

³⁴² Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi*.....hlm. 1146-1147

masalah yang *dharûriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga menyatakan bahwa masalah *hajiyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi masalah *dharûriyah*.³⁴³

Menyangkut *masalah mursalah*, secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan masalah mursalah meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.³⁴⁴ Syarat-syarat tersebut adalah: (1) masalah yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata; (2) masalah yang ingin dicapai adalah masalah umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan masalah personal (*al-maslahah al-syakhsiyyah*); dan (3) masalah yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma'.³⁴⁵ Berdasarkan persyaratan diatas, masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *masalah al-mursalah* dengan *Maqâshid al-syariah*.³⁴⁶

4. Pembagian *Maqâshid al-syarî'ah*

Dijelaskan bahwa apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt., baik dalam *al-Qurân* maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam),

³⁴³ *Ibid.*, Lihat juga Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ fî 'Ilm.....* hlm. 175 -180

³⁴⁴ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87

³⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...* hlm. 113-114

³⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 128.

akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.³⁴⁷ Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.³⁴⁸

Kemaslahatan itu oleh al-syâthibi (w.790 H) dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqâshid al-syâri'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqâshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqâshid al-syari'ah* dalam arti *maqâshid al-syâri'*, berisi empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.³⁴⁹

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqâshid al-syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikehendaknya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam upaya mewujudkan

³⁴⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

³⁴⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 5.

³⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 5.

kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah swt. (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.³⁵⁰ Dalam pembagian *maqâshid al-syarî'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Yusuf al-Qaradawi (lahir 1345 H/1926 M) mengkonstatir bahwa substansi *mashlahah* yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *mashlahah* yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan *mashlahah duniyawiyyah*, dan *mashlahah ukhrawiyyah*, *mashlahah maddiyah* dan *mashlahah rûhiyyah*, *mashlahah fardiyyah* dan

³⁵⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah mujtama'iyah, mashlahah qaumiyyah khâssah dan mashlahah insâniyyah 'âmmah, mashlahah hâdirah dan mashlahah mustaqbah. Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi (lahir 1345 H/1926 M) menegaskan bahwa konsep *mashlahah* yang menjiwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme³⁵¹ dan pragmatisme³⁵², yang *nota bene* berhulu pada faham materialisme.³⁵³

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M). ia membagi *mashlahah* menjadi dua bagian, yaitu *mashlahah* dunia (*mashlahah dunyawiyah*) dan *mashlahah* akhirat (*mashlahah ukhrawiyah*). Para ulama senantiasa membagi *mashlahah* menjadi *ukhrawiyah*: berkaitan dengan aqidah dan ibadah, *mashlahah dunyawiyah*; terkait dengan *mu'âmalat*. Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) tidak membaginya seperti apa yang dilakukan oleh ulama yang lainnya, karena menurut Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) pada hakikatnya segala yang ada dalam syariat Islam baik aqidah, ibadah, dan *mu'âmalah*

³⁵¹ Utilitarisme adalah faham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan (*the principle of utility*) sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membedakan, membawa akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. *The greatest good to the greatest number*. Faham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang kita ambil atau di antara semua peraturan yang kita pegang, yang dapat dibenarkan secara moral adalah tindakan atau peraturan yang, sejauh dapat kita perhitungkan, akan paling memajukan kepentingan banyak orang, paling menguntungkan atau paling membawa kebahagiaan mereka. Dikutip dari kamus filsafat. Online. Diakses 4 Mei 2018.

³⁵² Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. <https://id.m.wikipedia.org>. diakses 4 Mei 2018

³⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirâsat al-Syar î'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya seseorang yang berpatokan kepada hukum-hukum agama dalam pergaulannya dengan yang lain, dan merupakan bentuk perintah Tuhan, ia akan memperoleh kemaslahatan di dunia, dan di akhirat nanti ia juga akan memperoleh ridha dan surga-Nya.³⁵⁴

Ketika Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) mengartikan *mashlahah* dengan sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syâri'* (Allah swt. dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut, ia membagi *mashlahah* dalam kategori ini menjadi empat tingkatan; persis dengan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M).³⁵⁵ Perbedaannya hanya

³⁵⁴ Seseorang yang beribadah, memperbanyak zikir, dan meningkatkan kepatuhannya, ia akan mendapat pahala dan ridha Tuhan di akhirat, sementara di dunia, ia juga memperoleh kemudahan jalan karena adanya jaminan dari hukum *syariat* untuk menetapkan kemaslahatan dunia. Begitu juga dalam masalah *mu'âmalat*. Hanya saja, dalam segi *mu'âmalat* akan menghasilkan *mashlahah* dunia secara (kongkrit) langsung. Sementara pada ibadah dan aqidah yang merupakan jalan untuk mempermudah dalam menggunakan hukum-hukum *syariat* yang berkaitan dengan *mu'âmalat* akan menghasilkan *mashlahah* dunia yang tidak langsung (abstrak). Baca Muhammad Sa'id Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), hlm. 84 - 86

³⁵⁵ al-Ghazâlî membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi Hukum Islam di sebut dengan empat tolak ukur *masalahah*, yaitu: (a) *mashlahah mujâbah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' *nau'* (spesies atau macamnya); (b) *mashlahah mulâ'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' *jins* (genus atau jenisnya); (c) *mashlahah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh syara'; dan (d) *mashlahah gharîbah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh syara'. (Baca Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al., *Ensikolopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1041).

Menurut pemahaman penulis, empat istilah di atas yang dipakai oleh al-Ghazâlî dan al-Bûthî memiliki persamaan dan perbedaan tipis. Persamaannya adalah kesamaan definisi dan maksud, walau dengan istilah yang berbeda, yaitu antara istilah *mashlahah mujâbah*-nya al-Ghazâlî dengan *mashlahah mu'âsirah*-nya al-Bûthî. Kesamaan maksud dan istilah untuk tingkatan kedua, yaitu *masalahah mulâ'imah*. Sedangkan tingkatan ketiga; antara al-Ghazâlî dengan al-Bûthî ada perbedaan istilah dan pengertian, hanya saja pada tingkatan ini keduanya sama-sama menolak sebagai bagian dari *masalahah* yang boleh dipakai. Pada tingkatan *masalahah* yang keempat ada perbedaan istilah, namun pengertiannya sama akan tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu al-Ghazâlî menolak *masalahah Gharîbah* (*mursalah*) sebagai salah satu dari beberapa *masalahah* yang boleh digunakan, sedang al-Bûthî memperbolehkannya, bahkan ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu: (a) *mashlahah mu'âtsirah*, (b) *mashlahah mulâ'imah*, (c) *mashlahah munâsibah gharîbah* dan (d) *mashlahah mursalah*. Kemudian al-Bûthî menjelaskan bahwa *masalahah mu'âtsirah* dan *mulâ'imah* terdiri dari dua macam *masalahah* yang disepakati oleh jumbuh ulama kebolehan penggunaannya. *Maslahah* yang ketiga, yaitu *mashlahah munâsibah gharîbah* adalah *masalahah* yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan *masalahahnya* adalah *zhan* (dugaan), yang maksudnya adalah adanya *masalahah* baru sebatas *zhan* dan tidak termasuk ke dalam bagian lima *maqâshid syar'iyah*. Berbeda dengan *masalahah mursalah* yang *masalahahnya* tidak *zhan*, tapi sudah yakin masuk dalam salah satu dari lima *maqâshid syar'iyah* dan tidak bertentangan dengan syara'; tidak ada perintah dan anjuran, juga tidak ada larangan dan kemakruhan,³⁵⁶ atau didiamkan oleh syara'.

Kemaslahatan dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-syâthibi (w. 790 H), adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).³⁵⁷ Para ulama menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok positif: adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah; dan preventif: adalah

berhujjah telah disepakati oleh para sahabat, tabiin dan empat imam mazhab fiqh terkenal.

³⁵⁶ Al-Bûthî, *Dhawâbith*....., hlm. 285-288

³⁵⁷ *Ibid*, hlm. 10

jinayat (hukum pidana).³⁵⁸

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).³⁵⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan al-Gazâli. Beliau menyebutkan bahwa berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' (*syahâdat al-syar'i*), *mashlahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimaannya (*mashlahah mu'tabarah*³⁶⁰); (2) *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (*mashlahah mulgah*³⁶¹); dan

³⁵⁸ Ibadat bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal. Lihat *Ibid*, hlm. 8-10

³⁵⁹ Lihat Al-muwafaqot, II, hlm 8, Amir Syarifuddin, hlm. 208. Lihat pula Satria Effendi M. Zein, hlm. 233. Bandingkan dengan Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 245.

³⁶⁰ Misalnya pemeliharaan jiwa manusia. Ini merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Allah sebagai *al-Syâri'* dalam *al-Qurân* yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum *Qishâsh*. Demikian juga dengan pembebanan hukum terhadap pencuri, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 38, di mana hal ini merupakan realisasi dari kemaslahatan pemilikan harta benda yang ditunjukkan oleh *al-Syâri'*. Sedangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia, Allah melarang untuk mendekati zina. Kemaslahatan ini termaktub dalam surat al-Isra ayat 32. Baca lebih lanjut Kutbuddin Aibak, 2013, "Penalaran *Istishlâhi* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *al-Manhaj*, Jurnal Kajian Hukum islam VoL. VII No.2, Juli 2013. Hlm. 174

³⁶¹ Contoh yang populer dalam literatur fikih adalah fatwa seorang fakih al-Lays tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh fakih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti kewajiban memerdekakan budak. Menurut sang fakih, bagi seorang raja keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. Oleh karenanya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh *Nash* harus didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Lihat *ibid.*,

(3) *mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*mashlahah mursalah*).³⁶²

Muhammad Muslehuddin juga melihat bahwa kategorisasi *mashlahah* dengan trilogi *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.³⁶³ Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*). *Mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *mashlahah* level *dharûrât* , (2) *mashlahah* level *hâjât*, dan (3) *mashlahah* level *tahsînat* / *tazyînat*. Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah* / *tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-ushûl al-khamsah*) yang berada pada level *darûrât* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *mashlahah*. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-dîn*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*),

³⁶² Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustashfa*.....hlm. 414

Dalam perspektif kesejarahan hukum Islam, contoh *mashlahah mursalah* yang selalu dikedepankan adalah pemberlakuan penjara, pencetakan uang dan penetapan pajak terhadap pemilik tanah pertanian dan pajak penghasilan. Di samping itu terdapat contoh yang sangat populer dalam sejarah yaitu pembukuan mushaf *al-Qurân*. Lihat kembali Kutbuddin Aibak, 2013, "Penalaran.....hlm. 175

³⁶³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of*.....hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).³⁶⁴

Abû Ishâq al-Syâthibi juga mengkategorisasi *mashlahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *darûriyyah*, (2) *hâjyyah*, dan (3) *tahsîniyyah*.³⁶⁵ Pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syâthibi kedalam tiga macam *Maqasid*, perlu dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Al-Syitibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini, akan tetapi apabila memahami pemikiran al-syâthibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* bahwa *al-Maqasid* adalah kemaslahatan,³⁶⁶ dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqasid* atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *al-mashalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-mashalih al-Ukhrowiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Kebutuhan *dharûriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat

³⁶⁴ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustashfa*.....hlm. 417

³⁶⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi...*, hlm. 73

³⁶⁶ Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan *syariah*, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akherat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.³⁶⁷ Al-Syâthibi menjelaskan bahwa *dharûriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Manakala ia lenyap, tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. *Dharûriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi. Kelima maslahat ini, disebut dengan *al- mashlahat al - khamisah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.³⁶⁸

Kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, melainkan manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) ketika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah *taklif*. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (*musafir*) atau sakit, tetapi harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta

³⁶⁷ Lihat Satria Effendi M. Zein, , hlm. 235.

³⁶⁸ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jilid I, Juz ke-2, hlm.7-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan ‘*uqubat* (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.³⁶⁹

Adapun *hâjiyyah*, dalam pandangan al-Syâthibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *hâjiyyah* tidak diperhatikan akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *mashlahah dharûriyyah*, yang bersifat umum. Kategori *hâjiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *dharûriyyah*, dengan tegaknya *hâjiyyah*, akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrât wa tafrît*).³⁷⁰ Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hâjiyat* justru tidak akan memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan *hâjiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqâshid* dan menghilangkan keketaan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqâshid*. Jika *hâjiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *dharûriyat*, manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Rusaknya *hâjiyat* tidaklah merusak seluruh *maslahat* seperti yang

³⁶⁹ *Ibid.*,

³⁷⁰ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*..... hlm.9-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakibatkan *dharûriyat*.³⁷¹

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.³⁷² Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan *'uqubat*, Allah swt. telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.³⁷³

Sedangkan *tahsîniyyah* menurut pendapat al-Syâthibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal

³⁷¹ Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 10-11.

³⁷² *Ibid*, hlm. 11

³⁷³ Lihat Satria Effendi M. Zein,, hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat. Hal ini sering disebut dengan *makârim al-akhlâq*. Bagi al-Syâthibi, keberadaan *tahsîniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *mashlahah darûriyyah* dan *mashlahah hâjiyyah*; ini karena ketiadaan *tahsîniyyah* tidak merusak urusan *darûriyyah* dan *hâjiyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.³⁷⁴ Ketiga tingkatan kebutuhan (*mashalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Mashalih tahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *mashalih hajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *mashalih daruriyat*. *Mashalih daruriyat* adalah dasar dari semua *mashalih*.³⁷⁵

Dengan demikian konsep *maqâshid al-syarî'ah* berorientasi kepada kemaslahatan³⁷⁶ bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi. Usaha mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok berupa *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal), al-

³⁷⁴ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*.....hlm. 9-10.

³⁷⁵ Lihat al-Syatibi, ..., hlm. 16-17.

³⁷⁶ Tâhir ibn 'Âsyûr berpendapat bahwa *mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mashlahah 'ammâh* dan *mashlahah khâssah*. Yang disebut pertama ialah sesuatu yang berisi kebaikan/kemanfaatan bagi seluruh masyarakat atau mayoritas masyarakat, seperti pemeliharaan harta benda dari bahaya kebakaran dan tenggelam. Jenis *mashlahah 'ammâh* inilah yang merupakan perhatian sebagian besar legislasi *al-Qurân* dan Sunnah. Baca Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), hlm.63.

'Abdullah Yahya al-Kamâli berpendapat bahwa dalam rangka pengembangan hukum Islam, harus dipahami 3 (tiga) model kategorisasi *mashlahah*. Pertama, kategorisasi *mashlahah* yang meliputi *mashlahah mu'tabarâh*, *mashlahah mulgah*, dan *mashlahah mursalah*. Kedua, kategorisasi *mashlahah* yang mencakup *al-mashâlih al-darûriyyâh*, *al-mashâlih al-hâjiyyâh*, dan *al-mashâlih al-tahsîniyyah*. Ketiga, kategorisasi *mashlahah* yang terdiri atas *mashlahat al-dîn*, *mashlahat al-nafs*, *mashlahat al-'aql*, *mashlahat al-nasl*, dan *mashlahat al-mâl*. Rujuk kembali 'Abdullah Yahya al-Kamâli, *Maqâshid al-Syarî'ah fi Dau' Fiqh al-Muwâzanât*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1421 H/2000 M), hlm. 26-28, 111-116, dan 147-164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syatibi membagi *maqâshid al-syari'ah* kepada tiga macam.³⁷⁷ *Pertama*, dari sisi sumber timbulnya, *maqâshid al-syari'ah* akan terbagi ke dalam dua kategori : *maqâshid* pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya), dan *maqâshid* penerima syari'at, *al-mukallaf* (manusia). Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari'at yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia *mukallaf* dengan tujuan pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya). *Kedua*, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori : *maqâshid al-kulliyah* dan *al-juz'iyah*. *maqâshid al-kulliyah* adalah tujuan syari'at universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqâshid al-juz'iyah* adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha dengan istilah hikmah, rahasia atau sebab. *Ketiga*, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua kategori yaitu : *ashliyah* (autentik) dan *taba'iyah* (pelengkap). *Maqâshid ashliyah* adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syari'at (Allah dan rasul-Nya), seperti tujuan –terciptanya regenerasi umat manusia- adalah tujuan utama dari disyari'atkannya pernikahan. Terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah merupakan *maqâshid taba'iyah* (tujuan pelengkap) sebagai penyempurna dari tujuan utama. Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

³⁷⁷ Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ada juga ulama' membagi *maqâshid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqâshid 'âmmah* (*General maqâshid*/tujuan-tujuan umum), *maqâshid khâshshah* (*Specific maqâshid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqâshid juz`iyah* (*Partial maqâshid* / tujuan-tujuan parsial).³⁷⁸ *Maqâshid 'âmmah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *Maqâshid Khâshshah* adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalat, dan lainnya. Sedang *maqâshid juz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.³⁷⁹

Di sisi yang lain, piramida *maqâshid syari`ah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharûriyah*, *hâjiyah* dan *tahsîniyah*.³⁸⁰ Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqâshid al-dharûriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-dîn*),

³⁷⁸ Baca dalam M.Amin Abdullah, *Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Nrgara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*, Jurnal: Media Syari'ah dan Pranata social.

³⁷⁹ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâsid*, hlm. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5

³⁸⁰ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâsid*, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-māl*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-syâthibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *ushūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.³⁸¹

Ulama klasik menyusun *maqâshid al-syarî'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqâshid 'ammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqâshid khashshah* dan terakhir *maqâshid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharûriyah*, *hâjiyyah* kemudian *tahsîniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas ketika didapati pertentangan antara *maqasdid* satu dengan lainnya, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Meski kelihatannya teori ini sederhana, ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqâshid al-Syarî'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat pyramid. *Maqashid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawâir mutadâkhilah wa mutaqâthi'ah*, yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.³⁸²

Oleh karena itu tidak boleh membatasi konsep *maqâshid* sebatas yang

³⁸¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

³⁸² Jasser Auda, *Maqâshid al-Ahkâm al-Shar'iyyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditetapkan oleh ulama klasik. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman berefek pada perubahan hukum. Sesuatu pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai. Seperti berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.³⁸³

Dari uraian di atas, dari segi muatan masalah yang harus dipelihara, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi tiga, yaitu : *mashlahah dharûriyah*,³⁸⁴ *mashlahah*

³⁸³ Hal ini, menurut Jasser Auda, karena bagaimanapun *maqâsid* adalah produk penelitian (*istiqrâ'*) para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah. Sedangkan *istiqrâ'* merupakan refleksi dari *tashawwur* teoritis yang ada pada diri mujtahid. *Tashawwur* ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan pemikiran, kecerdasan dan perubahan kondisi serta waktu. Jasser Auda menganalogikan hal ini dengan alam semesta, yang mana pengetahuan manusia atasnya berkembang dan pemahaman manusia berubah dari zaman ke zaman seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi yang terus berkembang. Lihat lebih lanjut, Jasser Auda,, *Fiqh al-Maqâsid*, hlm. 18-19; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 21-24

³⁸⁴ Legalitas pemeliharaan *mashlahah dharûriyah* terdapat dalam *al-Qurân* surat al-An'am ayat 151-152 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقِي ۖ وَحُنَّ تُرْقِفُمْ
وَأَيْهَامُ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

[٦:١٥١]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦١٥٢﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ...hlm. 149

Ayat di atas menyebutkan beberapa *mashlahah* yang harus dipelihara; *Mashlahah* agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hâjiyah*³⁸⁵ dan *mashlahah tahsîniyah*. Dari segi tingkatannya, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi dua, yaitu : *maqâshid ashliyyah* dan *maqâshid tâbi'ah*. Dari segi kandungan *maqâshid*, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi tiga, yaitu : *maqâshid 'âmmah*, *maqâshid khâshshah*, dan *maqâshid juziyyah*.

Selain pembagian di atas, Jamaluddin Athiyyah (lahir. 1346 H)³⁸⁶ memiliki teori tersendiri tentang *maqâshid al-syarî'ah* layaknya para pembaharu *maqâshid al-syarî'ah* kelas elit seperti al-Qardhawi, Muhammad al-Ghazali, al-Raisuni, Ibn Asyur dan yang lain. Berawal dari gencarnya pembahasan apakah *al-maqâshid al-Dharûriyyah* hanya terbatas pada hasil rangkuman ulama klasik yang berjumlah lima.³⁸⁷

Dalam tataran praktis yang dinaungi oleh empat ruang gerak dari lima

disebutkan dalam kalimat "janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia". *Mashlahah* jiwa disebutkan dalam kalimat, "dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. *Mashlahah* keturunan disebutkan dalam kalimat "dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. *Mashlahah* harta disebutkan dalam kalimat "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermannfaat, hingga sampai ia dewasa.

³⁸⁵ Pemeliharaan *mashlahah hâjiyah* disebutkan dalam *nash*, di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 6 :

.....مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسْمَعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٥:٦]

.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ...hlm. 108

³⁸⁶ Ia terlahir di desa Kumun Nur di daerah Dakhaliyyah, Mesir 22/11/1346 H. bertepatan 12/5/1928 M. dari keluarga menengah, ketika Jamaluddin Athiyyah baru berumur dua bulan, keluarganya berpindah ke Kairo. Ia kemudian masuk ke fakultas Hukum jurusan Studi Undang-undang di Universitas al-Fuad al-Awwal (sekarang Kairo University) dan lulus tahun 1948 M. Ia meraih gelar Diploma Syariah di Fakultas Hukum pada tahun 1950 M. setelah itu ia berangkat melanjutkan studinya di Swiss, tepatnya di Genev University pada tahun 1960 M. Kemudian ia pindah ke Kuwait untuk bekerja sebagai pengacara. Kemudian ia pulang ke Kairo untuk bekerja sebagai Super Visor di *al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami* selama 4 tahun, mulai 1988-1992. Baca lebih lanjut Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong*....., hlm. 75

³⁸⁷ Jamaluddin Muhammad Athiyyah, *Nahwu Taf'il maqâshid al-syarî'ah* (Virginia, AS : The International Institute of Islamic Thought, 2008), cet. II, hlm. 95-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maqâshid al-kulliyyah yang sudah mendinasti begitu lamanya, Jamaluddin mengembangkannya menjadi dua puluh (24) *maqâshid*. Sebab gerak *Maqâshid al-syarî'ah* diterapkan (di-*tathbîq*-kan) dalam empat ruang gerak. Dan dalam tiap ruang gerak ini *al- maqâshid al-kulliyyah* ini tidak mesti berjumlah lima buah. Empat ruang gerak ini adalah: ruang individu, ruang keluarga, ruang umat, dan ruang kemanusiaan.³⁸⁸

Pertama : *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam Ruang Individu. Bagian ini terdiri dari *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa-raga), *I'tibâr al-'Aql* (memberdayakan akal), *Hifzh Tadayyun* (menjaga keberagamaan), *Hifzh 'Irdh* (menjaga harga diri), dan *Hifzh al-Mâl* (menjaga Harta). Kedua : *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam ruang keluarga. Jamaluddin membuat khusus *Maqâshid al-Syarî'ah* ini bertolak dari pemikiran al-Ghazali perihal tujuan-tujuan pernikahan secara umum. Bagian kedua ini terdiri atas *Tanzhîm al-'alâqah bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia), *hifzh al-nasl* (menjaga perkembangbiakan), *tahqîq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (realisasi ketentraman, keramahtamahan dan kasih saying), *Hifzh al-nasab* (menjaga nasab), *hifzh al-tadayyun fi al-usrah* (menjaga keberagamaan dalam keluarga), *tanzhîm al-jânib al-Mu'assasiy li al-usrah* (meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga), dan *Tanzhîm al-jânib al-mâliy li al-usrah* (meregulasi sisi finansial bagi keluarga).

Ketiga : *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam lingkup umat. Bagian ini berkaitan langsung dengan *al-tanzhîm al-mu'assasiy li al-ummah* (peregulasian keorganisasian bagi umat), *hifzh al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *Hifzh al-*

³⁸⁸ *Ibid*, hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*adl* (menegakkan keadilan), *hifzh al-dîn wa al-akhlâk* (menjaga agama dan akhlak), *al-ta'âwun wa al-tadhâmun wa al-takâful* (menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifzh 'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), dan *imârah al-ardh wa hifzh tsarwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat). Sedangkan yang keempat : *Maqâshid al-Syarî'ah* untuk kemanusiaan. Bagian akhir ini terdiri atas *al-ta'âruf wa al-ta'âwun wa al-takâmul* (saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi), *tahqîq al-khilâfah al-'ammah li al-insân fi al-ardh* (merealisasikan suksesi tugas Tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqîq al-salâm al-alamî al-qâim 'alâ 'adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himâyah al-daulyyah li huqûq al-insân* (melindungi hak-hak manusia secara universal), serta *nasyr da'wah al-Islâm*.³⁸⁹

5. Metode dan Esensi *Maqâshid al-Syarî'ah*

Sumber utama ajaran Islam adalah *al-Qurân* dan Hadits. *Al-Qurân* adalah firman Allah swt., sejatinya Allah sajalah yang paling mengetahui maksud dan isinya. Manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui isi *al-Qurân* seutuhnya. Namun demikian, karena *al-Qurân* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. *khitabnya* ditujukan kepada manusia, ada keharusan bagi manusia untuk

³⁸⁹ *Ibid*, hlm. 135-163

Dari uraian di atas, penulis memetakan pembagian *maqâshid al-syarî'ah* dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi cakupannya *maqâshid* dibagi menjadi *maqâshid 'ammah*, *maqâshid khâshshah* dan *maqâshid juziyyah*. *Kedua*, dari segi muatan *mashlahahnya*, *maqâshid* terbagi kepada *maqâshid al-dharîriyât*, *maqâshid al-hâjiyât*, dan *maqâshid al-tahsinîyât*. *Ketiga*, dari segi kekuatan untuk menetapkan, *maqâshid* dibagi kepada *maqâshid qath'iyyah*, *maqâshid zhannîyah*, dan *maqâshid wahmiyyah*. *Keempat*, dari segi tingkatannya, *maqâshid* dibagi kepada *maqâshid ashliyyah* dan *maqâshid tabi'iyyah*. *Kelima*, dari segi isi, *maqâshid* dibagi menjadi *maqâshid kulliyah* dan *maqâshid juziyyah*.

senantiasa berusaha memahami isi *al-Qurân* tersebut.³⁹⁰ Disamping pemahaman terhadap ayat-ayat *al-Qurân*, perlu pula memahami hadits Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam. Dalam dua sumber inilah pencarian *maqâshid al-syarî'ah* dilakukan.

Memahami *maqâshid al-syarî'ah* adalah tuntunan yang harus dilakukan dalam memahami masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqâshid al-syarî'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine qua non*³⁹¹ yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman, keadaan dan tempat.

Berkaitan dengan upaya mengetahui dan memahami *maqâshid al-syarî'ah* berupa hikmah dan tujuan penetapan hukum, menurut Asafri Jaya Bakri³⁹² setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu:

- 1) Ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan

³⁹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Jilid. III (Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiah, 1996), hlm. 37

³⁹¹ *Condition sine qua non* adalah suatu kejadian yang merupakan akibat. Biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau factor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Dikutip dari apphutaurok.blogspot.com. Diakses 17 Juni 2018.

³⁹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.³⁹³

2) Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :

- a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqâshid al-syarî'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqâshid al-syarî'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.³⁹⁴
- b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus memiliki tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut

³⁹³ Contoh : Allah swt. telah menegaskan hukum-hukumnya berupa wajib, haram, sunat dan sebahagian lagi makruh; selain dari hukum-hukum tersebut dengan sendirinya menjadi mubah (dibolehkan). Jika segenap hukum telah disebutkan dalam lahir *nash*, baik dalam bentuk umum maupun khusus, dengan sendirinya tak ada lagi qiyas, sebab qiyas digunakan oleh pemakainya dalam hal yang tidak memiliki *nash*. Baca lebih lanjut Abdi Wijaya, 2015, *Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-Daulah, vol.4/42/No.2/Desember 2015, hlm. 348.

³⁹⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok *Muta'ammiqin fi al-qiyâs*.

- 3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *Rasikhin*.³⁹⁵

Masih dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (*rasikhin*) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi³⁹⁶ dalam upaya memahami *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu :

- 1) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
- 2) Melakukan penelaahan '*illat* perintah dan larangan.
- 3) Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyariaan suatu hukum.

Dalam analisis Asafri Jaya Bakri, cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam *al-Qurân* dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain.³⁹⁷

³⁹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hlm. 89-91

³⁹⁶ Al-Syathibi.....hlm. 104

³⁹⁷ Pembatasan lafaz perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah dan larangan yang memiliki tujuan lain seperti perintah larangan jual beli dalam ayat 9 surat al-Jum'ah.

Larangan dalam ayat tersebut bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya

Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi.³⁹⁸ Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap ‘*illat*’³⁹⁹ hukum yang terdapat dalam *al-Qurân* atau hadits. Seperti diketahui bahwa ‘*illat*’ itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Bila *illat*nya tertulis, mesti mengikuti kepada apa yang tertulis itu,⁴⁰⁰ dan jika ‘*illat*’nya tidak tertulis, harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh

bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan Sholat Jum’at). Jual beli itu sendiri hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat aspek *maqâshid al-syari’ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu, seperti halnya pelarangan zina. Artinya, jual beli secara hakiki tidak dilarang. Bentuk seperti ini tidak termasuk ke dalam kerangka analisis lafaz dalam menelaah *maqâshid al-syari’ah*. Baca lebih lanjut dalam Abdi Wijaya, 2015, *Cara Memahami Maqashid al-Syari’ah*, Jurnal Al-Daulah, vol.4/42/No.2/Desember 2015, hlm. 349-350

³⁹⁸ Demikian urgennya pemahaman terhadap lafaz perintah dan larangan, sehingga al-Juwaini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-petintah dan larangan-larangan-Nya. Lihat Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Anshar, 1440 H), hlm. 295

³⁹⁹ Agar sebuah ‘*illat*’ layak diberikan stempel *maqâshid*, Ibn ‘Asyur -seperti yang dikutip oleh Muhammad ‘Amud Shofy- memberikan beberapa ketentuan untuk membedakan antara makna hakiki dari makna yang spekulatif (*al-wahmi*). Ketentuan yang dimaksud adalah (a). *al-tsubûl*, yaitu tetap atau pasti, dalam artian bahwa eksistensi makna dasar dari sebuah teks lazimnya bersifat pasti atau paling tidak mendekati kepastian (*madhnûn dzannan qarîban*). (b). *al-Zhuhûr*, jelas. Sederhananya diartikan sebagai suacu *dilâlah* yang memancar dari balik teks, di mana makna teks itu dapat *dipahami* secara jelas oleh para pengkaji hukum. (c). *al-Indhibât*, terukur. Adanya suatu batasan jelas yang mengarah pada tujuan yang dimaksud. (d). *al-Itthirâd*, konsisten. Artinya tidak mudah berubah-ubah seiring berbedanya nilai-nilai letak geografis, tradisi, budaya dan zaman yang melatarbelakanginya. Baca Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran* hlm. 43

⁴⁰⁰ ⁴⁰⁰ Sebagai contoh ‘*illah*’ yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash* tanpa mengetahui ‘*illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.⁴⁰¹

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syâri'* (pembuat syariat) dalam pensyariatan suatu hukum. Diamnya *syâri'* itu terdapat dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syâri'* bermakna kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syâri'* berisi larangan. Dari sikap diamnya *syâri'* ini akan diketahui tujuan hukum.⁴⁰²

Apabila dilihat cara mengetahui *maqâshid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqâshid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan

⁴⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hlm. 90

⁴⁰² Pengumpulan *al-Qurân* yang terjadi setelah Nabi saw. wafat merupakan contoh sikap diamnya *syâri'*. Pada masa Nabi saw. belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan *al-Qurân* tersebut. Selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan *al-Qurân*. Sikap diamnya Nabi saw. dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial. Secara esensi dapat dipahami, bahwa tidak satupun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah swt.⁴⁰³ Tujuannya, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut menggunakan analisis *maqâshid al-syarî'ah*.

Analisis *maqâshid al-syarî'ah* menurut Satria Effendi M. Zein - dikutip Amrullah Ahmad- merupakan salah satu pendekatan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya atau memahami syariat Islam. Pendekatan yang ditawarkan dalam menyimpulkan hukum melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Pendekatan kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil umum, *khusus, mujmal, mutlaq, muqayyad, zhahir*, dan lain-lain. Pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus, menggunakan metode *ijma, Qiyâs, istihsân, istishab, sadd al-zari'ah, 'urf*, dan sebagainya.⁴⁰⁴

Dalam upaya pemahaman *maqâshid al-syarî'ah*, al-Syathibi menewarkan tiga pendekatan, yaitu (1) mempertimbangkan makna zahir lafaz, (2) mempertimbangkan makna batin dan penalaran, dan (3) menggabungkan makna

⁴⁰³ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959), hlm. 366.

⁴⁰⁴ Lihat Amrullah Ahmad, ddk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Presss, 1996), hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zahir, makna batin dan penalaran.⁴⁰⁵ Penerapan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat pada empat aspek: (a) memperhatikan perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahyu*) *ashl* yang jelas; (b) memperhatikan ‘illah perintah dan larangan, (c) memperhatikan maksud-maksud pokok (*maqasid al-ashl*) dan tambahan (*maqasid al-tabi'i*); (d) tidak adanya keterangan syari.⁴⁰⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* didasarkan kepada wahyu dengan menggunakan tiga pendekatan yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan, bahwa *maqâshid al-syarî'ah* pada satu sisi memiliki dimensi *ilahi* (ketuhanan) karena *maqâshid al-syarî'ah* ditetapkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. pada sisi berbeda, *maqâshid al-syarî'ah* memiliki dimensi insani (kemanusiaan) karena dalam memahami teks wahyu tersebut digunakan nalar rasio manusia.

Karena itulah al-syâthibi menurut Duski Ibrahim menawarkan metode *istiqra'* *al-ma'nawi* yang mempunyai beberapa prinsip, yaitu: pertama, kolektivitas dalil dalam penetapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. Kedua, prinsip memperhatikan *qara'in ahwal* (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqulah*, yakni yang berkaitan dengan *nash-nash* secara langsung seperti teori-teori dan kaidah-kaidah hukum Islam, maupun *ghairu manqulah*, yakni yang tidak berkaitan langsung dengan *nash-nash*, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Ini berarti, perlunya merespons kondisi signifikan suatu masyarakat untuk

⁴⁰⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*....., hlm. 392-393.

⁴⁰⁶ *Ibid*, hlm. 393-403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan dalam penetapan hukum Islam. Ketiga, penetapan suatu hukum haruslah mempertimbangkan Tuhan dalam mensyariahkan hukum, sekalipun kondisi signifikan dari suatu masyarakat harus benar-benar dicermati. Keempat, mempunyai prinsip keterbukaan terhadap suatu kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil yang berbeda dari yang dipahami selama ini maupun kebenaran dari kenyataan empiris.⁴⁰⁷

Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* tidak terlepas dari dimensi insani. Asumsinya, bahwa syariah Islam bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukan kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan (*habl min al-nas* yang memancar dari *habl min Allah swt.*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunya*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-matsal al-a'la*) yang abadi di akhirat.⁴⁰⁸

Oleh karena itu, nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai syariah, demikian pula nilai syariah mustahil berlawanan dengan nilai

⁴⁰⁷ Lihat Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 238-239.

⁴⁰⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), hlm. xiv –xvi

Dalam *al-Qurân* surat al-Nahl ayat 60 disebutkan :

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [١٦:٦٠]

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baca dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan. Syariah tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan⁴⁰⁹ Manusia memang harus berbuat baik demi memperoleh redha Allah swt. karena justru dengan cara berusaha memperoleh ridha Allah swt. itu manusia akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah- demi kemanusiaannya sendiri, membutuhkan ridha Allah swt.⁴¹⁰

Dalam kaitan ini pula, dalam arti luas konsep hukum dalam *al-Qurân* bukan saja bernilai transenden tetapi juga bernilai profan Dengan kata lain, konsep hukum dalam *al-Qurân* merupakan integrasi antara nilai *ilahiah* dan *humanis*. Konsep hukum dalam *al-Qurân* bernilai ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allah swt. lah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia,⁴¹¹ tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan

⁴⁰⁹ Dapat dibaca dalam *al-Qurân* surat al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَثَلُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ [٢٢:٧٨]

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hlm. 341

⁴¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin*.....hlm. xiv - xvi

⁴¹¹ Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi dengan judul *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan manusia dalam kehidupan profan.

Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* berdimensi *ilahi* (ketuhanan), namun syariat diturunkan kepada manusia bukan untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia sendiri. Dalam bidang ibadat misalnya, kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan tidak berkurang jika hamba-hamba-Nya tidak beribadah kepada-Nya, begitu pula sebaliknya kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah hanya karena ibadah hamba-hamba-Nya. Tuhan tidak tergantung kepada hamba dan sebaliknya kemaslahatan manusia ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan hamba yang menukar keimanannya dengan kekafiran pun tidak akan memberikan kemudaratn kepada Tuhan,⁴¹² sebagaimana diungkapkan dalam QS. Ali Imran (3): 177 :

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٣:١٧٧]

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah swt., dan mereka akan mendapat azab yang besar.⁴¹³

Jika dikaitkan dengan konsep *ta'abbud* dan *ta'aqqul*, *maqasid syariah* pada lapangan ibadah, dimensi *ilahi* lebih dominan daripada dimensi insani. Sedangkan *maqâshid al-syarî'ah* pada lapangan muamalat dan adat istiadat, dimensi insani

⁴¹² Baca dalam La Jamaa, 2011, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam maqâshid al-syarî'ah*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45, no.II, Juli-Desember 2011, hlm.1264

⁴¹³ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ... hlm. 73

lebih dominan daripada dimensi *ilahi*. Walaupun demikian *maqâshid al-syarî'ah* - baik pada lapangan ibadat maupun muamalat dan adat istiadat- sama-sama memiliki dimensi *ilahi* dan dimensi insani. Yang berbeda hanya kualitasnya saja.⁴¹⁴

Dengan demikian Konsep *maqâshid al-syarî'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqâshid al-syarî'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal- disesuaikan dengan konteks zamannya, dirasa wajar jika ada upaya untuk mengembangkan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.⁴¹⁵ Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqâshid al-syarî'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.⁴¹⁶

6. *Maqâshid al-syarî'ah* dalam Ijtihad

Mencermati pentingnya mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, ulama berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan inti dari fiqhi. Oleh karena pengetahuan terhadap *maqâshid* menjadi suatu keharusan dalam menekuni

⁴¹⁴ Baca dalam La Jamaa, 2011, *Dimensi*....hlm. 1264

⁴¹⁵ *Ibid*, hlm. 1265

⁴¹⁶ Kasus kloning manusia misalnya, tidak diatur oleh wahyu. Bahkan para ulama klasik pun belum pernah membahasnya dan mungkin belum pernah terpikirkan di masanya. Namun dengan pendekatan *maqasid al-syariah* problem kloning manusia dapat dijawab dengan menggunakan analisis hifz al-nasl (menjaga keturunan). Karena secara embriologi, kloning manusia akan mengacaukan hubungan darah anak yang dilahirkan melalui teknologi kloning.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushul fiqhi. Pada prinsipnya mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syariat.

Dalam hubungan *maqâshid al-syarî'ah* dengan ijihad, Asy-Syatibi berpendapat bahwa apabila seseorang hendak berijihad, hendaklah berpegang pada *maqâshid al-syarî'ah*. Ia berpendapat bahwa mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* lebih utama dibanding menguasai bahasa arab bagi seseorang yang ingin berijihad dari teks arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa orang yang akan berijihad.⁴¹⁷ Salah satu manifestasi dari pandangan ini adalah tentang nikah mut'ah dan nikah tahlil, dan kedua model pernikahan ini adalah bersifat temporer atau sementara. Sejalan dengan ini, modelnya tidak perlu dipersoalkan karena *maqashid* dari suatu perkawinan adalah kesinambungan dan kasih sayang dalam kelanggenan.⁴¹⁸

Memahami *maqâshid al-syarî'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijihad karena ia meupakan temuan syariat yang sesungguhnya. Dengan *maqâshid al-syarî'ah* dapat diketahui apa yang termasuk taat, maksiat, rukun, dan sunat. Begitu pentingnya memahami *maqâshid al-syarî'ah* dalam menggali sebuah hukum, imam al-Ghazali menyebut *maqâshid al-syarî'ah* sebagai kiblat para mujtahid (*وانما قبله المجتهد مقاصد الشرع*)⁴¹⁹ Artinya seseorang yang ingin berijihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasan, tetapi perlu bergeser pada

⁴¹⁷ Hammadi al-Ubaydi, *Asy-Syatibiy wa Maqashid asy-Syariah*, (Mansyurat Kuliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at-Turas al-Islami, 1992), hlm. 183

⁴¹⁸ *Ibid.*,

⁴¹⁹ Al-Ghazali, *Tahqiqiul Qaulain*, dalam Jurnal Jam'iyyah Fiqhiyyah Saudi, Vol.III, tahun 1429 H/2008 M, hlm. 312. Ungkapan ini juga dikutip oleh al-Raisuni yang beliau ambil dari al-Suyuti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.

Dalam menemukan *qashd al-syar'i* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* lebih menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah swt. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam *al-Qurân* terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, pengembangan hukum dapat dilakukan.

Maqâshid al-syarî'ah secara substansial meliputi dua kemaslahatan, yaitu *Pertama, maqashid al-syari'* (tujuan pembuat hukum, Allah swt.), *Kedua, maqashid mukallaf* (tujuan mukallaf). Dari perspektif tujuan Allah swt. *maqashid* merujuk empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariat yaitu kemashalahatan manusia di dunia dan akhirat, (2) penetapan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, (3) penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan, (4) penetapan syariat guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.⁴²⁰ Selanjutnya tujuan syariat dari perspektif tujuan mukallaf yaitu agar setiap mukallaf mematuhi keempat tujuan syariat yang digariskan oleh *syari'* sehingga tercapai tujuan syariat yaitu kemashalahatan manusia, meliputi dunia dan akhirat.

Dalam hubungannya dengan ijtihad, 'Abdullah Darraz berpandangan bahwa

⁴²⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, ... Juz II, hlm.3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ijtihad pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengetahui dan mendapatkan hukum syara' secara optimal. Upaya demikian akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqashid al-syarî'ah*. al-syâthibi menempatkan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai syarat utama dalam berijtihad.⁴²¹

Ijtihad sebagai sebuah konsep penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam mempunyai metode penetapan hukum, baik sebagai *mashâdir al-ahkâm* maupun sebagai *adillah al-ahkâm*. Dengan demikian, ijtihad merupakan sarana dalam pembentukan atau penetapan (*tasyri'*) Hukum Islam. Tanpa ijtihad akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kandungan *al-Qurân* dan hadis, karena keduanya tidak aplikatif sehingga harus digali lebih dulu kandungannya agar menjadi kaedah hukum dan norma hukum yang praktis digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya, termasuk *maqâshid al-syarî'ah*nya. Karena itu dapat dikatakan bahwa ijtihad merupakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali Hukum Islam dari sumbernya untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴²²

Ijtihad dari aspek subyeknya terbagi kepada ijtihad perseorangan (*ijtihad fardhy*)⁴²³ dan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*).⁴²⁴ Wahbah Zuhaili (w.2015 M), membagi ijtihad kepada tiga macam, yaitu: 1) *Ijtihâd al-Bayâny* yaitu ijtihad

⁴²¹ *Ibid.*, Juz IV., hlm.76

⁴²² Abd. Al-Wahab Khallaf, 'Imu Ushul Fiqh (Cet. III; Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977), hlm. 216.

⁴²³ Ijtihad *fardy* ialah setiap ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah yang dihasilkan oleh seseorang. Baca Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 379.

⁴²⁴ Ijtihad *jama'i* ialah setiap ijtihad yang telah mendapat persetujuan dari para mujtahid terhadap suatu masalah yang diijtihadkan. *Ibid*, hlm. 381

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafal mempunyai makna ganda (*musytarak*) ataupun adanya dalil yang tampak bertaentangan ditempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (mengumpulkan dan mengkompromikan kemudian ditarjih). 2) *Ijtihad al-Qiyasy* yaitu menganalogikan hukum yang disebut kepada masalah baru yang belum ada hukumnya, karena adanya persamaan '*illat*. 3) *Ijtihad al-Istishlahy* yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan di dalam sama sekali secara khusus maupun tidak ada mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah demikian, penetapan hukum yang dilakukan berdasarkan '*illat* untuk keselamatan.⁴²⁵ Hampir sama dengan Wahbah Zuhaily, al-Tiwana, dari segi ini membagi ijtihad kepada tiga macam yaitu ijtihad dalam memberi penjelasan dan penafsiran (*bayan*) terhadap hukum yang telah ada. Ijtihad dalam melakukan analogi (*qiyas*) terhadap hukum-hukum yang telah ada dan disepakati. Ijtihad dalam arti penggunaan *al-ra'yu*.⁴²⁶

Dalam konteks kekinian, metode ijtihad yang tepat menurut penulis adalah model ijtihad *maqâshidî* yang bertumpu pada '*illat* dan kemaslahatan sehingga mampu merespon pesatnya perkembangan zaman. Sekalipun telah dikenal metode-metode penetapan hukum dalam ushul fiqh seperti *qiyas*, *istihsân*, *istishlah*, *istishab*, *sad al-Zara'i*.⁴²⁷ Terkait dengan metode penetapan hukum tersebut, Syatibi menawarkan sebuah konsep ijtihad *maqâshidî* yang berupaya

⁴²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1041.

⁴²⁶ Muhammad Musa al-Tiwana, *Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-'Asr* (t.t.: Dâr al-Kutub al-Hadisah, 1973.), hlm. 39

⁴²⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' fi ma la fihi* (Kuwait: Dar Al-Kalam, 1972), hlm. 67

- merealisasikan kemaslahatan tersebut yaitu model ijthad *istinbâthi* dan Ijthad *Tathbiqî*. Ijthad *istinbâthi* adalah sebuah upaya untuk meneliti ‘illah yang dikandung oleh *nash*, sementara ijthad *tathbiqî* adalah upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum diidentifikasi dan diterapkan sesuai ide yang dikandung oleh *nash*. Ijthad ini disebut juga dengan *Tahqîq al-Manâth* yang berfokus pada upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam *nash*.⁴²⁸

Pembagian yang dikemukakan Syatibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad karena dalam ijtihad *istinbâthi* seorang mujtahid dapat memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh *nash* yang abstrak. Sedangkan dalam ijtihad *tathbîqi* seorang mujtahid berupaya menerapkan ide-ide yang abstrak tadi terhadap permasalahan-permasalahan yang konkret tadi. Jadi objek kajian ijtihad *istinbâthi* adalah *nash* sementara *tathbîq* adalah manusia dengan dinamika dan perkembangan yang dialaminya. Ijtihad *tathbîq* dapat juga disebut dengan upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide *nash* pada tataran kehidupan manusia yang senan-tiasa berkembang dan berubah sehingga wajar jika Syatibi menyebut ijtihad *tathbîq* ini sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.⁴²⁹

Mencermati dua model ijihad yang dikemukakan oleh Syatibi tersebut di atas, menurut analisis penulis model ijihad *istinbâthi* adalah ijihad yang dapat dilakukan seorang diri maupun kelompok yang memiliki persyaratan-persyaratan ijihad seperti pengetahuan bahasa Arab, pengetahuan tentang sunnah dan

⁴²⁸ Syatibi, ...jilid IV,, hlm. 89.

429 *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. Sebaliknya, ijthad *tathbîq* adalah model ijthad kolektif yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang melibatkan ilmuwan yang ahli tentang suatu masalah tanpa harus memenuhi standar syarat-syarat ijthad tersebut. Dalam kasus ini, ilmuwan dibutuhkan untuk memberi informasi dan konfirmasi terhadap suatu masalah di mana masalah tersebut, mungkin seorang ulama tidak memiliki kompetensi tentang hal tersebut. Misalnya, dalam dunia kedokteran, operasi ganti kelamin, penanaman alat genetik atau permak ulang, yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah pengetahuan seorang dokter ahli. Persoalan-persoalan seperti inilah menurut penulis yang akan terus berkembang dan tidak berhenti sampai akhir zaman.

Sekalipun peran ijthad *tathbîq* lebih menonjol pada aspek sosial budaya dan politik dibanding ijthad *istinbâthi* yang lebih terfokus pada *nash* syar'i tidak berarti kedua model ijthad ini tidak memiliki hubungan antara keduanya. Di dalam pelaksanaan ijthad *tathbîq*, ijthad *istinbâthi* memegang peranan yang amat penting karena pengetahuan tentang esensi dan ide umum suatu *nash* tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penetapan hukumnya. Artinya, ijthad *tathbîq* yang disebut *tahqîq al-manâth* harus dikaitkan dengan *takhrîj al-manâth* dan *tahqîq al-manâth* sebagai ijthad *istinbâthi*.⁴³⁰

⁴³⁰ Misalnya, kata adil dalam QS at-Thalaq ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dapat menjadi saksi adalah orang yang bersifat adil. Kata adil merupakan kata kunci dalam ayat ini. Dalam melakukan ijthad seseorang harus mengetahui dengan teliti sifat adil yang dimaksud oleh *nash* dan upaya mengetahui kriteria sifat adil dapat disebut ijthad *istinbâthi* sedang meneliti pada siapa sifat adil itu yang ditunjuk nas bisa ditemukan merupakan model ijthad *tathbîqi*. Baca dalam Achmad Musyahid Idrus, *Korelasi maqâshid al-syarî'ah dengan Metode Penetapan Hukum*, Jurnaldiktum.blogspot.co.id. diakses 5 Mei 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hubungan antara *maqâshid al-syarî'ah* dan ijtihad sebagai sebuah metode penemuan dan penetapan hukum, corak penalaran yang dikembangkan dewasa ini adalah corak penalaran *ta'lili* dan corak penalaran *istishlâhi*. Corak penalaran *ta'lili* adalah sebuah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *illah-illah* hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Penalaran *ta'lili* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash* al-Qur'an maupun hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *illah-illah* hukumnya.⁴³¹

Dengan memperhatikan 'illah yang terkandung dalam *nash*, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya oleh seorang mujtahid melalui penalaran terhadap 'illah yang ada dalam *nash* tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran *ta'lili* ini adalah dalam bentuk metode *qiyâs* dan *istihsân*.⁴³²

Sementara corak penalaran *istishlâhi* adalah sebuah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari *al-Qurân* dan hadis. Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Artinya, kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara

⁴³¹ Baca Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkâm* (Beirût: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981), hlm. 14-15.

⁴³² Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, qiyas adalah menghubungkan sesuatu masalah yang tidak ada hukumnya baik dari *al-Qurân* maupun hadis dengan sesuatu masalah yang ada hukumnya, karena memiliki persamaan illatnya sehingga dihukumkan sama. Baca dalam M. Abdul Mujieb et al., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 280.

Istihsan, ialah berpaling pada sesuatu dari sesuatu hukum tentang satu masalah kepada hukum lain tentang masalah itu karena ada dalil yang lebih kuat. Lihat pula Muktar Yahya,...., hlm. 66 & 217.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung baik melalui proses penalaran *bayâni* maupun *ta'lili* melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran *istishlâhi* ini terintegrasi dalam metode *maslahah al-mursalah* dan *al-zari'ah*.⁴³³

Metode penetapan hukum seperti *istihsân* dan *zarâ'i* perlu dipertimbangkan karena urgensi dan efektifitasnya sangat mendukung *maqâshid al-syarî'ah*. Istihsân adalah sebuah metode yang menekankan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia. Metode ini memang ditolak oleh Syafi'i disebabkan substansi istihsân yang dijelaskan oleh pengikut Abu Hanîfah tidak utuh sehingga tidak mencerminkan substansi istihsân yang sesungguhnya. Sementara *zarâ'i* adalah sebuah metode yang menekankan pada dampak suatu tindakan yang berimplikasi pada dua dampak perbuatan seorang mukallaf yaitu yang berpotensi masalah karenanya didukung oleh *nash* dan perbuatan yang berpotensi mafsadah karenanya dilarang oleh *nash*.⁴³⁴

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, tampaknya pengembangan metode ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama baik dalam corak penalaran *ta'lili* maupun corak penalaran *istishlâhi* sangat memungkinkan karena dapat berperan besar dalam memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dewasa ini apabila diberi muatan dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Jika teori *maqâshid al-syarî'ah* ini dikaitkan dengan pesatnya dan kompleksnya

⁴³³ *Mashlahah al-Mursalah*, adalah tiap-tiap mashlahah yang tidak dikaitkan dengan syara' yang menyebabkan kita menghargainya atau tidak menghagainya, padahal dalam menghargainya ada manfaat, atau menolak mudharat. *Dzari'ah* ialah sesuatu yang dapat mengantarkan sampai kepada sesuatu yang dilarang yang berisi kerusakan. Atau apa yang menjadi wasilah dan jalan kepada sesuatu. *Ibid.*, hlm. 220.

⁴³⁴ Baca kembali Achmad Musyahid Idrus, *Korelasi maqâshid....*

persoalan yang dihadapi umat sekarang ini, metode penetapan hukum yang dapat dikembangkan adalah metode ijtihad *tathbîqi* dengan memadukan corak penalaran *ta'lîli* dan corak penalaran *istishlâhi* karena yang dibutuhkan dewasa ini adalah kolektivitas keilmuan sehingga hasil ijtihad itu menjadi komprehensif.⁴³⁵

Keterkaitan antara *maqashid al-syarî'ah* dan metode penetapan hukum dapat dilihat pada substansi *maqashid al-syarî'ah* tersebut yakni mewujudkan kemaslahatan dan pengembangan metode penetapan hukum *tathbîqi* dengan corak penalaran *ta'lîli* dan *istishlâhi*. Keberadaan kedua corak penalaran tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara *maqashid al-syarî'ah* dan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam memiliki hubungan yang erat sebagaimana yang terlihat dalam mekanisme ijtihad *istinbâthi* dan *tathbîqi* tersebut di atas.

Ijtihad *istinbâthi* mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan pemahaman *maqashid al-syarî'ah* karena ijtihad *istinbâthi* merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam *nash al-Qurân* dan hadis yang merupakan kitab *al-Syâri'*. Sementara ijtihad *istinbâthi* dan ijtihad *tathbîqi* mempunyai hubungan yang saling memerlukan, secara tidak langsung terdapat kaitan antara ijtihad *tathbîqi* dengan *maqashid al-syarî'ah* walaupun kaitan itu tidak secara langsung. Dari kaitan ini dapat ditegaskan bahwa hubungan antara *maqashid al-syarî'ah* dan metode penetapan hukum dalam ijtihad tidak dapat dipisahkan.

Atas dasar hubungan tersebut di atas, *maqashid al-syari'ah* dan metode penetapan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *maqashid al-syari'ah*

⁴³⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah menjadi cita-cita utama daripada pembentukan hukum Islam. Dengan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang telah ada seperti *qiyas*, *istihsân*, *istishlah*, *sad al-zara'iy*, para mujtahid akan dapat melahirkan produk-produk hukum yang mampu mendukung *maqashid al-syarî'ah*. Keterkaitan lainnya adalah bahwa tidak semua persoalan hukum mendapat pengaturan di dalam *al-Qurân* dan hadis. Banyak persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam *al-Qurân* dan hadis.⁴³⁶ Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (*al-syâri'*) tidak mengemukakan semua *maqashid al-syarî'ah* secara tersurat (*mantuq*), akan tetapi sebagian dikemukakan secara tersirat (*mafhum*), bahkan ada yang tidak dikemukakan (*sirr*).

Dengan demikian, untuk mengetahui *maqashid al-syarî'ah* dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah khususnya yang *mafhum* dan *sirr*, orang harus berijtihad dengan menggunakan metode-metode yang ada dengan ditopang oleh pengembangan pemahaman metodologis, seperti metode *al-bayân* dari Imām al-Syafi'i dan metode *al-istiqrâ'* dari Imām al-Syathibi dan metode pemahaman lain. Sebab dengan semakin diketahuinya *maqashid al-syarî'ah* yang lain (selain yang telah dikenal: *al-dharûriyyah al-khamsah*), dapat dibuat produk-produk hukum yang relevan dengan itu. Bahkan untuk hal-hal yang belum diketahui sekalipun, sesungguhnya para mujtahid dapat membuatkan produk hukumnya (*fiqh iftiradhy*).⁴³⁷ Sejalan dengan ini, al-Syaukani juga menekankan pentingnya pengetahuan *maqâshid al-syarî'ah* bagi mujtahid. Seorang mujtahid-menurutnya-

⁴³⁶ Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 105.

⁴³⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), cet.3, hlm. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhenti pada teks atau hanya melakukan pendekatan *lafzhiyah* (tekstual) dan terikat pada nash yang juz'i serta mengabaikan maksud-maksud terdalam dari pensyariatan hukum, ia akan terjerumus pada kesalahan-kealahan dalam berijtihad.⁴³⁸

Dapat dikatakan bahwa pemahaman *maqashid al-syari'ah* ini pun telah digunakan para mujtahid pada masa lalu dalam menelaah dan mengkaji esensi syari'at dari sumbernya *al-Qur'an* dan hadis yang dituangkan ke dalam karya-karyanya, sehingga tergambar hubungan tekstual dengan kontekstual dalam karya-karya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para mujtahid telah merintis suatu usaha ilmiah dalam upaya memahami dan merealisasikan hukum *Ilahiyah* dalam realitas kehidupan masyarakat.⁴³⁹

Melalui *maqashid al-syari'ah*, ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan beragam persoalan kontemporer yang tidak diuraikan oleh *al-Qur'an*. Melalui jalan ini hukum Islam akan tetap dinamis dalam merespon berbagai fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

⁴³⁸ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul 'ila Tahqiq min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 258.

⁴³⁹ Baca dalam Sudirman M. Johan, *Reaktualisasi Fiqh Syafi'iyah*, Editor Husni Thamrin, (Pekanbaru : LPP UIN SUSKA & SUSKA PRESS, 2012), hlm. 11